



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

Dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2045.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPERIDA adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.

BAB II RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD disusun mempedomani RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui penyusunan RPJMD setiap 5 (lima) tahun dan RKPD setiap 1 (satu) tahun.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Maret 2025**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Maret 2025**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

FAUZI ASNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.74.A/2025

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2025-2045**

I. UMUM

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Kabupten Siak Tahun 2025-2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah Kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah terpilih yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi Ketentuan Umum, RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup serta dokumen RPJPD.

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Siak;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah provinsi beberapa tahun terakhir dan rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;

3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
4. Menyesuaikan proses penyusunan dan sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024;
5. Merumuskan fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Siak pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Siak;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 1

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan Karunianya lah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 telah diselesaikan dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi, serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan sebuah kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, dimana setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan berdurasi 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah, dan penyusunan RPJMD Kabupaten Siak. Secara bertahap, diharapkan Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud visi Kabupaten Siak 2045: **Siak Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Yang Maju Dan Berkelanjutan**. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Siak dan mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyelesaian Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

mewujudkan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Pembiayaan pembangunan dari dunia usaha atau swasta dilakukan secara transparan, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas.

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

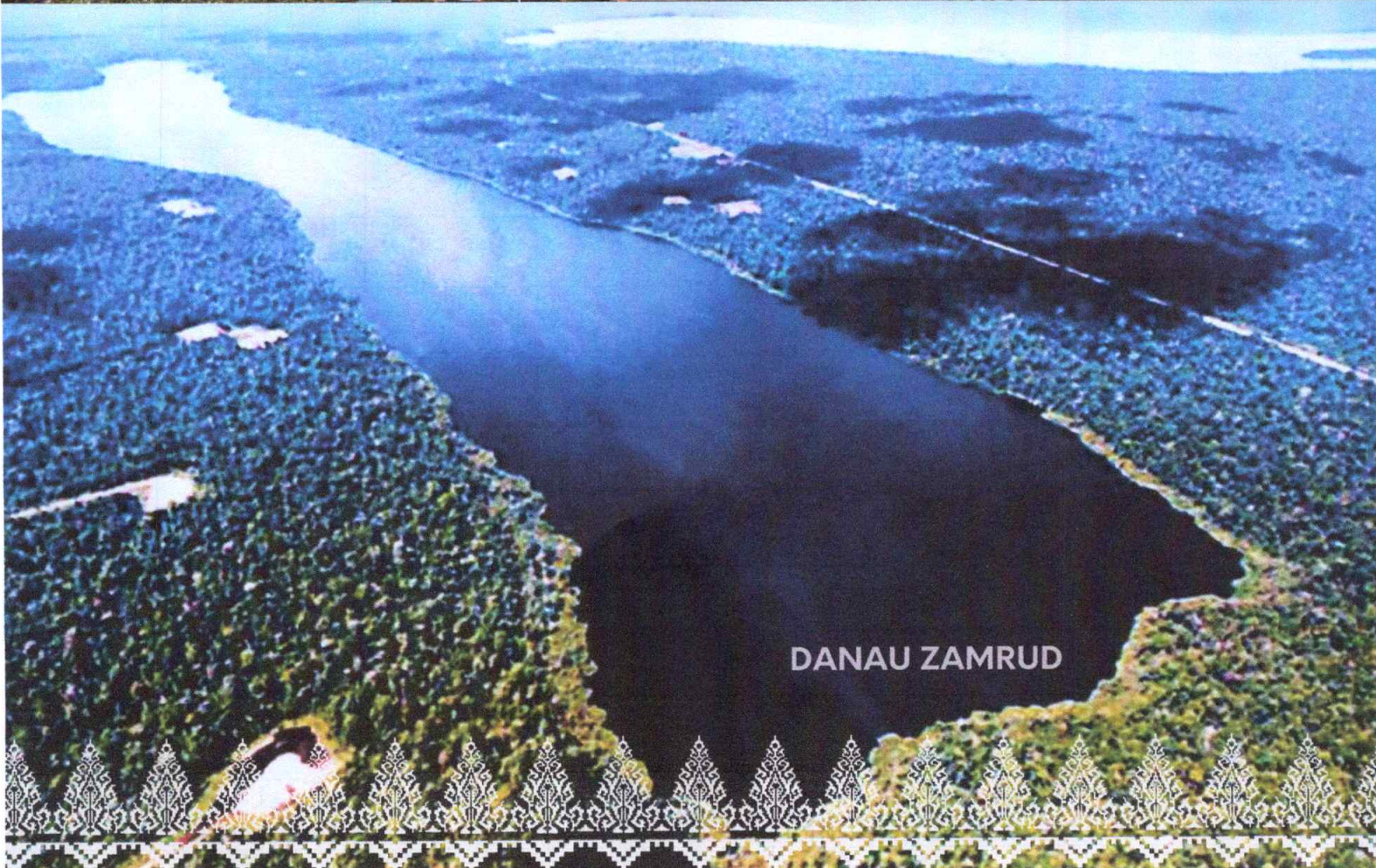


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NO. 1 TAHUN 2025**

RPJPD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

2025-2045



DANAU ZAMRUD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045	1-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-4
1.3.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan RPJP Nasional tahun 2025 – 2045 ...	1-5
1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045	1-6
1.3.3 Hubungan Dokumen RPJPD Kabupaten Siak Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2040	1-6
1.3.4 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045	1-7
1.3.5 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan RPJMD Kabupaten Siak.....	1-7
1.4 Maksud dan Tujuan	1-7
1.5 Sistematika Penulisan.	1-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1 Aspek Geografi	2-1
2.1.2 Demografi	2-21
2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya.....	2-25
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	2-25
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	2-34
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	2-62
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	2-63
2.3.2 Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)	2-69
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	2-78
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	2-90
2.4 Aspek Pelayanan Umum	2-92
2.4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2-92

2.4.2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	2-93
2.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP).....	2-93
2.4.4	Indeks Inovasi Daerah (IID).....	2-94
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025.....	2-95
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	2-98
2.6.1	Analisis Proyeksi Penduduk	2-98
2.6.2	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2-100
2.7	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana berdasarkan RPJPN 2025-2045	2-102
2.7.1	Megatren	2-102
2.7.2	Modal Dasar	2-105
2.7.3	Perubahan Iklim, Daya tampung dan Daya Dukung.....	2-107
2.7.4	Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	2-108
2.8	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	2-118
2.8.1	Pusat pertumbuhan wilayah di kabupaten siak	2-129
2.8.2	Kebijakan Perkotaan.....	2-130
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		3-1
3.1	Permasalahan Daerah	3-1
3.2	Isu Strategis	3-6
3.2.1	Isu Megatren dan Internasional	3-6
3.2.2	Isu Strategis Nasional	3-10
3.2.3	Isu Strategis Provinsi Riau.....	3-12
3.2.4	Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.....	3-13
3.2.5	Isu Strategis Kabupaten Siak	3-13
3.2.6	Pengintegrasian Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 dalam Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.....	3-16
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH		4-1
4.1	Visi 4-1	
4.1.1	Visi Indonesia Emas 2045	4-1
4.1.2	Visi Siak 2045	4-3
4.2	Sasaran Visi.....	4-4
4.3	Misi	4-6

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	4-1
4.1 Visi	4-1
4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045	4-1
4.1.2 Visi Siak 2045	4-3
4.2 Sasaran Visi.....	4-4
4.3 Misi	4-6
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	5-1
5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Siak 2025-2045	5-1
5.2 Sasaran Pokok	5-11
5.3 Kawasan Strategis Kabupaten.....	5-29
BAB VI PENUTUP	6-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan.....	6-1
6.2 Manajemen Risiko.....	6-2
6.3 Pembiayaan Pembangunan.....	6-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Siak.....	2-2
Tabel 2. 2 Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di Kabupaten Siak Tahun 2023.....	2-3
Tabel 2. 3 Daftar Nama Sungai di Wilayah Kabupaten Siak.....	2-4
Tabel 2. 4 Rata-rata Curah Hujan Per Bulan (mm) Kabupaten Siak Tahun 2018-2023.....	2-5
Tabel 2. 5 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Siak Tahun 2023.....	2-6
Tabel 2. 6 Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh) Kabupaten Siak Tahun 2021-2023.....	2-7
Tabel 2. 7 Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan	2-8
Tabel 2. 8 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023	2-9
Tabel 2. 9 <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-9
Tabel 2. 10 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Siak Tahun 2020-2023	2-10
Tabel 2. 11 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Siak Tahun 2022.....	2-10
Tabel 2. 12 Potensi Luas Bahaya Banjir per Kecamatan Kabupaten Siak.....	2-11
Tabel 2. 13 Data banjir Kabupaten Siak tahun 2021-2023.....	2-12
Tabel 2. 14 Luas Bencana Kekeringan Kabupaten Siak Tahun 2023	2-12
Tabel 2. 15 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi per Kecamatan di Kabupaten Siak.....	2-13
Tabel 2. 16 Sebaran Hotspot Kabupaten Siak Tahun 2018-2022.....	2-14
Tabel 2. 17 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Siak.....	2-14
Tabel 2. 18 Persentase Luasan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem di Kabupaten Siak.....	2-15
Tabel 2. 19 Luas RTH Publik Sebesar 20 dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan Kabupaten Siak	2-17
Tabel 2. 20 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Cita Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-17
Tabel 2. 21 Rasio Bangunan ber IMB Kabupaten Siak.....	2-18
Tabel 2. 22 Nilai Indeks Mutu Air Kabupaten Siak Tahun 2023	2-18
Tabel 2. 23 Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-19
Tabel 2. 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Siak Tahun 2017-2023	2-20
Tabel 2. 25 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-21
Tabel 2. 26 Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-21

Tabel 2. 27 Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Siak Tahun 2023 ...	2-22
Tabel 2. 28 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-23
Tabel 2. 29 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023	2-24
Tabel 2. 30 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha	2-25
Tabel 2. 31 Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-28
Tabel 2. 32 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-28
Tabel 2. 33 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Siak Tahun 2019–2023	2-29
Tabel 2. 34 Perkembangan IPM Kabupaten Siak Tahun 2010-2023	2-31
Tabel 2. 35 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 (Rp Juta)	2-33
Tabel 2. 36 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2022-35	
Tabel 2. 37 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-36
Tabel 2. 38 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....	2-36
Tabel 2. 39 Capaian IBangga di Kabupaten Siak Tahun 2021-2023	2-37
Tabel 2. 40 Indeks perlindungan Anak Kabupaten Siak Tahun 2022-2023.....	2-37
Tabel 2. 41 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ...	2-38
Tabel 2. 42 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Siak Tahun 2023	2-38
Tabel 2. 43 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun Kabupaten Siak 2019-2023	2-39
Tabel 2. 44 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-39
Tabel 2. 45 Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-40
Tabel 2. 46 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-40
Tabel 2. 47 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Siak tahun 2019-2023	2-41
Tabel 2. 48 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di imunisasi Campak Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-41
Tabel 2. 49 non-Polio AFP rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Siak tahun 2019-2023	2-42
Tabel 2. 50 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-42
Tabel 2. 51 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	2-43
Tabel 2. 52 Jumlah Balita Stunting berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2023	2-43

Tabel 2. 53 Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Siak dan Provinsi Riau	2-44
Tabel 2. 54 Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-45
Tabel 2. 55 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023	2-46
Tabel 2. 56 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2023	2-46
Tabel 2. 57 Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-49
Tabel 2. 58 Rekapitulasi Data Disabilitas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-50
Tabel 2. 59 Data Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas Kabupaten Siak Tahun 2023..	2-50
Tabel 2. 60 Data Disabilitas Yang Sudah Dipekerjakan Di Organisasi Perangkat Daerah (Opd)/ Dunia Usaha Tahun 2023.....	2-51
Tabel 2. 61 Perkembangan Pembangunan Gender Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023	2-54
Tabel 2. 62 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023	2-55
Tabel 2. 63 Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Siak tahun 2019 - 2023 ..	2-57
Tabel 2. 64 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2023	2-57
Tabel 2. 65 Jumlah Warisan Budaya Benda Tak Benda (WBTB) Kabupaten Siak Tahun 2023	2-58
Tabel 2. 66 Jumlah Cagar Budaya (CB) Kabupaten Siak Tahun 2023	2-59
Tabel 2. 67 Skor PPH Pangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-61
Tabel 2. 68 Daerah Rawan Pangan Kabupaten Siak.....	2-62
Tabel 2. 69 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022-2023.....	2-63
Tabel 2. 70 Perkembangan PDRB Kabupaten Siak 2019-2023 Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah).....	2-64
Tabel 2. 71 PDRB per Kapita ADHB dan ADHK dengan Migas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-65
Tabel 2. 72 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023.....	2-66
Tabel 2. 73 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak	2-66
Tabel 2. 74 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023	2-67

Tabel 2. 75 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....	2-68
Tabel 2. 76 Angka Melek Huruf Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-69
Tabel 2. 77 Angka Melek Huruf Berdasarkan Usia Kabupaten Siak Tahun 2019-2023....	2-69
Tabel 2. 78 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-70
Tabel 2. 79 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Siak Tahun 2020-2024.....	2-70
Tabel 2. 80 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-71
Tabel 2. 81 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-72
Tabel 2. 82 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-72
Tabel 2. 83 Angka Putus Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-73
Tabel 2. 84 Angka Kelulusan Kabupaten Siak Tahun 2019- 2023	2-73
Tabel 2. 85 Angka Melanjutkan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-73
Tabel 2. 86 Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-74
Tabel 2. 87 Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Siak	2-74
Tabel 2. 88 Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Siak 2019-2023	2-75
Tabel 2. 89 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2023.....	2-76
Tabel 2. 90 Rasio Ketergantungan Kabupaten Siak Tahun 2019– 2023.....	2-77
Tabel 2. 91 Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-78
Tabel 2. 92 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional di Kabupaten Siak 2023	2-78
Tabel 2. 93 Panjang Jalan di Kabupaten Siak Menurut Kondisi Jalan (Km) Tahun 2019-2023	2-78
Tabel 2. 94 Kondisi Jalan di Kabupaten Siak Tahun 2023.....	2-79
Tabel 2. 95 Kondisi Jalan di Kabupaten Siak dari Jenis Permukaan Tahun 2019-2023	2-79
Tabel 2. 96 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Siak 2019-2023.....	2-80
Tabel 2. 97 Jumlah Pemasangan Rambu - rambu di Kabupaten Siak dari Tahun 2019-2023	2-80
Tabel 2. 98 Data Capaian Indikator Pembangunan Dan Layanan Publik Kabupaten siak.	2-81
Tabel 2. 99 Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-82
Tabel 2. 100 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....	2-82
Tabel 2. 101 Akses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Siak Tahun 2023	2-82

Tabel 2. 102 Indikator Capaian Pembangunan Kabupaten Siak	2-83
Tabel 2. 103 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Kabupaten Siak tahun 2019-2023	2-84
Tabel 2. 104 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kabupaten Siak.....	2-84
Tabel 2. 105 Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-85
Tabel 2. 106 Daerah Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2023	2-85
Tabel 2. 107 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-86
Tabel 2. 108 Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2023	2-86
Tabel 2. 109 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap	2-87
Tabel 2. 110 Persentase Jaringan Perpipaan Perkotaan Kabupaten Siak Tahun 2024.....	2-88
Tabel 2. 111 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2019–2023.....	2-88
Tabel 2. 112 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten Siak Tahun 2018-2023	2-89
Tabel 2. 113 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Siak Tahun 2023.....	2-90
Tabel 2. 114 Angka Kriminalitas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-91
Tabel 2. 115 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-91
Tabel 2. 116 Kategorisasi Kerukunan Beragama.....	2-91
Tabel 2. 117 Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Siak Tahun 2022-2024	2-92
Tabel 2. 118 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023	2-92
Tabel 2. 119 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-93
Tabel 2. 120 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023	2-94
Tabel 2. 121 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten siak Tahun 2019-2023.....	2-95
Tabel 2. 122 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Siak	2-98
Tabel 2. 123 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Siak	2-99
Tabel 2. 124 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Siak	2-99
Tabel 2. 125 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Siak	2-100
Tabel 2. 126 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Siak	2-100
Tabel 2. 127 Target Kebutuhan Listrik Kabupaten Siak per kapita (kWh)Tahun 2025 - 2045	2-101
Tabel 2. 128 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Siak	2-101
Tabel 2. 129 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Siak	2-102

Tabel 2. 130 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Siak	2-102
Tabel 2. 131 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Potensi Desa/Kampung.....	2-110
Tabel 2. 132 Rencana Sistem Pengembangan Wilayah Kabupaten Siak.....	2-119
Tabel 2. 133 Kawasan Budidaya di Wilayah Kabupaten Siak	2-130
Tabel 3. 1 Angka Kemiskinan Kabupaten Siak.....	3-2
Tabel 3. 2 Tingkat Pengangguran Kabupaten Siak	3-2
Tabel 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak.....	3-3
Tabel 3. 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Siak.....	3-4
Tabel 3. 5 Indeks Reformasi Birokrasi	3-5
Tabel 3. 6 Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke Dalam Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.....	3-16
Tabel 4. 1 Sasaran Visi	4-5
Tabel 5. 1 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changer).....	5-1
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Rppjd Kabupaten Siak Tahun 2025-2045	5-7
Tabel 5. 3 Sasaran Pokok Rppjd 2025-2045 Kabupaten Siak	5-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	1-5
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Siak.....	2-1
Gambar 2. 2 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Siak	2-6
Gambar 2. 3 Peta Sebaran Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Siak Tahun 2021.	2-11
Gambar 2. 4 Nilai Ambang Batas DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Siak.....	2-16
Gambar 2. 5 Persentase Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Usia Pada Tahun 2023	2-24
Gambar 2. 6 Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Riau dan Kabupaten Siak Tahun 2010-2023 (%)	2-26
Gambar 2. 7 Nilai Indeks Gini Kabupaten Siak Tahun 2018-2023.....	2-27
Gambar 2. 8 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Siak Tahun 2010– 2023	2-28
Gambar 2. 9 Tingkat Kemiskinan Tahun 2010-2023 (%)	2-29
Gambar 2. 10 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak, Riau dan Nasional Tahun 2010-2023	2-30
Gambar 2. 11 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 2010-2023	2-32
Gambar 2. 12 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 (TH).....	2-32
Gambar 2. 13 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2023	2-33
Gambar 2. 14 Perkembangan Inflasi Kabupaten siak Tahun 2019-2023	2-34
Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas Tahun 2045	4-2
Gambar 4. 2 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045.....	4-2
Gambar 5. 1 Peta Kawasan Strategis	5-29

Tabel 2. 111 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2019–2023**Error!**

Bookmark not defined.

Tabel 2. 112 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten Siak Tahun 2018-2023**Error!** **Bookmark**

not defined.

Tabel 2. 113 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Siak Tahun 2023..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 114 Angka Kriminalitas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 115 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 116 Kategorisasi Kerukunan Beragama..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 117 Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Siak Tahun 2022-2024 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 118 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 119 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 120 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 121 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten siak Tahun 2019-2023**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 122 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Siak **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 123 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Siak ..**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 124 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Siak **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 125 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Siak**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 126 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Siak **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 127 Target Kebutuhan Listrik Kabupaten Siak per kapita (kWh)Tahun 2025 - 2045 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 128 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Siak**Error!** **Bookmark not defined.**

Tabel 2. 129 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Siak**Error!** **Bookmark not defined.**

BAB I



Istana As-Serayyah Al-Hasyimiah

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 5 Maret 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Siak memiliki akar sejarah yang kuat, yang dimulai pada tahun 1723 Masehi ketika seorang Raja yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahman Syah (Raja Kecil) mendirikan kerajaan tersebut. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, Kerajaan Siak, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Syarif Kasim II, dengan tulus menyatakan kesetiaan dan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Kerajaan Siak mengalami perubahan status dan menjadi Kecamatan Siak di bawah wilayah Kewedanaan DATI II Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau

Pada 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Siak menjadi kabupaten pemekaran baru yang terpisah dari Kewedanaan Kabupaten Bengkalis dengan Ibu Kota berkedudukan di Siak Sri Indrapura yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di sebutkan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya disebutkan juga bawa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Pasal 1 poin 4 mendefinisikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua puluh) tahun. Pada pasal 5 ayat (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN.

Berdasarkan pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Siak menjadi sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena RPJPD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah yang berkelanjutan dan berkualitas. RPJPD juga memberikan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dalam waktu 20 tahun ke depan. RPJPD harus mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif seperti hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 serta pencapaian kerangka ekonomi makro daerah, adanya jangka waktu mencapai sasaran, masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya dan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Untuk mewujudkan Pembangunan Siak Hijau yang perlu diacu dalam RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 yaitu dilaksanakan dengan (a) memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (b) memperhatikan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; (c) memperhatikan daerah sempadan sungai; (d) memenuhi baku mutu limbah; (e) menyelesaikan dan/atau mengurangi konflik berbasis sumber daya alam; (f) partisipasi masyarakat; dan (g) peninjauan dan inventarisasi kembali perizinan berusaha berbasis lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045

Dasar Penyusunan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 berpedoman serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025 – 2045; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 (Berita Acara Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 4); dan
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1);

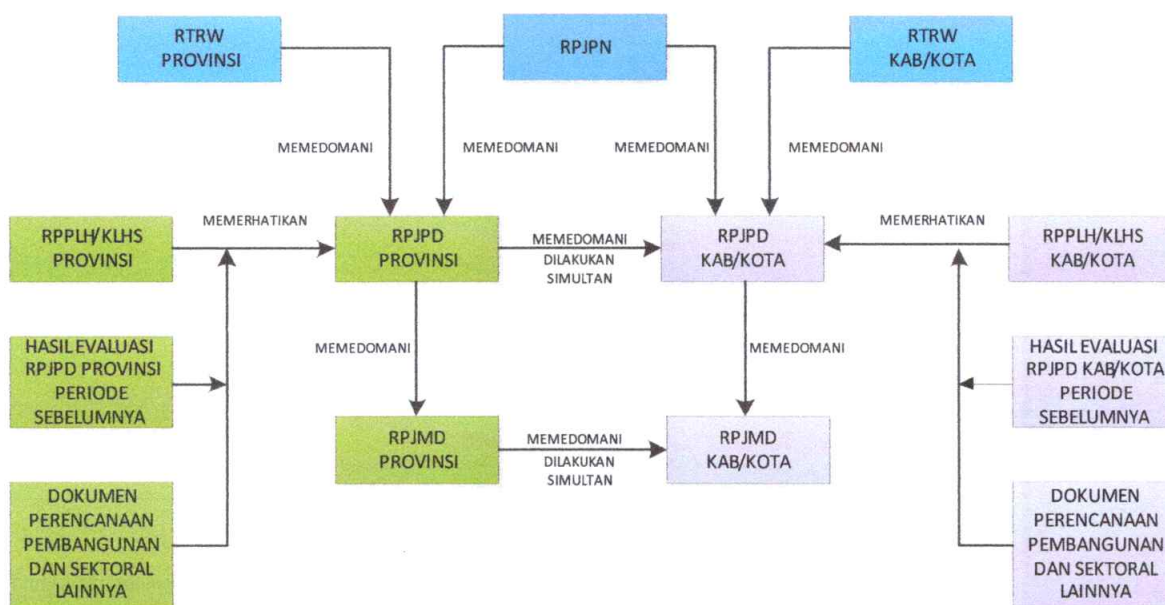
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJPD Kabupaten Siak disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Riau. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Siak dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Riau dan Nasional. Penyusunan RPJPD

Kabupaten Siak disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional 2005–2025, RTRW Provinsi Riau, RTRW Kabupaten Siak, RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya. Dalam hal ini, proses memperhatikan dilaksanakan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur serta pola ruang Kab/Kota yang terletak di sekitar Kabupaten Siak.

Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya dapat dilihat pada skema gambar dibawah ini :

Gambar 1. 1
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya



Sumber : *Inmendagri No 1 tahun 2024.*

1.3.1 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan RPJP Nasional tahun 2025 – 2045

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Di samping itu Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 12 dijelaskan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penyusunan RPJPD Kabupaten Siak tahun 2025-

2045 haruslah mengacu pada RPJP Nasional tahun 2025-2045, dimulai saat penyusunan rancangan awal ini.

Saat ini, penyusunan RPJP Nasional tahun 2025-2045 telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang terdiri dari 6 Bab. Dalam Penetapan RPJP Nasional 2025-2045 di tetapkan Visi RPJP Nasional yaitu “ **Indonesia Emas 2045 : Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”. Selanjutnya Visi ini dijabarkan ke dalam 5 sasaran yang akan menjadi pedoman dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Siak tahun 2025-2045.

1.3.2 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

1.3.3 Hubungan Dokumen RPJPD Kabupaten Siak Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2040

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 12 dijelaskan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Pemerintah kabupaten Siak telah menetapkan RTRW Kabupaten Siak melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak tahun 2020-2040. Di dalam RTRW Kabupaten Siak tersebut terdapat muatan yang meliputi: tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

1.3.4 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 harus mengacu pada dokumen KLHS terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan.

1.3.5 Hubungan RPJPD Kabupaten Siak Dengan RPJMD Kabupaten Siak

Dokumen RPJPD Kabupaten Siak 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Siak selama 4 (empat) periode yaitu periode 2025-2029, periode 2030-2034, periode 2035-2039, dan periode 2040-2045. Selanjutnya, RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati untuk periode perencanaan 5 tahunan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 adalah memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah Kabupaten Siak, Badan Usaha dan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Kabupaten Siak sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis. Sebelum penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 juga telah dilakukan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Siak tahun 2005-2025. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Siak tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 ini.

Tujuan penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 ini antara lain :

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Siak;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Siak dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta

4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak disusun berdasarkan pada urutan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
- Bab II : Gambaran Umum Kabupaten Siak yang menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Siak sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: refleksi pembangunan, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis yang berisi permasalahan pembangunan daerah dan analisis mengenai isu-isu strategis.
- Bab IV : Rancangan Visi dan Misi Kabupaten Siak, yang memuat perumusan rancangan visi dan misi Kabupaten Siak untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang.
- Bab V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi setiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- Bab VI : Penutup, yang memuat pelaksanaan pengendalian, evaluasi, manajemen risiko dan pembiayaan pembangunan.

BAB II



TAMAN TENGKU AGUNG
Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Siak dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup pertumbuhan penduduk, komposisi dan populasi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Siak.

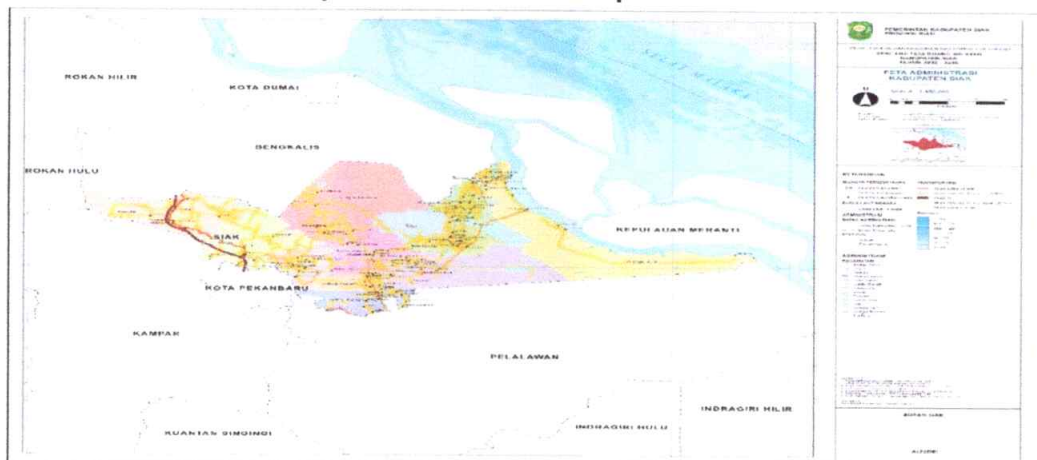
2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Siak memiliki luas **782.181,10 Ha** atau 8,70% dari total luas wilayah Provinsi Riau dan terdiri dari 14 kecamatan. Dengan pusat administrasi berada di kota Siak Sri Indrapura yang mencakup 2 kecamatan yakni Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Pekanbaru;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil Kepulauan Meranti.

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Siak



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2040

Luas wilayah administrasi 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Siak dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Bertambah/ Berkurang	Presentase Luas (%)	Jumlah	
			Tahun 2020	Tahun 2024			Kel	Kampung
1	Siak	Kampung Dalam	38.659,38	41.824,03	3.164,65	5,35	2	6
2	Mempura	Sungai Mempura	27.067,17	27.473,07	405,89	3,51	1	7
3	Sungai Apit	Sungai Apit	147.509,54	145.076,91	- 2.432,63	18,55	1	14
4	Sabak Auh	Bandar Sungai	8.613,95	9.241,21	627,27	1,18	-	8
5	Minas	Minas Jaya	71.112,10	64.601,49	- 6.510,61	8,26	1	4
6	Kandis	Telaga Sam-sam	86.581,10	85.984,15	- 596,95	10,99	3	8
7	Bunga Raya	Bunga Raya	16.423,83	14.880,78	- 1.543,05	1,90	-	10
8	Dayun	Dayun	100.577,77	99.451,97	- 1.125,80	12,71	-	11
9	Tualang	Perawang	33.821,42	40.818,71	6.997,30	5,22	1	8
10	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	44.995,60	47.151,79	2.156,18	6,03	-	11
11	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	32.717,64	29.577,78	- 3.139,86	3,78	-	12
12	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	19.176,38	13.574,89	- 5.601,49	1,74	-	7
13	Sungai Mandau	Muara Kelantan	136.220,08	136.495,74	275,65	17,45	-	9
14	Pusako	Dusun Pusako	25.877,74	26.028,58	150,84	3,33	-	7
TOTAL			789.353,70	782.181,10	- 7.172,60	100,00	9	122

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2040

Berdasarkan data luas wilayah administrasi kecamatan di atas, kecamatan terbesar terletak di Kecamatan Sungai Apit dengan luas wilayah 1.466,69 km², dan yang terkecil terletak di kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 90,14 km². Jumlah wilayah administratif kelurahan sebanyak 9 dan 122 desa/kampung.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Posisi astronomis Kabupaten Siak terletak diantara 1°16'30" - 0°20'49" Lintang Utara dan 100°54'21" - 102°10'59" Bujur Timur. Sebagian besar Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat.

b. Letak Geografis

Secara fisik letak geografis Kabupaten Siak memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (*IMS-growth triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran, dan sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar 60% wilayah Kabupaten Siak, morfologi perbukitan

sekitar 40% terdapat di bagian utara, timur dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara serta bagian barat daya wilayah DAS Siak.

c. Kondisi Kawasan

Secara geografis di Kabupaten Siak masih terdapat daerah pedalaman yang tersebar di Kecamatan Sungai Apit. Di daerah pedalaman tersebut berdiam suku pedalaman atau yang biasa disebut dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang hidup di sejumlah wilayah hutan di Kabupaten Siak. Komunitas Adat Terpencil yang terdapat di kecamatan Sungai Apit yaitu KAT Kategori 3 (berpencar dan berpindah dalam komunitas kecil, tertutup dan homogen, bermata pencaharian tergantung pada lingkungan dan sumber daya alam). Data sebaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2
Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di Kabupaten Siak Tahun 2023

No.	Nama Suku		Jumlah KK	Anggota Keluarga	Jumlah jiwa
1	Suku Asli Anak Rawa Mata Rimba Kampung Penyengat, Dusun III Sungai Mungkal	RT 01 RW 05	15	37	52
		RT 02 RW 05	23	49	72
		RT 03 RW 05	20	57	77
		RT 04 RW 05	10	24	34
TOTAL			68	167	235

Sumber : Dinas Sosial Kab Siak Tahun 2023

d. Topografi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan, sebagian besar Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian lereng 0-50 m dari permukaan laut meliputi aliran sungai dan rawa serta memiliki sifat batuan pada satuan perbukitan yang stabil sehingga potensi untuk terjadinya gerakan tanah dan erosi yang menyebabkan longsor sangat kecil. Kemiringan lereng sekitar 0°-3° atau bisa dikatakan hampir datar, sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 m dengan kemiringan 3°-15°. Sebagian besar wilayahnya relatif datar (14-30m dpl), potensi untuk terjadinya banjir cukup besar di beberapa tempat terutama didaerah sepanjang aliran Sungai Siak.

e. Geologi

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk didominasi oleh batuan lempung (*clay*), silika, batu pasir dan batu lapis, formasi ini terdapat di daerah Kecamatan Minas. Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau setara dengan tanah pedzolik merah kuning pada perbukitan dan tropaquepst atau

setara dengan tanah alluvial yang sudah mulai berkembang pada bagian daratan rendah, terutama di pinggiran sungai. Tekstur tanah adalah galuh lempung pasir (sandy clay loam) dan galuh lempung yang makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya. Struktur tanah adalah gembur sampai gumpal menyudut untuk horison A dan gumpal menyudut untuk horison B yang umumnya memiliki sifat permeabilitas yang rendah. Wilayah alluvium merupakan daerah rawa-rawa yang terjadi karena gambut yang mengalami proses sedimentasi dari sungai-sungai di dekatnya. Dapat dilihat dalam gambar Peta Geologi Kabupaten Siak berikut:

f. Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah yang berawa-rawa, sungai, danau, dan tasik. Diketahui sungai terbesar di Kabupaten Siak adalah Sungai Siak yang termasuk dalam daftar 10 Kawasan Strategis Sungai Indonesia. Berikut tabel data nama sungai, danau dan tasik serta kedalamannya di Kabupaten Siak.

Tabel 2. 3
Daftar Nama Sungai di Wilayah Kabupaten Siak

No	Nama Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (km)	Dalam (m)	Lebar	
					Atas	Bawah
1	Kecamatan Bunga Raya	Sungai Belading	20	7.6 – 8,8	49	60
		Sungai Cimpur	5	1.6		8
2	Kecamatan Koto Gasib	Sungai Buantan 1	6	3,8 – 4.2	47	55
		Sungai Buantan 2	12	3,8 – 4.2	11	12
		Sungai Gasib	20	5,5 – 8,8	12	14
3	Kecamatan Sungai Mandau	Sungai Mandau	60	13 – 20,6	100	125
		Sungai Lubuk Jering	9	2 - 2,5	10	
4	Kecamatan Mempura	Sungai Pinang	15	2,7 – 3,8	3	3,8
		Sungai Tonggak	3	2,8 – 3,7	7	9
		Sungai Mempura	17	4,9 – 5,0	6	8
5	Kecamatan Kandis	Sungai Bunut	2	2.2 – 2,9	7	12
6	Kecamatan Siak	Sungai Lanjung	17	3,2 – 4,2	12	12
		Sungai Sengketo	10	2.5 – 3	6	12
		Sungai Siak	345	29		300

Sumber: Hasil inventarisir Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Sungai Siak merupakan sungai utama dengan debit bulanan rata-rata 575 m³/detik pada bulan basah dan 123 m³/detik pada bulan kering. Aliran sungai ini sangat dipengaruhi oleh gerak pasang naik dan pasang surut air laut. Selain Sungai Siak, ada Sungai Mandau yang merupakan sungai yang cukup penting yang dibagian hulunya merupakan rawa dengan fisiografi kubah gambut, dengan evapotranspirasi dari air hujan yang meresap melalui air tanah dari kawasan

hutan disekitarnya, sehingga memegang peranan penting bagi penyediaan air tanah.

g. Klimatologi

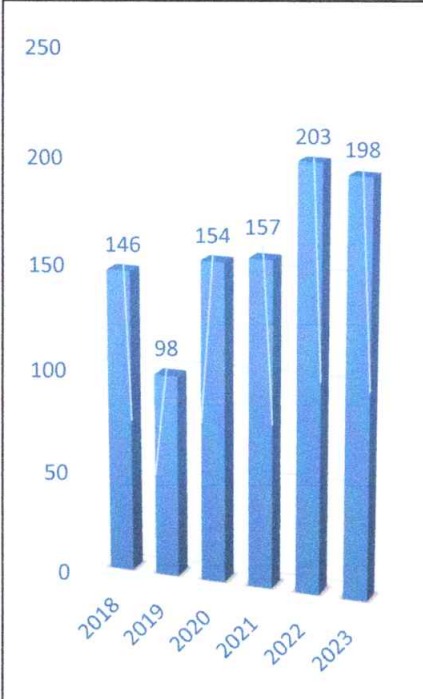
Sebagai daerah tropis, Kabupaten Siak memiliki curah hujan selama setahun mencapai 4.416 mm, atau rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Mei 710 mm dan terendah pada bulan Oktober sebesar 355 mm. Sementara jumlah air hujan terbanyak pada bulan Desember sejumlah 14 hari.

Secara umum, Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 23°C sampai dengan 32°C, dengan kelembaban udara 88,9 RH per bulan. Berikut gambar peta curah hujan Kabupaten Siak :

Menurut klasifikasi Iklim Koppen, curah hujan di Kabupaten Siak hampir merata di sepanjang tahun. Curah hujan Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel yang tersaji berikut ini:

Tabel 2. 4
Rata-rata Curah Hujan Per Bulan (mm) Kabupaten Siak Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	RATA-TATA CURAH HUJAN PER BULAN (mm)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Siak	-	-	73	185	193	175
2	Mempura	199	71	92	119	196	107
3	Sungai Apit	142	124	172	99	198	189
4	Sabak Auh	164	125	168	161	209	217
5	Minas	309	122	214	286	200	250
6	Kandis	-	-	10	39	59	196
7	Bungaraya	181	97	171	183	201	208
8	Dayun	148	129	185	157	203	178
9	Tualang	134	98	181	162	220	235
10	Koto Gasib	210	139	161	232	280	211
11	Kerinci Kanan	253	164	190	187	273	193
12	Lubuk Dalam	182	151	212	198	269	229
13	Sungai Mandau	121	152	189	40	172	175
14	Pusako	-	-	138	155	164	204
JUMLAH		2.043	1.372	2.156	2.203	2.837	2.766
RATA-RATA/ BULAN		146	98	154	157	203	198



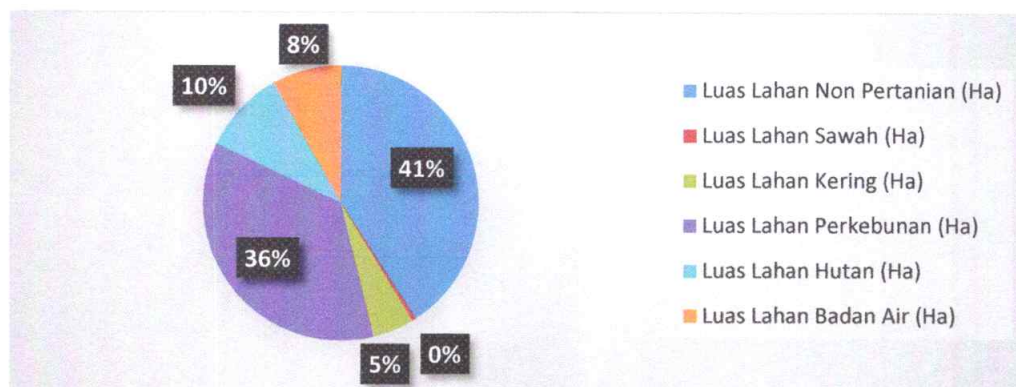
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Siak, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah curah hujan hampir merata di sepanjang bulan.

h. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Siak setiap tahunnya mengalami perubahan seiring dengan lajunya tingkat pertumbuhan penduduk. Di Kabupaten Siak terdapat beberapa jenis penggunaan lahan, untuk melihat secara rinci jenis dan luas penggunaan lahan di Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 2
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Siak



Sumber: Data DIKPLHD Tahun 2023

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Siak adalah lahan non pertanian dengan luas 407.224 Ha atau 41% dari total luas wilayah kabupaten. Selain penggunaan lahan non pertanian, luas penggunaan lahan terbesar kedua adalah lahan perkebunan dengan persentase 36% atau 358.247 Ha. Luas penggunaan lahan perkecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 5
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)					
		Non Pertanian	Sawah	Kering	Perkebunan	Hutan	Badan Air
1	Siak	68.698	-	1.825	15.498	7.354	11.727
2	Bunga Raya	2.736	2.366	391	9.550	-	164

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)					
		Non Pertanian	Sawah	Kering	Perkebunan	Hutan	Badan Air
3	Sungai Apit	79.389	564	6.408	33.911	23.875	17.136
4	Dayun	3.108	-	480	19.402	296	309
5	Koto Gasib	9.864	53	1.037	58.883	1.723	1.039
6	Kandis	42.284	-	25.357	80.459	1.538	6.372
7	Minas	4.776	-	132	29.702	-	620
8	Kerinci Kanan	2.452	-	45	10.272	178	363
9	Tualang	5.144	36	59	29.049	-	493
10	Sungai Mandau	130.683	455	4.429	32.405	49.426	32.820
11	Lubuk Dalam	3.682	-	662	10.479	600	443
12	Mempura	21.079	60	2.345	17.716	2.389	2.760
13	Sabak Auh	1.768	1.247	336	3.923	-	153
14	Pusako	31.561	35	5.226	6.998	10.598	6.563

Sumber: Data Dinas Pertanian Kabupaten Siak, 2023

i. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

1) Konsumsi Listrik

Berdasarkan Data PLN Cabang Siak pada tahun 2023 sudah mencapai 100% dan semuanya telah teraliri Listrik PLN, Peningkatan rasio elektrifikasi akan berdampak kepada konsumsi listrik dan konsumsi listrik perkapita

Tabel 2. 6
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh) Kabupaten Siak Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
1	Siak	551.87	575.78	625.51	6
2	Riau	941.71	1.162,87	1.202,21	13

Sumber : PLN, 2024

Konsumsi listrik merupakan konsumsi energi yang berupa energi listrik. Konsumsi listrik Kabupaten Siak perkapita merupakan jumlah energi listrik yang digunakan dibagi dengan jumlah penduduk dalam periode satu tahun. Konsumsi listrik perkapita Kabupaten Siak dari tahun 2021 mengalami peningkatan sampai tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen pertahun.

2) Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan IKP 2023 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. 9 indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP): 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. 2. Persentase penduduk yang

hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) 9. Angka harapan hidup pada saat lahir Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada delapan indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berikut adalah cut off point IKP

Tabel 2. 7
Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75 – 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96 – 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber: *Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023*

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Siak secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 8
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Siak	76,6	77,12	76,84	76,87	74,74
2	Riau	63,37	64,12	66,84	67,59	68,68

Sumber: *Buku Indeks Ketahanan Pangan, 2023*

3) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energy di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan.

Tabel 2. 9
***Prevalence of Undernourishment* (PoU) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	7,40	7,02	8,75	13,07	10,33	12 %

Sumber: *BAPANAS, 2024*

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Indeks Risiko Bencana

Secara umum Kabupaten Siak tidak lepas dari berbagai potensi bencana yang ada baik bencana yang berkaitan dengan aktivitas manusia (antropogenik) seperti banjir dan kebakaran tetapi juga dengan berbagai bencana alam lainnya seperti angin puting beliung. Oleh karena itu dalam merencanakan pembangunan 20 tahun ke depan diperlukan adanya pembangunan yang berwasan kebencanaan sehingga infrastruktur dan masyarakat menjadi resilien terhadap potensi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan kajian terhadap risiko bencana yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Nilai risiko bencana di Kabupaten Siak cenderung turun, yang artinya ini menunjukkan ada upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak untuk memastikan Kabupaten Siak aman siap terhadap bencana yang ada. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Siak memiliki indeks risiko 151.41 (sedang). Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Siak secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2. 10
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Siak Tahun 2020-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Siak	156,40	156,40	156,40	156,40	151,41	Sedang

Sumber: IRBI, BNPB 2024

Tabel 2. 11
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Siak Tahun 2022

Uraian	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7	Nilai IKD
Indek Ketahanan Daerah (IKD)	0,70	0,23	0,63	0,56	0,37	0,48	0,55	0,48

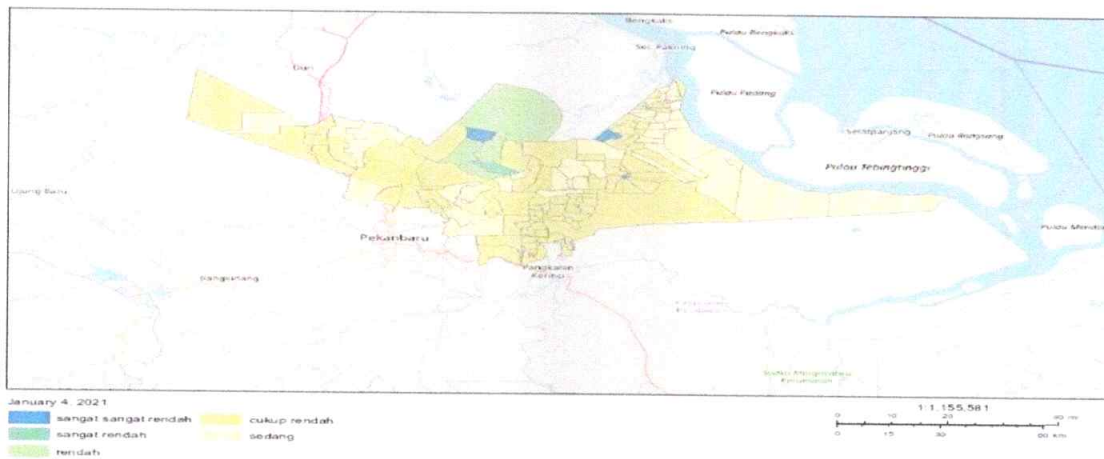
Sumber: BNPB Tahun 2023

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Siak dikelompokkan menjadi 4 (empat) kawasan yaitu Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Kekeringan, dan Kawasan Abrasi Pantai, serta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara umum Kabupaten Siak tidak memiliki kendala fisik untuk pengembangan wilayah yang cukup berbahaya terutama untuk budidaya perkotaan. Dari hasil interpretasi rona fisik, wilayah Kabupaten Siak cenderung memiliki topografi yang landai dengan kemiringan lereng sekitar 0-3% dan ketinggian 0-50 mdpl serta memiliki sifat batuan pada satuan perbukitan yang stabil sehingga potensi untuk terjadinya gerakan tanah dan erosi yang menyebabkan longsor sangat kecil. Namun karena sebagian besar wilayahnya relatif datar (14-30 mdpl), potensi untuk terjadinya banjir cukup besar di beberapa tempat terutama di daerah sepanjang Sungai Siak. Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi dimana terjadi surplus air sekitar 15% menjadi aliran permukaan dari curah hujan rata-rata bulanan, maka kemungkinan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Lubuk Dalam.

Gambar 2. 3
Peta Sebaran Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Siak Tahun 2021



Sumber: Data DIKPLHD Tahun 2021

Tabel 2. 12
Potensi Luas Bahaya Banjir per Kecamatan Kabupaten Siak

Kecamatan	Bahaya				Indeks	Kelas
	Luas Bahaya (Ha)					
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
Bunga Raya	4,41	1.100,53	-	1.104,94	0,666	Sedang
Dayun	1,25	-	-	1,25	0,666	Rendah
Kandis	42,10	2.389,39	6.109,30	8.900,81	1,000	Tinggi
Kerinci Kanan	145,44	-	-	145,44	0,666	Rendah
Koto Gasib	0,27	5.740,74	-	5.741,01	0,666	Sedang
Lubuk Dalam	18,63	220,59	-	239,22	0,666	Sedang
Mempura	0,09	3.098,88	-	3.098,97	0,666	Sedang
Minas	17,51	121,13	-	138,64	0,666	Sedang
Pusako	4,45	5,82	-	10,27	0,666	Sedang
Sabak Auh	2,23	3,87	-	6,1	0,666	Rendah
Siak	0,27	-	-	0,27	0,666	Rendah
Sungai Apit	6.112,17	10.040,58	11.817,36	27.970,11	1,000	Tinggi

Kecamatan	Bahaya				Indeks	Kelas
	Luas Bahaya (Ha)					
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
Sungai Mandau	14.094,00	15.243,66	19.340,82	48.678,48	1,000	Tinggi
Tualang	97,02	2.325,69	9.954,54	12.377,25	1,000	Tinggi
	21.956	60.066	115.792	197.814	>0,666	TINGGI

Sumber : BPBD Kabupaten Siak 2023

Tabel 2. 13
Data banjir Kabupaten Siak tahun 2021-2023

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa	18	21	3
2	Jumlah KK	390	1.617	56
3	Jumlah Jiwa	1.560	6.373	225
4	Rata-rata Debit Air	100 cm	60 cm	50 cm
5	Frekuensi Waktu (Hari)	7 hari	10 Hari	5 Hari

Sumber : BPBD Kabupaten Siak 2023

2. Kawasan Rawan Kekeringan

Kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kekeringan terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Untuk melihat secara rinci luas area yang mengalami bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 14
Luas Bencana Kekeringan Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Kecamatan	Total Area (Ha)	Persentase (%)
1	Bunga Raya	19.559,00	2,08
2	Dayun	13.975,64	1,48
3	Kandis	99.390,00	10,56
4	Kerinci Kanan	30.629,65	3,25
5	Koto Gasib	69.540,00	7,39
6	Lubuk Dalam	22.993,00	2,44
7	Mempura	108.425,00	11,51
8	Minas	77.000,00	8,18
9	Pusako	22.432,02	2,38

No	Kecamatan	Total Area (Ha)	Persentase (%)
10	Sabak Auh	10.510,00	1,12
11	Siak	39.383,16	4,18
12	Sungai Apit	219.975,00	23,36
13	Sungai Mandau	170.492,00	18,11
14	Tualang	37.299,00	3,96

Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Siak, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat wilayah atau area yang mengalami kekeringan dengan luas 787.339,70 Ha yang terbagi kedalam 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak. Kecamatan dengan luas wilayah kekeringan terbesar terdapat di Kecamatan Koto Gasib dengan luas 1,01% dari total luas area yang mengalami bencana kekeringan, sedangkan luas wilayah terkecil yang mengalami bencana kekeringan terletak di Kecamatan Lubuk Dalam dengan luas 0,72% dari luas total wilayah yang mengalami bencana kekeringan. Bencana kekeringan terjadi akibat rendahnya curah hujan, pasokan air permukaan dan air tanah berkurang.

3. Kawasan Abrasi Pantai

Luas wilayah berpotensi bahaya abrasi pantai di Kabupaten Siak terdiri dari 9 kecamatan di sepanjang aliran Sungai Siak. Abrasi atau proses pengikisan tanah di sepanjang pinggiran sungai disebabkan oleh karakteristik struktur geologi dan jenis tanah terdiri dari jenis endapan permukaan pantai dan sungai dengan komposisi struktur tanahnya sebagian besar adalah kerikil pasir dan lempung. Dengan material ini, maka memudahkan terjadinya proses abrasi pantai. Berikut tabel abrasi perkecamatan:

Tabel 2. 15
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi per Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Bahaya					
		Luas Bahaya (Ha)				Indeks	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1	Bungaraya	4,41	2.700,53	10.578,30	13.283,24	1.000	TINGGI
2	Koto Gasib	0,27	5.740,74	13.097,61	18.838,62	1.000	TINGGI
3	Mempura	0,09	3.098,88	11.876,94	14.975,91	1.000	TINGGI
4	Pusako	414,45	755,82	3.993,93	5.164,20	1.000	TINGGI
5	Sabak Auh	-	183,87	5.994,85	6.178,72	1.000	TINGGI
6	Siak	0,27	5.850,60	9.326,97	15.177,84	1.000	TINGGI
7	Sungai Apit	6.112,17	10.040,58	11.817,36	27.970,11	1.000	TINGGI
8	Sungai Mandau	14.094,00	15.243,66	19.340,82	48.678,48	1.000	TINGGI
9	Tualang	97,02	2.325,69	9.954,54	12.377,25	1.000	TINGGI

Sumber : *BPBD Kabupaten Siak 2023*

4. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebagian besar lahan di Kabupaten Siak merupakan lahan gambut (lebih dari 50%), berada di 73 desa. Karakteristik lahan gambut tersebut adalah tergenang saat musim hujan dan kering saat musim kemarau. Hal ini menyebabkan lahan tersebut rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2018 sebaran *hotspot* terdapat 76 titik Kabupaten Siak meningkat pada tahun 2019 menjadi 202 titik pada tahun 2019. Kemudian titik sebaran api berkurang di 2020 hingga 2022. Berikut data sebaran titik api di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 16
Sebaran Hotspot Kabupaten Siak Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sebaran Hotspot Kab. Siak	76	202	82	54	30

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, 2023

Kawasan yang merupakan rawan terjadinya kebakaran pada tahun 2023 berada di Kecamatan Tualang, Sungai Apit, Mempura, Kandis. Adapun potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 17
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Siak

Kecamatan	Bahaya					
	Luas Bahaya (Ha)				Indeks	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total		
1 Bunga Raya	-	1.590,75	-	1.590,75	0,666	SEDANG
2 Dayun	-	18.799,61	10.595,67	29.395,28	0,666	SEDANG
3 Kandis	-	40.100,87	12.678,89	52.779,76	1,000	TINGGI
4 Kerinci Kanan	-	-	-	-	-	-
5 Koto Gasib	-	10.798,63	70.128,03	80.926,66	1,000	TINGGI
6 Lubuk Dalam	45,55	3.833,86	-	3.879,41	0,666	SEDANG
7 Mempura	-	10.118,41	20.798,23	30.916,64	0,666	SEDANG
8 Minas	-	9.434,03	-	9.434,03	0,666	SEDANG
9 Pusako	-	5.967,20	-	5.967,20	0,666	SEDANG
10 Sabak Auh	-	8.833,86	-	8.833,86	0,666	SEDANG
11 Siak	20,10	10.260,21	30.245,77	40.526,08	1,000	TINGGI
12 Sungai Apit	718,07	105.389,02	180.647,07	286.754,16	1,000	TINGGI
13 Sungai Mandau	-	10.632,06	-	10.632,06	0,666	SEDANG
14 Tualang	298,44	17.993,96	791,11	19.083,51	0,666	SEDANG
KABUPATEN SIAK	-	1.082,16	253.752,47	325.884,77	580.719,4	1,000

Sumber : BPBD Kabupaten Siak, 2023

2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan KLHS

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem

merupakan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan akan generasi akan datang. Pentingnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Siak sebagai dasar pengkajian pembangunan berkelanjutan, selain itu menjadi pertimbangan dalam menentukan isu strategis dan menyusun skenario pembangunan berkelanjutan, serta juga menjadi komponen penjaminan kualitas KLHS RPJPD. Berdasarkan pertimbangan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) jasa ekosistem di Kabupaten Siak, akan didapat isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terkait dengan DDDTLH Kabupaten Siak. Kondisi DDDTLH berbasis jasa ekosistem di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18
Persentase Luasan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem di Kabupaten Siak

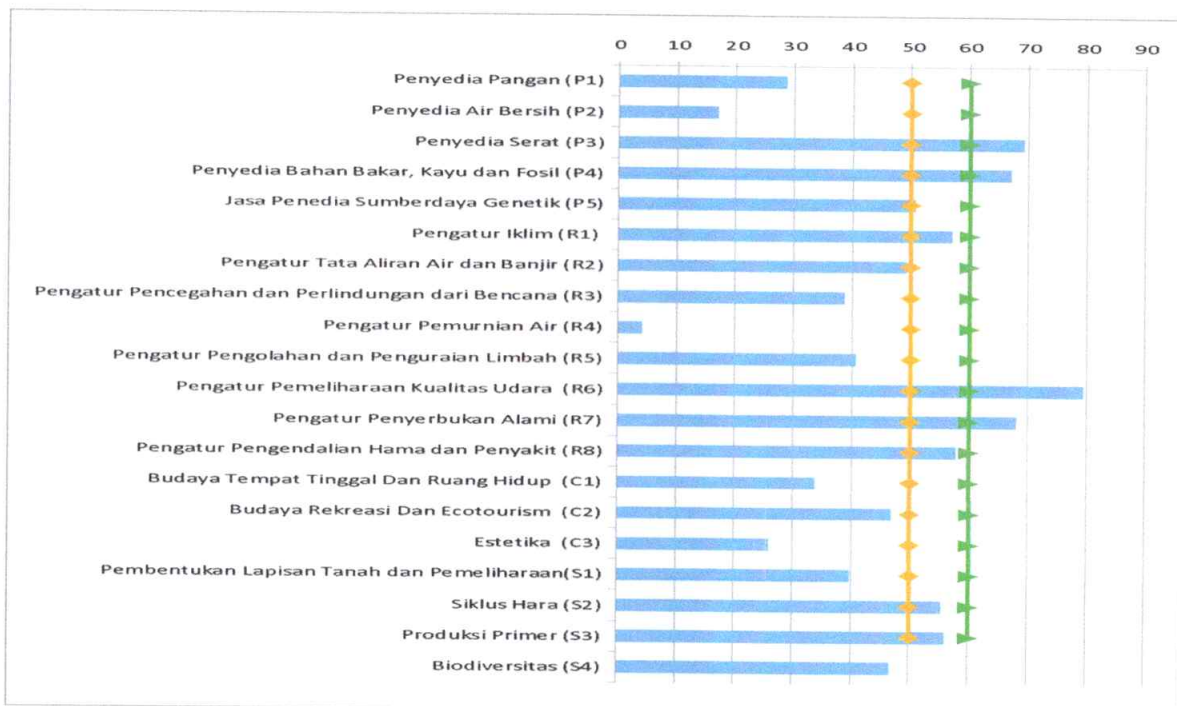
No	Jasa Ekosistem	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Nilai Optimal (%)	Kondisi
1	Penyedia Pangan (P1)	43,42	14,62	26,4	14,34	1,22	28,76	sudah terlampaui
2	Penyedia Air Bersih	68,60	8,00	12,74	8,50	2,16	17,03	sudah terlampaui
3	Penyedia Serat (P3)	3,38	11,53	31,55	41,06	12,47	69,31	belum terlampaui
4	Penyedia Bahan Bakar, Kayu dan Fosil (P4)	1,80	20,48	21,25	41,45	15,01	67,09	belum terlampaui
5	Jasa Penyedia Sumberdaya Genetik (P5)	10,58	38,53	28,29	18,83	3,77	50,89	Kritis
6	Pengatur Iklim (R1)	2,03	27,11	27,29	14,39	29,17	57,20	Kritis
7	Pengatur Tata Aliran Air dan	21,27	18,24	22,33	34,05	4,11	49,33	sudah terlampaui
8	Pengatur Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (R3)	21,16	22,45	35,29	14,32	6,78	38,74	sudah terlampaui
9	Pengatur Pemurnian Air (R4)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	4,21	sudah terlampaui
10	Pengatur Pengolahan dan Penguraian Limbah (R5)	42,52	16,83	28,83	9,68	2,14	40,65	sudah terlampaui
11	Pengatur Pemeliharaan Kualitas Udara (R6)	0,95	0,58	37,59	31,48	29,40	79,68	belum terlampaui
12	Pengatur Penyerbukan Alami (R7)	0,91	10,92	40,18	41,88	6,11	68,08	belum terlampaui

No	Jasa Ekosistem	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Nilai Optimal (%)	Kondisi
13	Pengatur Pengendalian Hama dan Penyakit (R8)	0,59	32,04	19,13	38,34	9,91	57,81	Kritis
14	Budaya Tempat Tinggal Dan Ruang Hidup (C1)	50,09	0,72	30,69	17,84	0,66	33,84	sudah terlampaui
15	Budaya Rekreasi Dan Ecotourism	3,68	22,10	54,81	16,75	2,66	46,82	sudah terlampaui
16	Estetika (C3)	21,77	30,89	42,97	3,89	0,49	25,86	sudah
17	Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan (S1)	11,37	32,01	33,87	20,08	2,66	39,68	sudah terlampaui
18	Siklus Hara (S2)	4,26	28,21	24,03	30,84	12,67	55,52	Kritis
19	Produksi Primer (S3)	0,51	35,49	15,93	44,48	3,60	56,04	Kritis
20	Biodiversitas (S4)	19,00	23,99	20,56	31,17	5,29	46,74	sudah terlampaui

Sumber: Data diolah Tim KLHS RPJPD Kabupaten Siak2023

Keterangan : SR = Sangat Rendah; R = Rendah; S = Sedang; T = Tinggi dan ST = Sangat Tinggi

Gambar 2. 4
Nilai Ambang Batas DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Siak



Sumber: Data diolah Tim KLHS RPJPD Kabupaten Siak2023

2.1.1.4.1 Luas RTH Publik sebesar 20 dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan

Sesuai Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH

publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berikut data RTH Kabupaten Siak:

Tabel 2. 19
Luas RTH Publik Sebesar 20 dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan Kabupaten Siak

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan RTH publik sebesar 20 dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (Km ²)	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46

Sumber : Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luasan RTH di wilayah kota/kawasan perkotaan tidak mengalami penambahan.

2.1.1.4.2 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Sebagai salah satu fungsi penataan ruang dalam memafaatkan kawasan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka diperlukan beberapa kawasan yang masih hijau ataupun tertutup pepohonan. Berikut rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 20
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Cita Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan cita satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	55.16	52.38	n/a	n/a	49.6

Sumber: Dinas PUTARUKIM Kab. Siak tahun 2023

Kawasan tertutup pepohonan di Kabupaten Siak yang tertangkap oleh citra satelit dan survei foto udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Artinya kawasan tertutup pohon di Kabupaten Siak semakin luas. Namun rasio ini menurun pada tahun 2020 dengan angka 52.38, dengan arti telah ada pembukaan lahan yang mengakibatkan daerah tertutup pepohonan menjadi berkurang.

2.1.1.5 Persentase Alih Fungsi Lahan

2.1.1.5.1 Rasio Bangunan per-IMB per Satuan Bangunan

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini. diantaranya adalah rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan. formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber

IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Adapun jenis bangunan yang memiliki IMB diantaranya terdiri dari bangunan kantor pemerintahan, rumah dan ruko. Berikut data rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 21
Rasio Bangunan ber IMB Kabupaten Siak

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Bangunan ber IMB	28.88	29.05	29.24	29,35	29,46

Sumber: Dinas PUTARUKIM Kab. Siak tahun 2023

2.1.1.6 Indeks Ketahanan Air

Mutu air adalah kondisi air yang diukur dan di uji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan status air adalah kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada satu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Sumber air adalah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah. termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.

Pada tahun 2021 Kabupaten Siak melakukan pemantauan kualitas air menggunakan metode *STORET* atau penentuan mutu air dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air. Hasil pemantau kualitas air, dipilih 3 (tiga) lokasi titik pantau yaitu: (1) Desa Rawang Air Putih. (2) Desa Rantau Panjang. (3) Desa Langkai. Analisis status mutu air menurut system nilai *STORET* di atas berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh data mutu air dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 22
Nilai Indeks Mutu Air Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Persentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
1	Memenuhi	0	0%	70	0,00
2	Cemar Ringan	39	69,64%	50	34,82
3	Cemar Sedang	17	30,36%	30	9,11
4	cemar Berat	0	0%	10	0,00
	Total	56	100%		43,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa air Sungai Siak yang melintasi Kabupaten Siak melalui 3 (tiga) titik pantau diatas bahwa sudah tercemar namun masi dalam kategori sedang. Desa Rawang Air Putih dengan nilai storet (-12). Desa Rantau Panjang (-12). dan Desa Langkai (-18). hal ini disebabkan Sungai Siak masih digunakan sebagai lalulintas angkutan orang dan barang. pengangkutan bahan material bahan baku olahan pabrik *pulp and paper* yang paling besar adalah PT. IKPP dan PT. RAPP.

2.1.1.7 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan diperlukan lingkungan yang memiliki ketahanan bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup, Lingkungan hidup yang baik memiliki jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem yang merupakan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga, Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, Hal ini karena pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama, yaitu, ekonomi, social, dan lingkungan, Ketiga tiang utama ini saling bergantung dan memperkuat, Sementara itu menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan kabupaten, antara lain:

Tabel 2. 23
Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun ()
			2019	2020	2021	2022	2023	
1,	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada/ Tidak	-	-	Ada	-	Ada	0
2,	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin	Usaha/ Kegiatan	32	36	19	31	27	0

No	Indikator	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun ()
			2019	2020	2021	2022	2023	
	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota							
3,	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota,	Kasus	6	9	10	3	4	0
4,	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	44,18	44,17	57,89	61,63	40,13	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kondisi lingkungan di suatu daerah. IKLH mencakup beberapa komponen utama yang mencerminkan aspek-aspek penting dari kualitas lingkungan, yakni kualitas udara (Indeks Kualitas Udara), kualitas air (Indeks Kualitas Air), kualitas tutupan lahan (IKLH). Perubahan IKLH Kabupaten Siak dari tahun 2017 sampai dengan 2023, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Siak Tahun 2017-2023

No	Tahun	Indikator			IKLH
		Air (IKA)	Udara (IKU)	Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	
1	2017	50	87,23	49,60	61.01
2	2018	48,33	86,34	49,60	60.24
3	2019	50.00	86.78	55.16	63.10
4	2020	50,00	89,55	52,38	66,54
5	2021	43,93	90,98	58,44	66,16
6	2022	46,07	91,30	61,69	67,81
7	2023	49,09	94,1	61,64	70,07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, 2023

b. Pengelolaan Persampahan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Perlu Menetapkan

Peraturan Pemerintah No, 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berikut data pengelolaan persampahan Kabupaten Siak sepanjang tahun 2019-2023,

Tabel 2. 25
Pengelolaan Persampahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Timbulan sampah yang ditangani	Ton	44,18	44,17	57,89	61.63	40.13
Persentase jumlah sampah yang berkurang	Persen	20,19	20,8	19,23	10.79	12.51
Persentase cakupan area pelayanan	Persen	78,57	78,57	78,57	78,57	78,57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2023

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2023 berdasarkan registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri berjumlah 480.169 jiwa, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 54.861 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Siak pada Tahun 2023 terhitung sebesar 60,83 jiwa/km².

Tabel 2. 26
Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk	430.092	457.940	459.311	477.550
2	Kepadatan Penduduk	50,26	52,31	58,19	55,81
3	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71	6,47	0,30	2,10

Sumber : BPS Kabupaten Siak, 2023

Dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, yakni tahun 2019-2023 jumlah penduduk Kabupaten Siak terus mengalami peningkatan jiwa per tahunnya. Selaras dengan itu, kepadatan penduduk mengalami peningkatan menjadi 1,71 dari tahun 2019 ke angka 0,89 di tahun 2023.

2.1.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi Penduduk Kabupaten Siak tahun 2023 menurut jenis kelamin terdiri atas laki-laki 246.489 jiwa dan perempuan 233.680 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk,

kecamatan Tualang merupakan kecamatan dengan jumlah tertinggi penduduk laki-laki sebanyak 62.634 jiwa dan perempuan 58.825 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki terendah terdapat pada Kecamatan Pusako dengan jumlah 4.339 jiwa laki-laki dan 4.140 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk lebih rinci sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2. 27
Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Siak Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Rasio Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2023
	Laki-laki	Perempuan		
Siak	7.175	16.748	104	33.923
Sungai Apit	16.735	15.702	104	32.437
Minas	15.428	13.958	107	29.386
Tualang	64.086	59.721	106	123.807
Sungai Mandau	4.980	4.623	107	9.603
Dayun	16.373	15.458	106	31.831
Kerinci kanan	12.182	11.483	106	23.665
Bunga raya	14.553	13.725	106	28.278
Koto gasib	12.557	12.165	102	24.722
Kandis	40.833	38.347	106	79.180
Lubuk Dalam	10.448	10.055	104	20.503
Sabak Auh	7.056	6.698	104	13.754
Mempura	8.976	8.600	105	17.576
Pusako	4.344	4.055	105	8.399
Kabupaten Siak	245.726	231.338	105	477.064

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, 2023

2.1.2.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Ditinjau dari kelompok usia, pada tahun 2023 dari jumlah penduduk yang berjumlah 480.169 jiwa terdapat 328.994 jiwa atau 68,52 jumlah penduduk dengan usia produktif yaitu kelompok usia antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berusia 15-19 tahun yaitu sejumlah 39.083 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat sehingga dapat membuka lapangan usaha seluas luasnya bagi penduduk usia produktif sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka.

Penduduk usia muda (belum produktif) yaitu kelompok usia antara 0-14 tahun berjumlah dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berusia 5-9 tahun dengan jumlah 47.753 jiwa. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda sebagai aset daerah sejak dini baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan maupun pendidikan sehingga diharapkan

nantinya generasi muda Kabupaten Siak mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan demikian generasi muda Kabupaten Siak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi persaingan globalisasi dalam dunia kerja, salah satunya dalam lingkungan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Munculnya MEA selain sebagai salah satu bentuk kemajuan ekonomi, juga berarti gerbang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara telah dibuka yang dimana salah satu poin terpentingnya yaitu telah dibebaskannya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Tabel 2. 28
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

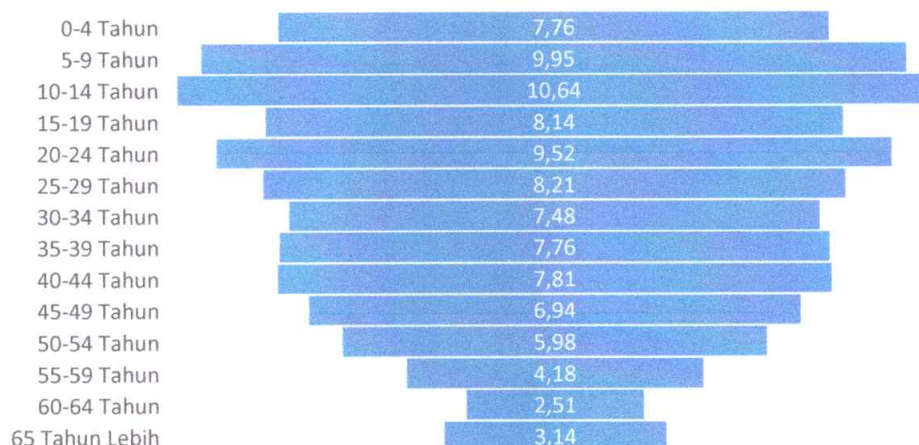
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	0-4 Tahun	34.450	34.989	34.846	28.276	37.285
2	5-9 Tahun	47.385	48.618	48.403	46.490	47.753
3	10-14 Tahun	47.631	49.102	49.893	50.628	51.081
4	15-19 Tahun	33.413	39.563	40.373	41.702	39.083
5	20-24 Tahun	37.520	39.850	41.608	44.702	45.695
6	25-29 Tahun	34.893	35.946	37.580	39.093	39.402
7	30-34 Tahun	35.237	35.544	35.526	35.575	35.921
8	35-39 Tahun	36.744	36.478	37.822	36.871	37.249
9	40-44 Tahun	34.491	35.402	35.523	37.310	37.510
10	45-49 Tahun	30.409	30.980	32.410	33.250	33.301
11	50-54 Tahun	23.389	24.671	25.830	28.877	28.714
12	55-59 Tahun	14.587	15.694	17.223	20.293	20.077
13	60-64 Tahun	9.068	9.965	10.336	12.204	12.042
14	65 Tahun Lebih	10.875	10.761	11.938	15.214	15.056

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, 2023

Sedangkan untuk penduduk usia tua (tidak produktif) yaitu kelompok usia lebih dari 65 tahun berjumlah 15.056 jiwa, untuk itu perlu disiapkan pelayanan khusus bagi penduduk usia tua baik pelayanan kesehatan, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta membangun sarana sosial lainnya seperti pembangunan panti jompo. Untuk rasio ketergantungan penduduk (*defency ratio*) yang menggambarkan seberapa besar seorang penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun).

Gambar 2. 5

Persentase Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Usia Pada Tahun 2023



Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, 2023 dan analisa Bappeda 2023

2.1.2.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih tergolong rendah. Dari jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 480.169 jiwa, yang telah menamatkan pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 91.600, jiwa, sedangkan yang telah menamatkan Perguruan Tinggi (PT) dengan ijazah Diploma I-IV/ Strata I-III hanya berjumlah 16.987 jiwa. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang menamatkan hanya sampai tingkat SLTA/Sederajat lebih banyak dari penduduk yang meneruskan pendidikan mereka hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan yang menyelesaikan tingkat pendidikan SD/ Sederajat sebanyak 81.356 jiwa dan SLTP/Sederajat sebanyak 60.249 jiwa. Berikut tabel gambaran jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2023:

Tabel 2. 29
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Tidak/Belum Sekolah	88.367	83.602
2.	Belum Tamat Sd/ Sederajat	25.140	22.445
3.	Tamat Sd/ Sederajat	40.254	41.102
4.	SLTP/Sederajat	31.154	29.275
5.	SLTA/Sederajat	50.464	41.136
6.	Diploma I/II	732	1.741
7.	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	1.507	3.159
8.	Diploma IV/ Strata I	7.022	9.456
9.	Strata II	281	196
10.	Strata III	16	16
Jumlah		477.064	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, inflasi, jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak selama tahun 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan dari 1,47 pada tahun 2019 menjadi 4,35 pada tahun 2023. Pertumbuhan tren positif tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh Konstruksi sebesar 9,59 dan terendah pada usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,98. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak selama 2023 meningkat terutama dipengaruhi oleh bangkitnya perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Peningkatan produksi kehutanan berpengaruh pada meningkatnya nilai tambah kategori Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Peningkatan produksi bahan baku secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada peningkatan aktivitas di kategori lapangan usaha perdagangan, transportasi, dan sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,59 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Pengadaan listrik dan Gas sebesar 8,86 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,95 persen, serta dari lapangan usaha lainnya yang meningkat pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan semakin membaiknya perekonomian masyarakat yang membuat sektor jasa meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat karena meningkatnya produksi dari sektor primer masyarakat. Untuk melihat laju pertumbuhan PDRB berdasarkan ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 30
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,18	3,83	5,02	3,08	3,74
Pertambangan dan Penggalian	-8,71	-8,62	-5,83	1,35	1,98
Industri Pengolahan	5,27	3	3,83	4,26	4,86

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Listrik dan Gas	2,46	6,32	6,46	11,27	8,86
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,35	1,34	3,63	3,63	5,33
Konstruksi	6,27	-3,19	3,04	5,70	9,59
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,80	-10,37	9,87	12,93	6,95
Transportasi dan Pergudangan	3,60	-0,32	2,56	13,99	6,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,63	-12,94	11,09	13,22	5,57
Informasi dan Komunikasi	7,32	9,12	6,19	5,88	6,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,19	3,66	3,1	3,69	3,8
Real Estate	3,12	1,71	2,58	4,79	4,06
Jasa Perusahaan	4,21	-22,78	2,03	13,82	6,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,62	-4,18	2,14	6,45	5,93
Jasa Pendidikan	6,44	2,33	5,52	4,09	3,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,52	12,25	8,2	1,97	6,67
Jasa Lainnya	9,02	-24,22	4,47	17,12	6,48
PDRB	1,47	-0,10	2,31	3,78	4,35

Sumber : BPS, Kabupaten Siak Dalam Angka 2023

Gambar 2. 6

Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Riau dan Kabupaten Siak Tahun 2010-2023 (%)



Sumber : BPS, Kabupaten Siak Dalam Angka 2023

Sedangkan di tingkat provinsi, Kabupaten Siak memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau.

2.2.1.2 Indeks Gini

Pola konsumsi penduduk Kabupaten Siak menunjukkan bahwa pada tahun 2020 konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan yaitu 50,93 persen berbanding 49,07 persen, Indeks Gini Kabupaten Siak Tahun 2021 sebesar 0,295 dan termasuk kategori ketimpangan rendah. Dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,279

Indeks Gini Kabupaten Siak mengalami kenaikan, Berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan pendapatan di Kabupaten Siak termasuk rendah, dimana kelompok penduduk 40% pendapatan rendah dan 40% pendapatan menengah memperoleh 22,36 persen dan 35,51 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Siak. Sementara itu kelompok penduduk 20% pendapatan tertinggi mengalami kenaikan. Kriteria Bank Dunia sejalan dengan Nilai Indeks Gini yang menyatakan terjadi kenaikan kesenjangan pendapatan.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995):

$GR < 0.4$: dikategorikan sebagai ketimpangan rendah

$0.4 < GR < 0.5$: dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)

$GR > 0.5$: dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi



Sumber : BPS, Tahun 2023

Indeks Gini ratio Kabupaten Siak yang belum mengalami perbaikan secara signifikan. Walaupun nilai tersebut masuk dalam kategori relatif ketimpangan rendah.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Siak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2019 berjumlah 24,49 ribu sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 26,99 ribu. Berbanding lurus dengan persentase kemiskinan di Kabupaten Siak juga menunjukkan penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2023 dari angka 5,03 pada tahun 2019 menjadi 5,23 pada tahun 2023. Namun untuk garis kemiskinan menunjukkan peningkatan. Beberapa faktornya adalah upah minimum yang kurang memadai, taraf kehidupan masyarakat yang masih belum membaik serta adanya peningkatan angka pengangguran.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan juga untuk target sasaran

bantuan dan program. Perkembangan P1 di Kabupaten Siak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Tabel 2. 31
Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Indikator Kemiskinan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	24,49	25,38	25,77	25,71	26,99
2	Persentase Kemiskinan	5,03	5,09	5,18	5,07	5,23
3	GK (Garis Kemiskinan)	443.868	473.128	489.467	518.768	558.867

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi P2 maka semakin ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Perkembangan P2 di Kabupaten Siak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

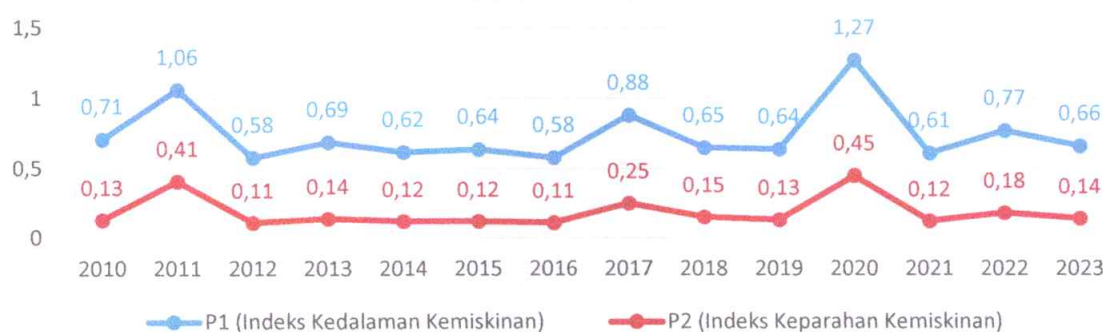
Tabel 2. 32
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Indikator Kemiskinan	2019	2020	2021	2022	2022	2023
1	P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan)	0,64	1,27	0,61	770,77	0,77	0,66
2	P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan)	0,13	0,45	0,12	80,18	0,18	0,14

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak 2023

Posisi relatif P2 di Kabupaten Siak berada di atas P2 Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2023, P2 Siak sebesar 0,14. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Siak memiliki ketimpangan yang lebih jauh daripada Provinsi dan Nasional. Berikut grafik perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Siak:

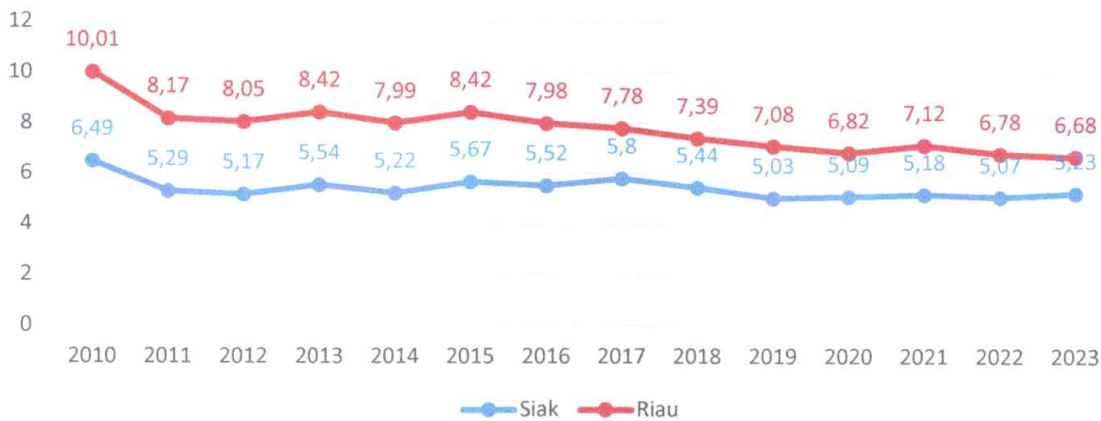
Gambar 2. 8
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Siak Tahun 2010– 2023



Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak 2023

Dari grafik di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Siak di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan, sehingga memerlukan perbaikan keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak. Adapun tingkat kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten 10 tahun terakhir dapat dilihat dan disajikan pada tabel berikut:

Gambar 2. 9
Tingkat Kemiskinan Tahun 2010-2023 (%)



Sumber : Riau dalam Angka, BPS Tahun 2023

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah pembangunan. Pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat. Tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah akan tetapi perlu melibatkan seluruh *stakeholders* baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Di bawah ini ditampilkan perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja menurut lapangan usaha, dan penduduk yang bekerja menurut pendidikan tahun 2019-2023.

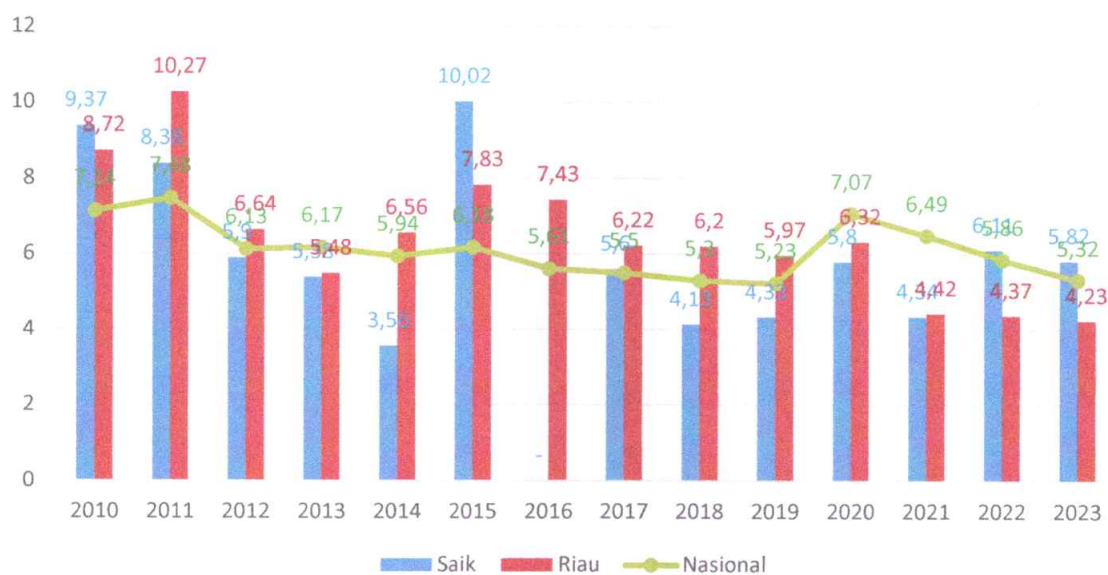
Tabel 2. 33
Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Siak Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	TPAK	64,77	62,78	64,69	65,86	65,72
2	Penduduk Usia Kerja	Na	337.642	347.199	356.196	346.627
2	Angkatan Kerja	Na	211.971	224.609	234.574	227.808
3	Bukan Angkatan Kerja	Na	125.671	122.590	121.622	118.819
4	TPT	4,13	5,80	4,34	6,11	5,82

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan, BPS Kabupaten Siak Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak tergolong tinggi baik dengan provinsi maupun nasional. Pasca Pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga tahun 2021 menyebabkan pemerintah menerapkan berbagai kebijakan terkait pembatasan sosial, seperti penutupan pariwisata, pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah dan sebagainya. Kondisi ini menyebabkan perekonomian di Kabupaten Siak menjadi sulit baik bagi pelaku ekonomi maupun penduduk secara umum. Kondisi ini menyebabkan penduduk Kabupaten Siak yang sebelumnya masuk pada golongan bukan Angkatan kerja banyak yang akhirnya terpaksa untuk mulai masuk ke dunia kerja, khususnya bagi penduduk perempuan. Kondisi ini menyebabkan angka pengangguran Siak pada tahun 2021 menurun tajam menjadi sebesar 4,34 persen. Tahun 2022, perekonomian Siak mulai bangkit, aktivitas ekonomi di Siak secara bertahap berangsur pulih, begitu juga dengan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini justru yang menjadi penyebab penduduk Siak yang sebelumnya bekerja beralih kembali menjadi pengangguran atau bukan angkatan kerja khususnya penduduk perempuan. Hal inilah yang menyebabkan kembali meningkatnya angka TPT Kabupaten Siak menjadi 6,11 pada tahun 2022. Perbandingan Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Siak, Riau, dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 2. 10
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak, Riau dan Nasional Tahun 2010-2023



Sumber : RPMN 2020-2024; BPS Provinsi Riau Tahun 2023; RPJMD Kabupaten Siak; Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2024

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index*) adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang

dikeluarkan oleh UNDP (*United Nation Development Programe*) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (*purchasing power parity/PPP*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah, selain itu juga sebagai alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 2. 34
Perkembangan IPM Kabupaten Siak Tahun 2010-2023

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Siak	69,78	70,20	70,45	70,84	71,45	72,17	72,70	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98	74,50	74,98
2	Prov. Riau	68,65	68,90	69,15	69,91	70,33	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52	74,04
3	Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	73,55

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak 2023 dan press release BPS Indonesia

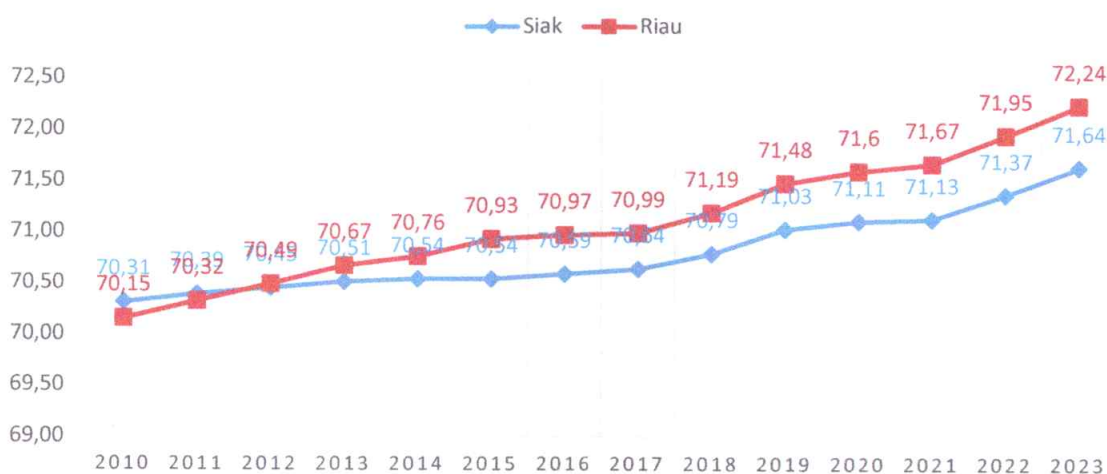
IPM Kabupaten Siak terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yakni dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Siak sebesar 69,78 dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 tercatat IPM Kabupaten Siak berada pada angka 74,98. Capaian IPM ini telah melebihi target IPM tahun 2023 (target 2023 sebesar 74,04). Angka menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari Provinsi Riau dan tingkat Nasional.

Dalam mengukur IPM, ada 3 dimensi dasar yang harus dipenuhi manusia, yaitu umur panjang yang sehat (kesehatan), pengetahuan yang memadai (pendidikan) dan standar hidup yang layak (pengeluaran). Sehingga data yang harus diperoleh antara lain :

1) Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Usia Harapan Hidup meru Tingkat Kemiskinanpakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani bayi yang baru lahir dan menjadi ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Siak pada tahun 2010 hingga 2023 terus meningkat. Angka ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak terus membaik.

Gambar 2. 11
Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Tahun 2010-2023

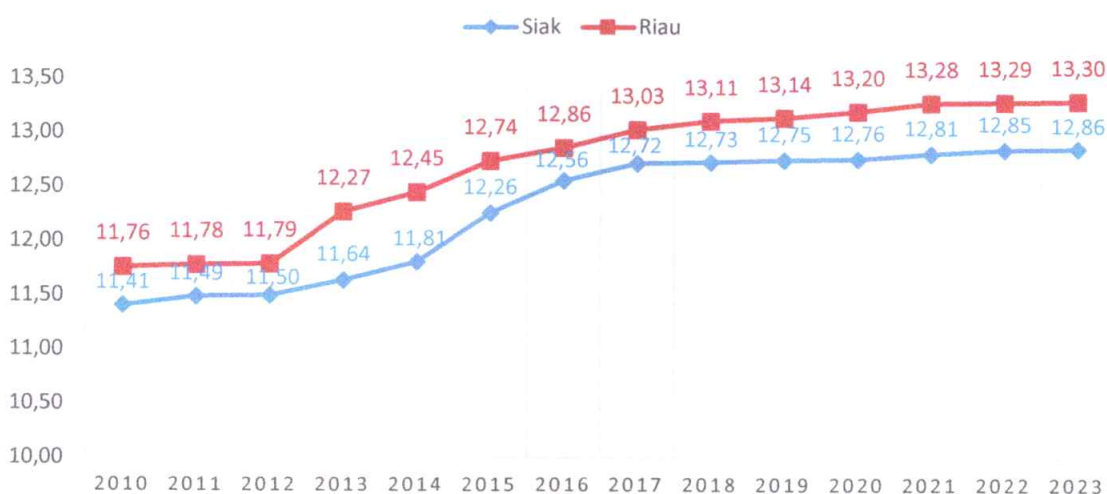


Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak dan BPS Provinsi Riau Tahun 2023

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. HLS Kabupaten Siak pada Tahun 2023 adalah 12,86. Artinya, lama sekolah yang diharapkan di masa mendatang adalah selama 12,86 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA atau setara dengan semester II pada Perguruan Tinggi. Berikut data HLS Kabupaten Siak Tahun 2019-2023:

Gambar 2. 12
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 (TH)



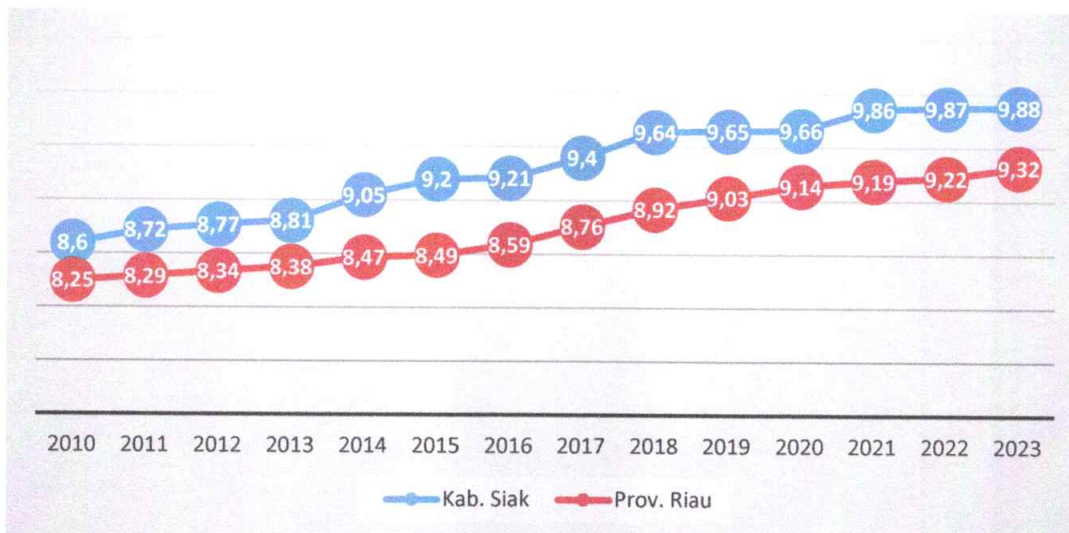
Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak dan BPS Provinsi Riau Tahun 2023

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selama tahun 2010 hingga 2023 di Kabupaten Siak memiliki tren peningkatan. Capaian tersebut diiringi dengan upaya peningkatan angka Rata Lama Sekolah di atas 9 tahun atau 12 tahun sebagai prioritas

pembangunan di bidang sumber daya manusia ke depannya. Karena melalui program dan kegiatan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dan didukung pendidikan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wilayah. Berikut perkembangan RLS Kabupaten Siak:

Gambar 2. 13
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2023



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak tahun 2023

4) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita rill penduduk Kabupaten Siak terus mengalami penurunan dari Rp. 12.347 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp. 12.637 ribu pada tahun 2023. Dari tiga komponen pembentuk IPM.

Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Siak karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran baik untuk konsumsi maupun investasi, Peningkatan Pengeluaran per Kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan Pendapatan per Kapita juga kontribusi pada peningkatan PDRB Kabupaten Siak. Untuk lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 35
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 (Rp Juta)

No	Pengeluaran perKapita	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Siak	12.347	11.799	11.807	11.158	12.637
2	Prov. Riau	11.255	10.675	10.736	12.203	11.448

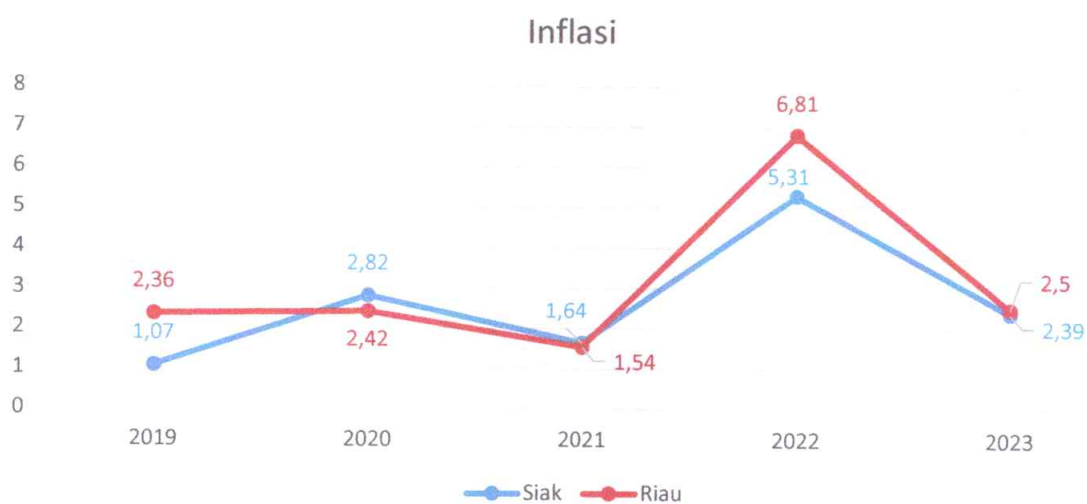
Sumber: BPS Provinsi Riau tahun 2023

2.2.1.6 Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat,

maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kondisi inflasi Kabupaten Siak selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Laju inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,31% dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,07%. Pada Tahun 2023, inflasi Kabupaten Siak sebesar 2,39% berada di bawah inflasi Provinsi Riau 2023 sebesar 2,5%. Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 14
Perkembangan Inflasi Kabupaten siak Tahun 2019-2023



Sumber : Hasil Rapat Koordinasi Rakor Inflasi Daerah Tahun 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Fokus kesejahteraan sosial memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja.

2.2.2.1 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Menurun Permen PPPA Nomr 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah

kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Data IKK untuk Kabupaten Siak tidak tersedia, sehingga data yang dianalisis adalah IKK Provinsi Riau dan Nasional.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau tahun 2020-2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 nilai IKK Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,84 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 4,36% menjadi 76,2. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan perubahan kategori IKK Provinsi Jawa Tengah, yang awalnya Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah cukup responsif gender dan hak anak menjadi wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 2,50% dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,43 pada tahun 2021. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak

Tabel 2. 36
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2022

No	Dimensi	2020	2021	2022
1	Riau	71,46	74,36	77,02
	Kualitas Legalitas-struktur	81,36	82,70	90,38
	Kualitas Ketahanan Fisik	74,48	80,36	79,82
	Ketahanan Ekonomi	69,64	68,65	68,46
	Ketahanan Sosial - Psikologi	63,38	67,17	72,55
	Ketahanan Sosial -Budaya	60,46	65,46	67,57
2	Nasional	70,93	73,84	77,38
	Kualitas Legalitas-struktur	82,13	81,86	88,43
	Kualitas Ketahanan Fisik	69,72	77,38	77,36
	Ketahanan Ekonomi	71,40	70,82	71,56
	Ketahanan Sosial - Psikologi	65,32	67,58	77,07
	Ketahanan Sosial -Budaya	60-62	65,39	67,17

Sumber: Kementerian PPPA

2.2.2.2 Indeks Keluarga sehat

2.2.2.2.1 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan

Berdasarkan Departemen Kesehatan RI, gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang dilihat dari tingkat berat pada anak. berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) <-3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis *marasmus kwashiorkor* dan *marasmus-kwashiorkor*. Kekurangan gizi, terutama pada anak usia dini akan berdampak

pada tumbuh kembang anak, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Oleh sebab itu upaya-upaya yang bersifat preventif dan kuratif harus senantiasa dilakukan. Berikut data balita gizi buruk di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 37
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	7	5	16	8
2	Jumlah Balita yang diukur	23.205	17.578	39.477	29.241	29.128
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0.02	0.04	0.01	0.01	0.03
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	4	7	5	16	8

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

2.2.2.2 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Sama halnya dengan gizi buruk, penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usiannya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, anak akan mengalami masalah gizi buruk. Berikut prevalensi balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 38
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Balita Gizi Kurang	334	378	705	1.834	1.726
2	Jumlah Balita yang ditimbang	23.205	17.578	22.454	29.241	29.128
3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	1.43	2.15	3.14	6.30	5,93

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

Prevalensi status gizi kurang tahun 2023 adalah 5,93. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Secara umum faktor-faktor yang menentukan status gizi balita adalah konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga tubuh kekurangan zat gizi, keadaan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, tingkat pendidikan, pemberian ASI, kondisi sosial ekonomi pada konsumsi keluarga, faktor sosial keadaan penduduk, paritas, umur, jenis kelamin dan pelayanan kesehatan.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Dimensi Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga. Dimensi Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi

kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain. Adapun dimensi kebahagiaan adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014, seligmen :2002, chaplin :2008)

Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga rentan, berkembang atau berkualitas. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- a. kurang baik (rentan) nilainya di bawah 40;
- b. cukup baik (berkembang) nilainya antara 40-70;
- c. baik (berkualitas di atas 70).

Tabel 2. 39
Capaian iBangga di Kabupaten Siak Tahun 2021-2023

Kabupaten	Angka iBangga			Capaian iBangga Tahun 2023 terhadap 2022	Tren iBangga tahun 2021 - 2023
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
Siak	52,44	57,77	67,01	Naik	Naik
Provinsi Riau	53,01	56,74	63,7	Naik	Naik

Sumber: PK 2021-2023

Pada tabel diatas diketahui bahwa capaian iBangga di Kabupaten Siak dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan.

2.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang menjadi acuan dalam peningkatan pembangunan perlindungan anak. Penyusunan indeks ini mengacu pada konvensi hak anak dengan mengaplikasikan 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 40
Indeks perlindungan Anak Kabupaten Siak Tahun 2022-2023

Uraian	2022			2023		
	IPA	IPHA	IPKA	IPA	IPHA	IPKA
Indeks perlindungan Anak	65,76	61,47	81,72	65,65	61,56	82,67

Sumber : Kementerian PPPA

2.2.2.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah pendidikan prasekolah (PAUD) dan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS), sementara untuk pendidikan menengah keatas (SMA/SMK/MA) sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pendidikan Tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak. dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu. Berikut perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 41
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	52.58	53,41	42,8	49,32	52,05

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihasilkan dari jumlah penduduk 0-4 tahun, sepanjang tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 04,09%. Namun di tahun 2023, tingkat Pendidikan Usia Dini mengalami perbaikan sebesar 2,73% setelah penurunan di tahun 2022. Hal ini menggambarkan semakin bertambahnya minat masyarakat Kabupaten Siak untuk memulai menempuh pendidikan sejak usia dini bagi anaknya. Jumlah satuan pendidik PAUD pada tahun 2023 berjumlah 466, tentunya dibutuhkan sarana dan prasara Pendidikan yang memadai untuk menampung peserta didik. Berikut jumlah satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Siak:

Tabel 2. 42
Jumlah Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Siak Tahun 2023

No	KECAMATAN	TK			KB			TPA			SPS			RA			TOTAL		
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML
	TOTAL	18	207	225	0	196	196	0	10	10	0	6	6	0	29	29	18	448	466
1	Minas	1	15	16	-	5	5	-	-	0	-	-	0	-	1	1	1	21	22
2	Siak	1	14	15	-	16	16	-	6	6	-	1	1	-	-	0	1	37	38
3	Sungai Apit	1	22	23	-	23	23	-	1	1	-	-	0	-	2	2	1	48	49
4	Tualang	2	45	47	-	23	23	-	1	1	-	1	1	-	3	3	2	73	75
5	Kerinci Kanan	1	13	14	-	13	13	-	-	0	-	-	0	-	-	0	1	26	27
6	Dayun	1	18	19	-	18	18	-	-	0	-	-	0	-	5	5	1	41	42
7	Bunga Raya	1	14	15	-	13	13	-	1	1	-	-	0	-	1	1	1	29	30
8	Sungai Mandau	1	7	8	-	11	11	-	-	0	-	3	3	-	-	0	1	21	22
9	Kandis	2	23	25	-	8	8	-	-	0	-	-	0	-	9	9	2	40	42
10	Lubuk Dalam	1	7	8	-	8	8	-	-	0	-	-	0	-	2	2	1	17	18
11	Koto Gasib	2	14	16	-	20	20	-	-	0	-	-	0	-	1	1	2	35	37
12	Mempura	2	5	7	-	16	16	-	1	1	-	1	1	-	2	2	2	25	27
13	Sabak Auh	1	4	5	-	15	15	-	-	0	-	-	0	-	3	3	1	22	23
14	Pusako	1	6	7	-	7	7	-	-	0	-	-	0	-	-	0	1	13	14

TK: Taman Kanak-Kanan KB: Kelompok Bermain TPA: Tempat Penitipan Anak SPS: Satuan Paud Sejenis
RA: Raudathul Atfal

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

2.2.2.4.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per Seribu Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Target *Millennium Development Goals* (MDGs) Nasional untuk AKB di tahun 2015 adalah kurang lebih atau sama dengan 23 per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dalam *Sustainable Development Goal* (SDGs) dengan *goal* SDGs ke tiga yaitu *Good Health and Well-being* menjelaskan bahwa salah satu dampak yang diharapkan yaitu dituntaskannya kematian bayi yang dapat dicegah, yang ditargetkan pada tahun 2030. Semua negara diharapkan berpartisipasi untuk menekan angka kematian bayi menjadi 12/1.000 KH. AKB Kabupaten Siak tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan kenaikan dengan angka 6/1000 kelahiran hidup pada tahun 2018 dan 8/1000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Berikut AKB Kabupaten Siak tahun 2018-2022:

Tabel 2. 43
Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun Kabupaten Siak 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	9	7	6	8	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023

2.2.2.4.3 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun . Untuk AKHB di Kabupaten Siak dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan dari angka 9/1000 kelahiran hidup ke angka 7/1000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 44
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran hidup	9	7	6	8	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023

2.2.2.4.4 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan risiko terjadi kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain

yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit, infeksi dan kecelakaan. AKABA di Kabupaten Siak pada tahun 2019 ke 2023 mengalami penurunan dari angka 10/1000 kelahiran bayi menjadi 8/1000 kelahiran bayi. Untuk data AKABA Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 45
Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	AKABA/1.000 KLH	10	10	6	9	8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023

2.2.2.4.5 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) atau Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Untuk Kabupaten Siak, AKN pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan yaitu dari angka 6/1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 5/1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Berikut data Angka Kematian Neonatal pada tabel berikut:

Tabel 2. 46
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6	8	5	6	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023

2.2.2.4.6 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Goal 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu, Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian

dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya. tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Angka Kematian Ibu pada rentang waktu 2018-2022 di Kabupaten Siak mengalami penurunan. Pada tahun 2018 kematian Ibu melahirkan sebanyak 129/100000 kelahiran hidup. Angka AKI terus menunjukkan tren meningkat beberapa tahun terakhir, namun di tahun 2022 mengalami penurunan AKI. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan persalinan dan tenaga kesehatan yang *professional* di bidangnya. Berikut tabel yang menunjukkan AKI di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 47
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Siak tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	137	123	267	85	205

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023

2.2.2.4.7 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang diimunisasi Campak

Imunisasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sejak bayi baru lahir untuk menjaga kesehatannya. Kemudian demi memperpanjang “masa berlaku” perlindungannya. Beberapa jenis vaksin utama harus diulangi sesuai dengan jadwal dan jarak yang telah ditentukan. Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak di Kabupaten Siak sebesar dari tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Dengan angka 87,84% pada tahun 2019 kemudian menurun menjadi 64,6% pada tahun 2023. Berikut data tabel persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 48
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di imunisasi Campak Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak	87,84	67,56	67	67,2	64,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023

2.2.2.4.8 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Non-Polio AFP rate di

Kabupaten Siak dari tahun 2019 ke tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Pada tahun sebelumnya, skor AFP pada angka 3, namun di tahun 2023 skor AFP tetap menjadi 3. Berikut tabel angka Non-Polio AFP rate di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 49
non-Polio AFP rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Siak tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rate	7	3	1	3	3

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

2.2.2.4.9 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Sama halnya dengan gizi buruk, penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usiannya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, anak akan mengalami masalah gizi buruk. Berikut data balita yang mengalami gizi kurang di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 50
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Balita Gizi Kurang	334	378	n/a	1.834	1.726
2	Jumlah Balita.	23.205	17.578	n/a	29.241	29.128
3	Pravalensi Balita Gizi Kurang	1.43	1.44	n/a	n/a	5,93

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

Prevalensi status gizi kurang tahun 2023 adalah 5,93 dimana terjadi peningkatan dari tahun 2019 sebesar 1,43 . Secara umum faktor-faktor yang menentukan status gizi balita adalah konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga tubuh kekurangan zat gizi, keadaan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, tingkat pendidikan, pemberian ASI, kondisi sosial ekonomi pada konsumsi keluarga, faktor sosial keadaan penduduk, paritas, umur, jenis kelamin dan pelayanan kesehatan.

2.2.2.4.10 Prevalensi Stunting Balita

Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang berkaitan dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Stunting dalam jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan

disabilitas di usia tua. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah mengupayakan percepatan penurunan stunting yang mempunyai pengertian yaitu setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara *convergent*, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Angka stunting di Kabupaten Siak dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan. Berikut adalah angka stunting dan penderita stunting selama kurun waktu 2019-2023.

Tabel 2. 51
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	27,79	27,79	19	22	10,4
2	Fasilitas Kesehatan					
	Rumah Sakit Umum	4	4	4	4	4
	Puskesmas Rawat Inap	7	7	7	7	7
	Puskesmas Non Rawat Inap	8	8	8	8	8
	Puskesmas Pembantu	93	93	93	93	93
	Posyandu Kampung	412	423	425	425	428
3	Tenaga Kesehatan					
	Jumlah Dokter Umum	90	118	112	119	96
	Jumlah Dokter Gigi	27	30	28	28	26
	Jumlah Perawat	504	534	542	546	483

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. faktor penyebab nya dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Penurunan Stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Berikut jumlah balita stunting berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 52
Jumlah Balita Stunting berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Kecamatan	Keluarahan/Kampung	Jumlah Balita Stunting
1	Siak	Buatan Besar	34
2		Suak Lanjut	51
3		Langkai	42
4		Merempan Hulu	43
5		Kel. Kampung Rempak	53

No	Kecamatan	Keluarahan/Kampung	Jumlah Balita Stunting
6	Kandis	Libo Jaya	85
7		Kel. Kandis Kota	47
8		Belutu	17
9		Jambai Makmur	36
10	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	43
11		Rawang Kao	13
12		Sialang Palas	7
13	Tualang	Kel. Perawang	50
14		Perawang Barat	32
15	Mempura	Kel. Sungai Mempura	33
16	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	11
17	Pusako	Dosan	6
18	Sungai Apit	Teluk Masjid	28
TOTAL			695

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa balita yang mengalami *stunting* terbanyak berada di Kecamatan Siak. Langkah pemerintah dalam melakukan penanggulangan *stunting* salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada ibu hamil maupun anak usia dini berupa nutrisi dan gizi yang cukup agar terhindar dari *stunting*. Selain itu juga memastikan kebersihan lingkungan bagi ibu hamil dan balita. Karena 1000 hari pertama kehidupan bayi merupakan periode kritis terjadinya *stunting*.

Pada tahun 2024 Provinsi Riau optimis bahwa target prevalensi stunting 12,38 persen dapat tercapai. Tentunya hal ini memerlukan upaya yang lebih keras terkoordinasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan capaian intervensi spesifik dan intervensi sensitive. Berbagai upaya dilakukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target penurunan stunting, mengidentifikasi isu/kendala serta solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting, Untuk lebih jelas trend angka prevalensi stunting kabupaten siak dan provinsi riau dapat dilihat pada Table dibawah ini :

Tabel 2. 53
Trend Prevalensi Stunting Kabupaten Siak dan Provinsi Riau

No	Kab/Prov	Hasil Pengukuran SSGI dan SKI (%)					Kenaikan / Penurunan dari Tahun 2022
		SSGI 2019	SSGI 2020	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	
1	Kabupaten Siak	21	27,43	19,00	22,00	10,40	-11,60
2	Provinsi Riau	27,4	23,95	22,30	17,00	13,60	-3,40

Sumber : Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)2021,2022dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

2.2.2.4.11 Penanganan Penyakit Tuberkulosis

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang bagian paru-paru manusia, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Berikut angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan treatment success rate dari penderita TBC di Kabupaten Siak. Berikut rincian Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 54
Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB (%) Di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Orang	236	393	395	385	385
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	112	89	0	83	135
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Nilai	3,55	2,81	2,68	4,1	5,95
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Orang	490	475	386	593	637
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Orang	435	447	354	492	486

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023

Berdasarkan Tabel di atas, terjadi penurunan angka keberhasilan penanganan TBC di Kabupaten Siak tetapi hal ini tidak menjadi indikasi buruk, karena jumlah kasus TBC yang terjadi di Kabupaten Siak terus menurun.

2.2.2.4.12 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu program sosial yang masih dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memudahkan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Fasilitas JKN bagi masyarakat merupakan langkah penting yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan

fasilitas jaminan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 55
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023

No.	Tahun	Kepesertaan	
		Jiwa	Persentase
1	2023	457.810	93,88%
2	2022	386.682	80%
3	2021	339.046	75,80%
4	2020	262.598	61%
5	2019	220.088	52%

Sumber: BPJS Kesehatan Tahun 2024

2.2.2.4.13 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu. Kematian saat bersalin dan satu minggu pertama diperkirakan 60 dari seluruh kematian ibu. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Siak pada tahun 2023 sebesar 78,15. Angka ini menurun dari tahun 2019 sebesar 99,70. Saat ini Kabupaten Siak meluncurkan satu inovasi dalam melakukan pertolongan persalinan menggunakan sistem alarm persalinan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak.

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun menjadi 78,15%. Itu artinya masih ada ibu bersalin yang belum mendapatkan pertolongan persalinan pada tahun 2023. Berikut data Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan di Kabupaten Siak tahun 2023:

Tabel 2. 56
Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran (Orang)	Target Capaian (%)	Jumlah Capaian (Orang)	Realisasi 2023 (%)
1.	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	10.099	100	8.046	79,67

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran (Orang)	Target Capaian (%)	Jumlah Capaian (Orang)	Realisasi 2023 (%)
	(data : cakupan K4)					
2.	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar (data:cakupan persalinan fasyankes)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	9.639	100	7.312	75,86
3.	Bayi baru lahir 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (data cakupan KN lengkap)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.180	100	7.569	82,45
4.	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (data:pelayanan kesehatan anak balita dan imunisasi)	Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36.118	100	34.087	94,38
5	Setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining sesuai standar kesehatan (data:menjaringan anak kelas 1 dan kelas 7 pada awal tahun ajaran baru)	Persentase setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining sesuai standar kesehatan	88.276	100	73.313	83,05
6	Warga negara usia produktif 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar	Persentase warga 15-59 tahun mendapat skrining sesuai standar	306.722	100	238.196	77,66
7	Setiap penduduk usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan	Presentase warga negara usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas mendapat skrining	8.964	100	14.813	78,11

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran (Orang)	Target Capaian (%)	Jumlah Capaian (Orang)	Realisasi 2023 (%)
	sesuai standar kesehatan (data:kunjungan posyandu lansia. klinik lansia dan poli umum puskesmas)	kesehatan sesuai standa				
8	Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	69.335	100	55.731	80,38
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Presentase penyandang diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.375	100	6.385	189,19
10	Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) mendapat pelayanan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	695	100	677	97,41
11	Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	9.909	100	10.348	104,43
12	Orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	Presentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	12.123	100	10.253	84,57

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Siak Tahun 2023

2.2.2.4.14 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar khususnya rehabilitasi sosial maka pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut. Pelayanan dasar tersebut terdiri dari rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial. Untuk rehabilitasi sosial

sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjutan.

Pemerintah Kabupaten Siak bertanggungjawab dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan anak terlantar di dalam panti. Sarana pelayanan sosial seperti sarana rehabilitasi sosial seperti panti bagi lansia, panti bagi anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan, memberikan dan melakukan pembinaan kepada sarana pelayanan tersebut. Berikut sebaran lembaga kesejahteraan sosial kabupaten siak dana data disabilitas kabupaten siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 57
Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Orang	4	3	3		
2	Anak Terlantar (AT)	Orang	250	6	170		25.290
3	Anak yang bermasalah dengan Hukum	Orang	185	-	55	64	70
4	Anak Jalanan (AJ)	Orang	75	5	-		
5	Anak dengan Distabilitas (ADK)	Orang	148	218	213	255	277
6	Anak yang menjadi Korban Tindak kekerasan	Orang	42	2	36	48	45
7	anak yang memerlukan perlindungan	Orang	66	-	-		
8	lanjut usia telantar	Orang	2.703	689	1.254	10.307	10.840
9	Penyandang Distabilitas	Orang	640	257	1.269	1.269	1.430
10	Gelandangan	Orang	16	3	7		
11	Pengemis	Orang	31	3	-		
12	Pemulung	Orang	25	25	-		
13	Kelompok Minoritas	Orang	-	-	-		
14	Tuna Susila	Orang	195	185	-		7
15	Bekas Warga Binaan Lembaga	Orang	32		-		
16	orang dengan HIV/AIDS	Orang	147	197	-	5	21
17	Korban Trafficking	Orang	-	-	-		3
18	Korban Tindak Kekerasan	Orang	45	-	-		
19	Pekerja migran bermasalah sosial	Orang	-	-	-		
20	Korban bencana alam (KBA)	Orang	355	4	260		
21	Korban bencana sosial (KBS)	Orang	176	99	55		

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
22	Perempuan rawan ekonomi	Orang	647	647	-		
23	Fakir miskin	Orang	105.792	104.403	170.348	163.405	144.435
24	Keluarga bermasalah sosial psikologis	Orang	45	-	45		
25	Komunitas Adat terpencil (KAT)	KK	196	489	489	489	202

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023

berikut rekapitulasi data disabilitas kabupaten siak tahun 2019- 2023 :

Tabel 2. 58
Rekapitulasi Data Disabilitas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Penyandang disabilitas	640 orang	1.215 orang	1.215 orang	1.269 orang	1.430 orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023

Tabel 2. 59
Data Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas Kabupaten Siak Tahun 2023

NO	JENIS DISABILITAS	KECAMATAN														JMLH
		BUNGARAYA	DAYUN	KANDIS	KERINCI KANAN	KOTO GASIB	LUBUK DALAM	MEMPURA	MINAS	PUSAKO	SABAK AUH	SIAK	SUNGAI APIT	SUNGAI MANDAU	TUALANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DAKSA	26	40	40	16	30	23	35	39	6	41	44	51	9	169	569
2	DAKSA, INTELEKTUAL		5				1		1	2	2	11		1	1	24
3	DAKSA, INTELEKTUAL, MENTAL	1					1			3			1			6
4	DAKSA, INTELEKTUAL, NETRA			1												1
5	DAKSA, INTELEKTUAL, RUNGU WICARA		2	14					2				4			22
6	DAKSA, INTELEKTUAL, RUNGU WICARA, MENTAL					1				1					1	3
7	DAKSA, INTELEKTUAL, RUNGU WICARA, NETRA												4			4
8	DAKSA, MENTAL							3						1		4
9	DAKSA, NETRA							1			3					4
10	DAKSA, RUNGU WICARA	1		19				7	1	1	1		2		1	33

NO	JENIS DISABILITAS	KECAMATAN														JMLH
		BUNGARAYA	DAYUN	KANDIS	KERINCI KANAN	KOTO GASIB	LUBUK DALAM	MEMPURA	MINAS	PUSAKO	SABAK AUH	SIAK	SUNGAI APIT	SUNGAI MANDAU	TUALANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	DAKSA, RUNGU WICARA, MENTAL							4								4
12	DAKSA, RUNGU WICARA, NETRA			1									1			2
13	INTELEKTUAL	11	27	16	12	22	5	14	26	3	17	20	16		30	219
14	INTELEKTUAL, MENTAL	10				8	1	9			11	18	4		6	67
15	INTELEKTUAL, NETRA, MENTAL										1					1
16	INTELEKTUAL, RUNGU WICARA			2		1		4	3	1	1	1	2			15
17	MENTAL	8	4	2	21	21	20	8	12	4	2	2	50	4	16	174
18	NETRA	3	6	4	3	11		4	8	1	3	6	7		12	68
19	RUNGU WICARA	14	14	12	4	6	14	16	14	5	20	14	32	3	33	201
20	RUNGU WICARA, MENTAL							1			1		6			8
21	RUNGU WICARA, NETRA											1				1
TOTAL		74	98	111	56	100	65	106	106	27	103	117	180	18	269	1430

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023

Dari data disabilitas diatas pada tahun 2023 kabupaten siak telah memperdayakan disabilitas yang bekerja pada organisasi perangkat daerah (OPD)/ dunia usaha yang tersebar mayoritas dengan jenis kecacatan daksa, rincian disabilitas yang bekerja di OPD/dunia usaha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 60
Data Disabilitas Yang Sudah Dipekerjakan Di Organisasi Perangkat Daerah (Opd)/ Dunia Usaha Tahun 2023

No	OPD / DUNIA USAHA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JENIS KECACATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Sosial	Kec. Siak	SMK	DAKSA	1	Kelainan pada kaki
2	Dinas P3AP2KB Kab.Siak	Kec. Siak	SMA	DAKSA	1	Kelainan bentuk Tangan dan Kaki
3	Dinas PU TARUKIM Kab.Siak	Kec. Minas	S1 (Strata Satu)	DAKSA	1	Kelainan pada kaki

No	OPD / DUNIA USAHA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JENIS KECACATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4	5	6	7
4	Dinas KOMINFO Kab.Siak	Kec. Siak	SMA	DAKSA	1	Kelainan pada kaki
5	Disduk Capil Siak	Mempura	SMA	DAKSA	1	Kelainan Pada Kaki
6	Dinas Koperasi dan UMKM	Kec. Siak	SMA	DAKSA	1	Kelinan pada tangan
7	Disduk Capil Siak	Kec. mempura	SMA	DAKSA	1	Kelainan pada kaki
8	Kantor Camat Lubuk Dalam	Kec.Koto Gasib	S1 (Stara Satu)	DAKSA	1	Kelainan pada kaki
9	Kantor Kecamatan Koto Gasib	Siak	SMP	DAKSA	1	Cacat Bawaan
10	Kecamatan Sungai Mandau	Kec. mempura	S1 (Strata Satu)	DAKSA	1	Kelaianan Pada Kaki
11	Kantor Camat Sabak Auh	Kec. Sabak Auh	D3	DAKSA	1	Kelainan pada kaki
12	Kecamatan Tualang	Tualang	SLTA	DAKSA	1	Ampulasi Kaki KiriBawah Lutut
13	Kec.Minas	Kel.Minas Jaya	SMK	Tuna Runggu dan Tuna Wicara	1	Bisu dan Tuli
14	Kantor Desa Sabak Permai Kec.Sabak Auh	Kec.Sabak Auh	Tidak Tamat SD	Tuna Wicara	1	Bisu
15	Kantor Desa Bandar Sungai Kec.Sabak Auh	Kec.Sabak Auh	SD	Tuna Wicara	1	Bisu
16	Kantor Desa Belading Kec. Sabak Auh	Kec.Sabak Auh	Tidak Sekolah	Intelektual	1	-
17	Kantor Camat Sabak Auh	Kec.Sabak Auh	D2	DAKSA	1	Kelainan Pada Tangan
18	Kantor Desa Laksamana Kec.Sabak Auh	Kec.Sabak Auh	SLB	Intelektual	1	-

No	OPD / DUNIA USAHA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JENIS KECACATAN	JUMLAH (ORANG)	KET
1	2	3	4	5	6	7
19	Kantor Desa Bandar Pedada Kec.Saba Auh	Kec.Sabak Auh	SD	DAKSA	1	Kelaianan Pada Kaki
20	Kec. Dayun	Kec. Dayun	SMA	DAKSA	1	Kelaianan Pada Kaki
21	Kec. Siak	Kec. Siak	SMA	DAKSA	1	kelaianan Pada Kaki
22	Kec. Siak	Kec. Siak	SMA	DAKSA	1	Kelaianan Pada Tangan
23	PT. Berlian Inti Mekar	Kec. Dayun	SMA	DAKSA	1	Kelainan pada kaki
24	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills	Kec. Tualang	-	DAKSA	12	kelaianan Pada Kaki, Kelaianan Pada Tangan Kaki, Menggunakan kornea buatan,
25	PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK	Kec.Tualang : 60 Kec. Minas :1	-	DAKSA	61	kelaianan Pada Kaki, Kelaianan Pada Tangan Kaki, Menggunakan kornea buatan,
TOTAL					96 Orang	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender

Dalam rangka mewujudkan kelompok perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian. pada tahun 2016. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan program unggulan *3-ends*. Program ini didasarkan pada masih tingginya kekerasan pada perempuan. masih adanya praktek perdagangan manusia juga kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program *3-ends* ini adalah (1) Akhiri kekerasan perempuan dan anak. (2) Akhiri perdagangan manusia dan (3) Akhiri kesenjangan ekonomi antara laki laki dan perempuan. Program unggulan Kementerian PPPA ini tentu juga menjadi rujukan bagi

daerah untuk melakukan upaya yang sejalan dengan kebijakan pusat dengan tetap mengacu pada data dan kebijakan daerah.

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak. dalam upaya untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak. Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Tabel 2. 61
Perkembangan Pembangunan Gender Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	na	88,89	88,98	89,13	89,29
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	42,77	42,38	42,19	43,03	42,46

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2024

Dalam hal pembangunan gender, IPG Kabupaten Siak sebesar 88,79. Berarti kesetaraan gender antar laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan di Kabupaten Siak tidak terlalu tinggi. Dalam hal pemberdayaan gender, IDG Kabupaten Siak masih rendah yaitu berada dalam angka 43,03. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik. Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Siak masih rendah, yakni hanya sebesar 1.0.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan. Perempuan dianggap tidak memiliki daya saing secara finansial karena kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki. Maka daripada itu diperlukan kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

2.2.2.6 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Siak pada tahun 2019-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kabupaten Siak berkisar antara 0,591 hingga 0,599. Pada tahun 2021 nilai IKG Kabupaten Siak mengalami penurunan menjadi 0,535. Namun nilainya kembali mengalami kenaikan pada periode tahun 2022-2023, dimana pada tahun 2023 nilai IKG Kabupaten Siak sebesar 0,542. Kenaikan nilai IKG di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin besar atau kesetaraan semakin jauh. Perbedaan. Apabila dibandingkan dengan nilai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, nilai IKG Kabupaten Siak berada pada peringkat 8 dari 13 kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel 2. 62

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,55	0,591	0,599	0,535	0,539	0,542

Sumber: BPS Kabupaten Siak Tahun 2024

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Siak pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlak mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya.

Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu sektor penting menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menunjang pengembangan kebudayaan hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu di Kabupaten Siak.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam melestarikan nilai budaya yang mana sebagian besar penduduknya bersuku melayu adalah dengan merajut nilai-nilai luhur

warisan masa lalu yang dipadukan dengan kemajuan masa kini agar tercipta harmonisasi antara representasi masa lalu dan masa sekarang. beberapa kebiasaan yang masih tetap dilestarikan oleh pemerintah kabupaten siak dan telah menjadi agenda tahunan ialah sebagai berikut:

1. Kegiatan Ghatib Beranyut

Kegiatan ini dilakukan dengan dzikir bersama dengan menggunakan sampan mengikuti arus pasang surut Sungai Siak yang dipimpin oleh seorang ulama. kegiatan ini telah ada sejak zaman kesultanan kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar daerah Kabupaten Siak dijauhkan dari bencana memohon perlindungan dari Allah S.W.T.

2. Mengadakan Event Siak Bermadah

Salah satu agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka melestarikan budaya melayu. event ini dikemas dalam bentuk perlombaan diantaranya tari tradisional melayu. tari kreasi melayu. melawak. syair. berbalas pantun. pemilihan bujang dan dara.

3. Kegiatan Sedekah Bubur Asyura

Kegiatan ini adalah sedekah bubur assyura dalam rangka memeriahkan tahun baru islam. biasanya dilakukan setiap tanggal 10 Muharam pada petang hari untuk berbuka puasa. kegiatan ini telah dilakukan oleh sultan – sultan kerajaan Siak mulai dari raja ke 11 pada pertengahan abad 18 M.

Disamping upaya pelestarian nilai – nilai budaya melalui event kebudayaan. pemerintah kabupaten siak juga melakukan pemeliharaan benda cagar budaya seperti:

1. Istana kerajaan siak yang diberi nama Istana Asserayah Hamsyimiyah. yang didalamnya masih banyak terdapat peninggalan barang – barang bersejarah seperti Komet (alat musik buatan Jerman yang hanya diproduksi sebanyak 2 unit di dunia).
2. Balai kerapatan tinggi dibangun oleh sultan Siak ke 11 yang berfungsi sebagai tempat sultan bekerja dan pelaksanaan sidang adat. mahkamah kerajaan dan penobatan sultan serta agenda – agenda lainnya.
3. Masjid Syahbudin dibangun pada tahun 1926. bangunan yang bercirikan arsitektur arab.
4. Makam Sultan Syarif Kasim II Bersama permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah serta makam keluarga dan kerabat sultan.
5. Bangunan peninggalan Belanda seperti Gudang misiu, Tangsi Belanda dan Gedung Contreleur.

Berikut data perkembangan pelestarian budaya di Kabupaten Siak tahun 2019 – 2023. terus dikembangkannya kegiatan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya. dan relokasi situs cagar budaya dengan menggunakan belanja daerah ataupun melalui dana APBN:

Tabel 2. 63
Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Siak tahun 2019 - 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	5	na	na	na	na
2	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	33	60	79	138	138
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	na	na	na	na	na
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	na	na	na	na	na

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

Bedasarkan Peraturan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, terdapat amanat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berikut data objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 64
Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Jenis OPK	Jumlah	Kondisi Faktual		
			Terpelihara	Kurang Terpelihara	Tidak Terpelihara
1	Manuskrip	0			
2	Tradisi Lisan	6	4	2	
3	Adat Istiadat	6	5	1	
4	Ritual Khusus	11	9	2	
5	Pengetahuan Tradisional	0			
	a. Pengobatan Tradisional	0	0		
	b. Busana Tradisional	3	2	1	
	c. Kuliner Tradisional	38	29	9	
	d. Lain – lain	1	1		
6	Teknologi Tradisional	19	18		1
7	Seni	0			
	a. Seni Musik	16	14	2	
	b. Seni Tari	3	3		
	c. Seni Rupa	5	5		
	d. Seni Suara	0	0		
	e. Seni Sastra	3	3		
	f. Seni Teater	1	1		
	g. Tata Busana*	5	4	1	
	h. Seni Sinematografi	1	1		

No	Jenis OPK	Jumlah	Kondisi Faktual		
			Terpelihara	Kurang Terpelihara	Tidak Terpelihara
	i. Seni Media Baru	0	0		
8	Bahasa	2	2		
9	Permainan Rakyat	10	10		
10	Olahraga	2	2		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Pemerintah Kabupaten Siak juga menggelar inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB) di kabupaten siak , cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia di masa lampau sehingga perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Kegiatan pelestarian dibutuhkan untuk menjaga eksistensi warisan budaya benda sebagai modal memperkuat kepribadian bangsa, Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat bangsa sebagai bekal kekayaan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai penting untuk dipromosikan ke masyarakat internasional. Pelestarian ini diharapkan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada masyarakat sekitar objek, Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya harus didukung pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Berikut jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB) yang ada dan terdaftar di kabupaten siak sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 65
Jumlah Warisan Budaya Benda Tak Benda (WBTB) Kabupaten Siak Tahun 2023

No.	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Nomor Daftar	Provinsi	Domain
1	Tenun Siak	2013	2013 00 013	Riau	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2	Syair Siak Sri Indrapura	2018	2018 00 634	Riau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
3	Ghatib Beghanyut	2018	2018 00 636	Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
4	Tari Gendong	2018	2018 00 646	Riau	Seni Pertunjukan
5	Zapin Siak Sri Indrapura	2019	2019 00 840	Riau	Seni Pertunjukan
6	Dikei Sakai	2019	2019 00 843	Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan

No.	Nama Karya Budaya	Tahun Penetapan	Nomor Daftar	Provinsi	Domain
7	Gambus Selodang Siak	2020	2020 01 107	Riau	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
8	Tari Poang	2020	2020 01 115	Riau	Seni Pertunjukan
9	Dodoi Anak Siak	2022	2022 01 697	Riau	Tradisi dan Ekspresi Lisan
10	Tanjak Siak	2022	2022 01 698	Riau	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan
11	Tari Olang-Olang	2022	2022 01 699	Riau	Seni Pertunjukan
11	Tari Olang-Olang	2022	2022 01 699	Riau	Seni Pertunjukan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Tabel 2. 66
Jumlah Cagar Budaya (CB) Kabupaten Siak Tahun 2023

NO	Nama CB	Kec	Kelurahan/ Desa	Klasifikasi CB	Latar Belakang Budaya	Kondisi	Fungsi Eksisting	SK Penetapan Provinsi
1	Istana Siak	Siak	Kampung Dalam	Bangunan	Islam	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
2	Balai Kerapatan Tinggi / Balai Kerapatan Tinggi	Siak	Kampung Dalam	Bangunan	Islam	Terawat	Museum	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
3	Makam Sultan Kasim II / Makam Sultan Syarif Kasim II	Siak	Kampung Dalam	Situs	Islam	Terawat	Objek Wisata Religi	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022
4	Masjid Raya Syahabuddin / Masjid Raya Syahabuddin	Siak	Kampung Dalam	Bangunan	Islam	Terawat	Tempat Ibadah	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
5	Kompleks Makam Koto Tinggi / Kompleks Makam Koto Tinggi	Siak	Kampung Dalam	Situs	Islam	Terawat	Objek Wisata Religi	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022
6	Makam Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah / Makam Raja Kecil Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah	Siak	Langkai	Situs	Islam	Terawat	Objek Wisata Religi	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022
7	Tangsi Belanda / Tangsi Belanda	Mem pura	Benteng Hilir	Bangunan	Kolonial	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022
8	Gedung Controlleur / Gedung Controleur	Mem pura	Benteng Hilir	Bangunan	Kolonial	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022

NO	Nama CB	Kec	Kelurahan/ Desa	Klasifikasi CB	Latar Belakang Budaya	Kondisi	Fungsi Eksisting	SK Penetapan Provinsi
9	Bangunan Landraad / Bangunan Landraad	Mem pura	Benteng Hilir	Bangunan	Kolonial	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
10	Jembatan Istana Kerajaan Siak / Jembatan Istana Kerajaan Siak	Siak	Kampung Dalam	Struktur	Islam	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1930/XII/2022
11	Gudang Mesiu Kerajaan Siak / Gudang Mesiu Kerajaan Siak	Siak	Kampung Dalam	Bangunan	Islam	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
12	Kompleks Makam Marhum Mempura / Kompleks Makam Sultan Abdul Jalil Muzzafar Syah (Marhum Mempura)	Mem pura	Mempura	Situs	Islam	Terawat	Objek Wisata Religi	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022
13	Kelenteng Hock Sing Kiong / Kelenteng Hock Siu Kiong	Siak	Kampung Dalam	Bangunan	Konghucu	Terawat	Tempat Ibadah	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
14	Satuan Ruang Geografis Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura	Siak	Kampung Dalam	Kawasan	Melayu	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1933/XII/2022
15	Kantor Pos Masa Belanda	Mem pura	Benteng Hilir	Bangunan	Kolonial	Kurang Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
16	Rumah Pejabat Militer Kelas Ke - IV	Mem pura	Benteng Hilir	Bangunan	Kolonial	Kurang Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022
17	Bendera Kerajaan Siak	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Kurang Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022
18	Komet	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022
19	Payung Kerajaan Siak	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022
20	Pedupaan untuk Membakar Setinggi Kerajaan Siak	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022
21	Gendang Nobat Kerajaan Siak	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Kurang Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022
22	Patung Wajah Sultan Syarif Hasyim	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022
23	Patung Ratu H.M Wilhelmina	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022

NO	Nama CB	Kec	Kelurahan/ Desa	Klasifikasi CB	Latar Belakang Budaya	Kondisi	Fungsi Eksisting	SK Penetapan Provinsi
24	Istana Peraduan Sultanah Latifah	Siak	Kampung Dalam	Bangunan	Islam	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7744/XII/2023
25	Madrasatun Nisa'	Siak	Kampung Dalam	Bangunan	Islam	Terawat	Display Arsip	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7745/XII/2023
26	Cermin Kristal Koleksi Istana Asserayyah Al Hasyimiah	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7748/XII/2023
27	Kursi Singgasana Kesultanan Siak Sri Indrapura	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7749/XII/2023
28	Kapal Kato	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7750/XII/2023
29	Lukisan Gading Koleksi Istana Asserayyah Al Hasyimiah	Siak	Kampung Dalam	Benda	Kolonial	Kurang Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7751/XII/2023
30	Pos Jaga Istana Asserayyah Al Hasyimiah	Siak	Kampung Dalam	Struktur	Islam	Terawat	Objek Wisata	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7754/XII/2023
31	Seperangkat Meja Jamuan Kristal Koleksi Istana Asserayyah Al Hasyimiah	Siak	Kampung Dalam	Benda	Islam	Terawat	Koleksi Istana	Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7755/XII/2023

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2.2.2.8 Pangan (PPH dan Rawan Pangan)

PPH ketersediaan Kabupaten Siak pada tahun 2023 adalah 91,00. Kelompok pangan yang mempunyai kelebihan ketersediaan sehingga menghasilkan skor AKE yang melebihi skor PPH maksimum adalah kelompok padi-padian. Sedangkan kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah mempunyai ketersediaan masih kurang sehingga menghasilkan skor AKE yang lebih rendah dari skor PPH maksimum.

Ketersediaan energi di Kabupaten Siak sebesar 1.651 kkal/kapita/hari. Kelompok bahan pangan dengan ketersediaan tinggi menyumbangkan energi yang juga tinggi. Urutan sumbangan energi adalah padi-padian > minyak dan lemak > pangan hewani > umbi-umbian > buah/biji berminyak > sayur dan buah > gula > kacang-kacangan.

Tabel 2. 67
Skor PPH Pangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	1,32	1,10	1,15	1,27	1,50

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
3	Pangan Hewani	22,45	24,00	24,00	24,00	24,00
4	Minyak dan Lemak	5,00	5,00	4,90	4,90	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Kacang-kacangan	9,51	9,20	8,85	9,00	8,60
7	Gula	1,15	2,00	1,89	1,96	2,00
8	Sayur dan Buah	21,34	22,50	21,74	22,62	23,90
	Skor PPH	86,77	89,80	88,53	89,75	91,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak 2023

Ketersediaan pangan di Kabupaten Siak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, *stock*, produksi dan produktivitas pangan. Di beberapa desa pada Kabupaten Siak ada yang mengalami kerawanan pangan, berikut data rawan pangan di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 68
Daerah Rawan Pangan Kabupaten Siak

Nama Kecamatan	Nama Desa		Kategori
Sungai Apit	1	Penyengat	Prioritas I : Terindikasi Sangat Rentan Tidak Tahan Pangan
	2	Teluk Lanus	
	3	Mengkapan	Prioritas 3
	4	Sungai Rawa	
	5	Kayu Ara Permai	
	6	Rawa Mekar Jaya	
Minas	7	Mandi Angin	Prioritas 2
Sungai Mandau	8	Lubuk Uambut	Prioritas 2
	9	Tasik Betung	
	10	Teluk Lancang	Prioritas 3
Kandis	11	Sungai Gondang	Prioritas 2
	12	Libo Jaya	Prioritas 3
Koto Gasib	13	KerANJI Guguh	Prioritas 3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, 2023

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada tahun 2023, Kabupaten Siak memiliki skor IDSD sebesar 2,89 dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Riau sebesar 3,25. Akan tetapi, nilai

IDSD Kabupaten Siak merupakan peringkat keenam tertinggi di Provinsi. Indeks daya saing ini menunjukkan maju dan produktivitasnya sebuah daerah dari segala sektor. Indeks Daya Saing Daerah terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Secara rinci capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 pada dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 69
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022-2023

Tahun	Uraian	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
		Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	4,26	1,65	3,10	3,76	3,92	3,36	0,23	2,38	3,54	3,58	5,00	0,39	2,93 (Tinggi)
2023		4,39	2,55	4,23	2,93	3,95	3,75	0,36	3,58	1,04	4,88	2,78	0,27	2,89 (Tinggi)

Sumber : Brin, 2024

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 Sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (17) Jasa lainnya.

Perkembangan PDRB Kabupaten Siak selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan kenaikan dari 84.262,91 Miliar Rupiah pada tahun 2018 menjadi 107.025,75 Miliar Rupiah pada tahun 2022. Kontribusi terbesar PDRB pada sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 38,75, disusul sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,88. Perkembangan nilai PDRB secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 70
Perkembangan PDRB Kabupaten Siak 2019-2023 Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Nilai / Kontribusi	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Nilai Rupiah	16.173,15	18.031,65	21.129,99	23.420,20	25.490,83
	Kontribusi Kategori	19,70	23,42	23,57	21,89	23,19
Pertambangan dan Penggalian	Nilai Rupiah	26.323,14	17.547,12	22.623,56	22.623,56	28.301,24
	Kontribusi Kategori	32,06	22,79	25,24	21,14	25,75
Industri Pengolahan	Nilai Rupiah	30.350,43	32.495,75	36.301,22	41.470,50	43.920,38
	Kontribusi Kategori	36,97	42,20	40,50	38,76	39,96
Pengadaan Listrik dan Gas	Nilai Rupiah	7.964,90	8.600,80	9.152,90	10.406,80	11.901,65
	Kontribusi Kategori	9,70	11,17	10,21	9,73	10,83
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Nilai Rupiah	3.163,80	3.216,50	3.336,90	3476,5	3.770,66
	Kontribusi Kategori	3,85	4,18	3,72	3,25	3,43
Konstruksi	Nilai Rupiah	4.408,86	4.284,42	4.585,95	5.198,23	6.101,97
	Kontribusi Kategori	5,37	5,56	5,12	4,86	5,55
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai Rupiah	1.912,23	1.757,85	1.942,26	2.290,45	2.503,13
	Kontribusi Kategori	2,33	2,28	2,17	2,14	2,28
Transportasi dan Pergudangan	Nilai Rupiah	102,21	107,07	112,34	136,02	154,26
	Kontribusi Kategori	0,12	0,14	0,13	0,13	0,14
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Nilai Rupiah	42,79	37,45	42,4	49,73	54,17
	Kontribusi Kategori	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Informasi dan Komunikasi	Nilai Rupiah	203,97	221,32	235,29	253,09	272,32
	Kontribusi Kategori	0,25	0,29	0,26	0,24	0,25
Jasa Keuangan dan Asuransi	Nilai Rupiah	321,39	331,71	356,91	398,99	420,66
	Kontribusi Kategori	0,39	0,43	0,40	0,37	0,38
Real Estate	Nilai Rupiah	375,89	384,07	398,83	431,71	463,18
	Kontribusi Kategori	0,46	0,50	0,44	0,40	0,42
Jasa Perusahaan	Nilai Rupiah	5,23	4,15	4,21	5,02	5,53
	Kontribusi Kategori	0,01	0,01	0,005	0,005	0,01
Administrasi Pemerintahan,	Nilai Rupiah	680,25	670,66	690,35	742,12	797,12

Lapangan Usaha	Nilai / Kontribusi	2019	2020	2021	2022	2023
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Kontribusi Kategori	0,83	0,87	0,77	0,69	0,73
Jasa Pendidikan	Nilai Rupiah	465,19	485,64	521,62	555,09	582,89
	Kontribusi Kategori	0,57	0,63	0,58	0,52	0,53
Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	Nilai Rupiah	191,35	219,35	240,44	250,46	274,60
	Kontribusi Kategori	0,23	0,28	0,27	0,23	0,25
Jasa Lainnya	Nilai Rupiah	537,9	417,16	438,25	520,64	565,43
	Kontribusi Kategori	0,66	0,54	0,49	0,49	0,51
PDRB		82.105,13	77.007,22	89.636,13	106.995,07	109.923,37

Sumber : BPS Kabupaten Siak Dalam Angka 2023

2.3.1.2 PDRB per Kapita

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 71
PDRB per Kapita ADHB dan ADHK dengan Migas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB-ADHB Dengan Migas	PDRB-ADHK Dengan Migas	PDRB-ADHB Perkapita	PDRB-ADHK Perkapita
2019	170.763,48	110.992,50	82.105,13	53.366,53
2020	168.914,37	116.937,04	77.007,22	53.311,01
2021	193.401,40	117.684,10	89.636,13	54.543,29
2022	227.499,52	120.359,14	106.995,07	56.605,99
2023	230.416,44	123.819,95	109.923,37	59.070,04

Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023; PDRB Menurut Lapangan Usaha, BPS, 2023

Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Siak tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel di atas. Selama periode tersebut, PDRB-ADHB perkapita menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 82.105,13 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 109,923,37 miliar pada tahun 2023. PDRB-ADHK perkapita juga menunjukkan peningkatan dengan angka dari Rp. 53.366,53 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 59.070,04 miliar pada tahun 2023.

2.3.1.3 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Perhitungan terhadap jumlah pendapatan daerah meliputi beberapa sumber bukan hanya dari pendapatan asli daerah di antaranya hasil pajak daerah. hasil retribusi daerah. hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan hasil persentase pendapatan asli daerah yang di konversikan kepada jumlah pendapatan daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 meningkat dari 11.88 menjadi 27.65 atau naik sebesar 15.81 persen.

Tabel 2. 72
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019		2020		2021		2022		2023	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
Pendapatan	2.225.933	11.88	1.933.247	12.57	2.231.375	13.87	1.944.803	10.69	2.721.267	27.65
PAD	264.366		265.949		309.653		207.970		752.369	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023

2.3.1.4 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka semakin rendah proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan pokok (pangan) atau semakin tinggi proporsi pendapatan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan bukan pokok (non pangan).

Tabel 2. 73
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak

Kab/ Kota	Jumlah RT	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)			PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)		
		Total Pengeluaran RT	Rp/RT	Rp/ Kapita	Total Pengeluaran RT	Rp/RT	Rp/ Kapita
Siak	114,485	10.332.744	90,17	22,54	5.741.873	50,15	12,54
Riau	1,598,522	12.515.855	89,08	22,27	7,461,376	53,49	13,37

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2021 dan Olahan)

Pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga dengan harga berlaku per kabupaten sekitar tahun 2020 menunjukkan bahwa Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga sebesar Rp.90.17 juta/RT/tahun, sedangkan pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga dengan harga konstan per kabupaten sekitar tahun 2020 menunjukkan bahwa Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga sebesar Rp.50,15 juta/RT/tahun.

2.3.1.5 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan tentang kemampuan suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita,

pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani dibandingkan dengan daerah sekitar. Berikut data perkembangan pengeluaran RT Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 :

Tabel 2. 74
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Konsumsi RT ADHB					
1	Pengeluaran Konsumsi RT (jt Rupiah)	20.547.580	20.686.820	21.834.220	24.199.497	26.092.565
2	Jumlah Penduduk	489.996	457.940	466.683	477.550	477.064
3	Rasio Konsumsi Per Kapita	48.05	45.35	46,78	50,67	
B	Konsumsi RT ADHK					
1	Pengeluaran Konsumsi RT (jt Rupiah)	11.521.935	11.344.286	11.712.080	12.267.540	12.792.338
2	Jumlah Penduduk	489.996	457.940	466.683	477.550	477.064
3	Rasio Konsumsi Per Kapita	26.79	24.77	25,50	25,68	

Sumber: BPS Kabupaten Siak (PDRB Kabupaten Siak Menurut Pengeluaran 2023 dan Olahan)

Pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku per kabupaten tahun 2021, menunjukkan bahwa Kabupaten Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi ketiga sebesar Rp.21,8 juta/RT/tahun setelah Kabupaten Kampar dan Bengkalis, begitu juga halnya dengan Pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan per kabupaten sekitar tahun 2021, menunjukkan bahwa Kabupaten Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi ketiga setelah Kampar dan Bengkalis.

2.3.1.6 Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani, NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya, Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (It) dan indeks yang harus dibayar (Ib), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani, Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan adalah NTP

yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian, NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 1993, $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Tabel 2. 75
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks yang diterima petani (It)	115,98	102,80	176,34	92,34	76,89	136,59
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	114,56	101,46	175,58	100,25	80,42	136,2
	NTP	174,17	176,54	177,31	171,86	164,32	164,70

Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai NTP pada Tahun 2024 dari tahun sebelumnya sebesar 0,38. Hal ini menerangkan adanya peningkatan subsektor produktivitas pertanian, baik dalam bentuk dukungan banyak pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani. Subsektor Tanaman perkebunan rakyat merupakan subsektor dengan NTP tertinggi dibandingkan 4 (empat) subsektor penyusun NTP lainnya. Adapun kenaikan dan penurunan NTP Kabupaten Siak dipengaruhi oleh :

1. Pada saat terjadi kenaikan harga pupuk khususnya untuk komoditi Sawit hal tersebut menyebabkan biaya produksi tinggi, hal ini menyebabkan penurunan NTP Pada Tahun 2023. Karena Pada Tahun 2023 pupuk bersubsidi untuk komoditi sawit tidak diperbolehkan lagi oleh Pemerintah Pusat, hal ini menyebabkan biaya produksi tinggi dan pendapatan petani berkurang;
2. Pada Tahun 2024 produksi komoditi sawit meningkat, sehingga NTP meningkat namun tidak signifikan;
3. Pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan NTP dibandingkan tahun 2017 s.d 2020 karena banyak bantuan yang diberikan pemerintah saat itu termasuk pupuk bersubsidi untuk komoditi sawit sehingga pendapatan petani meningkat karena biaya produksi rendah;
4. Kenaikan NTP Tanaman Pangan disebabkan adanya bantuan pupuk bersubsidi, bantuan pemerintah lainnya (benih, pupuk dan alsintan), sehingga menekan biaya

produksi dan naiknya harga gabah, meskipun produksi padi menurun dibandingkan dengan tahun 2023;

5. Peningkatan NTP Tanaman Hortikultura disebabkan meningkatnya harga jual dan penerimaan/pendapatan petani khususnya komoditi nenas;
6. Peningkatan NTP Perkebunan disebabkan menurunnya biaya produksi karena adanya Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR);

2.3.2 Daya Saing Sumberdaya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

2.3.2.1.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan penilaian mendasar kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah dan merupakan modal dasar individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. UNESCO mengartikan melek huruf sebagai kemampuan individu untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi yang lebih lanjut. Berikut capaian angka melek huruf di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 76
Angka Melek Huruf Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melek Huruf	99,68	99,67	99,69	99,68	99,68

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

Berdasarkan angka melek huruf Kabupaten Siak dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Faktor perubahan ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kemampuan mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

Tabel 2. 77
Angka Melek Huruf Berdasarkan Usia Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. perempuan dan laki-laki	100	100	100	100	100
2	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,67	99,79	99,68	99,68	99,19

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023

2.3.2.1.2 Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selama tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Siak memiliki tren peningkatan. Capaian tersebut diiringi dengan upaya peningkatan angka Rata Lama Sekolah di atas 9 tahun atau 12 tahun sebagai prioritas pembangunan di bidang sumber daya manusia kedepannya. Karena melalui program dan kegiatan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dan didukung pendidikan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktifitas tenaga kerja dan wilayah. Berikut perkembangan RLS Kabupaten Siak:

Tabel 2. 78
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Rata Lama Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Siak	9.65	9.66	9.86	9,87	9,88
2	Prov. Riau	9.03	9.14	9.19	9,22	9,32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak, 2023; BPS Prov. Riau, 2023

2.3.2.1.3 Angka Literasi/Numerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 11 yang menyatakan bahwa kualitas hasil belajar peserta didik mencakup Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Berikut ini disajikan angka literasi/numerasi Kabupaten Siak dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2. 79
Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Siak Tahun 2020-2024

Kelompok Indikator	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kemampuan Literasi					
SD	na	na	58,62	66,99	70,7
SMP	na	na	60,05	67,05	72,12
Kemampuan Numerasi					
SD	na	na	32,07	52,21	58,28
SMP	na	na	40,34	40,85	64,64

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak, 2024

2.3.2.1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Perhitungan APK memperhitungkan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Dengan menghitung nilai APK, kita dapat melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, APK PAUD Tahun 2019-2023 mengalami penurunan dari 52,58% pada tahun 2019 menjadi 52,05 pada tahun 2023. Namun, APK SD/MI tahun 2018 mengalami penurunan dari 107,24 menjadi 104,44 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan dampak dari masih adanya masyarakat yang menyekolahkan anaknya di luar usia sekolah. Sedangkan APK SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2023 dengan angka 107,18 pada tahun 2019 menjadi 93,37 pada tahun 2023. Berikut data APK Kabupaten Siak pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 80
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	APK PAUD	52,28	53,41	42,80	49,32	
2.	APK SD/MI	107,24	105,13	104,66	104,15	
3.	APK SMP/MTs	107,18	97,3	100,65	97,48	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023

2.3.2.1.5 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Dengan menghitung nilai APM, kita dapat melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, nilai APM pada SD/MI tahun 2019-2023 mengalami penurunan dari 95,34% pada tahun 2019 menjadi 95,03% pada tahun 2023. Kemudian untuk nilai APM SMP/MTS pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 81,25% menjadi 81,99% pada tahun 2023. Penyebab terjadinya penurunan dikarenakan terdapat siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan baik SD/SMP tidak sesuai dengan kelompok usia menurut jenjang pendidikan tersebut. Terdapat Penduduk di Kabupaten Siak yang bersekolah di luar Kabupaten Siak dan masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SD. Berikut data APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Siak seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 81
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,34	95,71	91,10	89,08	95,03
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	81,25	81,28	78,50	70,16	81,99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023

2.3.2.1.6 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS berarti semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun tidak selalu diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan data APS Kabupaten Siak, jenjang pendidikan SD/MI tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan yakni dari 114% menjadi 98,20% pada tahun 2023. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 86% pada tahun 2019 dan 87,73% pada tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya, berikut tabel APS Kabupaten Siak untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs:

Tabel 2. 82
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	APS SD/MI/Paket A	114	96	99	96,43	98,20
2	APS SMP/MTs/Paket B	86	100	100	76,78	87,73

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

2.3.2.1.7 Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) merupakan proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan satu jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data angka putus sekolah Kabupaten Siak tingkat SD/MI tahun 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan dari 0,37% meningkat menjadi 0,55%. Sedangkan APM SMP/MTS juga mengalami peningkatan dari 0,67% menjadi 0,84%. Ada banyak faktor penyebab kenaikan angka putus sekolah, tidak hanya alasan keadaan status ekonomi keluarga menjadi penyebab putus sekolah, namun adanya anak berkebutuhan khusus, anak yang tidak ingin bersekolah, anak telah bekerja dan menikah, ada kendala akses transportasi serta terkendala administrasi persyaratan untuk melanjutkan sekolah. Berikut data tabel APtS Kabupaten Siak:

Tabel 2. 83
Angka Putus Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	0,37	0,54	0,52	0,61	0,25
2	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	0,67	0,85	0,52	1,12	0,22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

2.3.2.1.8 Angka Kelulusan

Angka Kelulusan merupakan persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Indikator dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan disekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Berdasarkan data sekolah Kabupaten Siak, Angka Kelulusan tingkat SD/MI meningkat dari 99,76% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2023. Sedangkan Angka Kelulusan SMP/MTs mengalami penurunan dari 97,16% pada tahun 2019 menjadi 10,00% pada tahun 2023. Berikut data tabel Angka Kelulusan Kabupaten Siak:

Tabel 2. 84
Angka Kelulusan Kabupaten Siak Tahun 2019- 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,76	99,77	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97,16	99,62	99	99,56	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

2.3.2.1.9 Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data angka melanjutkan pendidikan Kabupaten Siak tingkat SD/MI ke SMP/MTs menurun dari angka 96,45% menjadi 95,93% pada tahun 2023. Namun, untuk angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA juga mengalami kenaikan dari angka 82,18% menjadi 96,95% pada tahun 2023. Berikut data tabel angka melanjutkan tingkat SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA Kabupaten Siak:

Tabel 2. 85
Angka Melanjutkan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,45	96,14	98,2	92,00	95,93
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	82,18	86,53	86,54	80,81	98,95

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

2.3.2.1.10 Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik

Berdasarkan data sekolah pendidikan kondisi bangunan baik tingkat SD/MI Kabupaten Siak Tahun 2019 ke 2023 mengalami kenaikan dari 93,29 pada tahun 2019 menurun menjadi 76,31 pada tahun 2023. Untuk tingkat SMP/MTs juga menurun dari 88,06 pada tahun 2019 menjadi 74,65 pada tahun 2023.

Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Ketersediaan sekolah ditunjukkan dengan banyaknya ruang kelas yang tersedia untuk menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dengan rasio.

Tabel 2. 86
Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	93,29	92,94	92,95	93,95	
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	88,06	87,06	87,07	88,08	
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	44,03	44,40	46,27	46,67	
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	59,56	54,64	55,72	53,52	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota maka perlu memperhatikan ketersediaan sekolah pada setiap peserta didik. Jumlah peserta didik dalam setiap rombel SD/MI sebesar 24 orang sedangkan jumlah peserta didik dalam setiap rombel SMP/MTs sebesar 38 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan rombel pendidikan dasar sudah memenuhi standar pelayanan minimal.

Tabel 2. 87
Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	JENJANG PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023
A	Rasio SD/MI	44,03	44,40	46,27	46,67	
1	Jumlah sekolah SD/MI	258	265	272	279	
2	Jumlah Penduduk Usia SD (7-12 Tahun)	58.601	59.690	58.782	59.779	
3	Jumlah rombel	2437	2455	2481	2433	

No	JENJANG PENDIDIKAN	2019	2020	2021	2022	2023
4	Jumlah Peserta didik (Murid SD)	58.926	57.662	61.521	61.994	
5	Jumlah peserta didik dalam setiap rombel	23,77	23,49	24,79	24,33	
B	Rasio SMP/MTs	59,56	54,64	55,72	53,52	
1	Jumlah Penduduk Usia SMP (13-15 Tahun)	25.687	28.549	28.175	29.896	
2	Jumlah sekolah SMP/MTs	153	156	157	160	
3	Jumlah rombel	824	807	800	783	
4	Jumlah Peserta didik (Murid SMP/MTs)	13.540	27.778	28.358	27.611	
5	Jumlah peserta didik dalam setiap rombel	31,17	35,37	35,21	38,18	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023

2.3.2.1.11 Rasio Guru Terhadap Murid

Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu rasio antara guru dan murid haruslah berada dalam jumlah yang ideal.

Tabel 2. 88
Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Siak 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	SD/MI					
1	Jumlah Guru	3.693	3.417	3.587	3.390	
2	Jumlah Murid	62.843	57.662	57.662	61.994	
	Rasio guru/murid	17,15	17,20	17,21	18,28	
	SMP/MTs					
1	Jumlah Guru	1.700	1.723	2.057	2.464	
2	Jumlah Murid	27.532	21.651	21.651	27.611	
	Rasio guru/murid	12.51	12.57	12.57	11,20	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. 2023

Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai tingkatan pendidikan. Berdasarkan data rasio guru dan murid sekolah pendidikan SD sudah hampir mencukupi jika melihat dari angka ideal rasio guru dan murid adalah 1:20. Dan untuk tingkat SMP, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2.3.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Upaya peningkatan literasi masyarakat mencakup peningkatan frekuensi membaca, kunjungan ke perpustakaan, hingga akses internet untuk pengetahuan, Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kabupaten siak dihitung dengan 5 indikator, selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 89
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Siak Tahun 2023

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk			
		koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai di wilayahnya (dalam eksemplar)	283.952	x 100%	60,35%
		jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	477.064		
	2	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat			
		Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	185.590	x 100%	39,45%
		jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	477.064		
	3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk			
		Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	653	x 100%	0,14%
		dibagi jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	477.064		
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan			
	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	62	x 100%	16,23%	
	dibagi jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya	382			
	5	Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat	13.815		
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6	Jumlah naskah kuno yang diakuisi sisi/dialihkan media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	2.500		
	7	Jumlah naskah kuno yang dialihkan aksara dan dialih Bahasa			
	8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	233		

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak, 2023

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka

meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

2.3.2.4 Angka Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umurnya sudah melewati masa pensiun). Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel 2. 90
Rasio Ketergantungan Kabupaten Siak Tahun 2019– 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	0-4 Tahun	34.450	34.989	34.846	28.276	37.285
2	5-9 Tahun	47.385	48.618	48.403	46.490	47.753
3	10-14 Tahun	47.631	49.102	49.893	50.628	51.081
4	15-19 Tahun	33.413	39.563	40.373	41.702	39.083
5	20-24 Tahun	37.520	39.850	41.608	44.702	45.695
6	25-29 Tahun	34.893	35.946	37.580	39.093	39.402
7	30-34 Tahun	35.237	35.544	35.526	35.575	35.921
8	35-39 Tahun	36.744	36.478	37.822	36.871	37.249
9	40-44 Tahun	34.491	35.402	35.523	37.310	37.510
10	45-49 Tahun	30.409	30.980	32.410	33.250	33.301
11	50-54 Tahun	23.389	24.671	25.830	28.877	28.714
12	55-59 Tahun	14.587	15.694	17.223	20.293	20.077
13	60-64 Tahun	9.068	9.965	10.336	12.204	12.042
14	65 Tahun Lebih	10.875	10.761	11.938	15.214	15.056
Rasio Ketergantungan		45,97%	48,43%	47,17%	46,16%	45,65%

Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tahun 2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Rasio Elektrifikasi

Selama periode tahun 2019-2023, penyediaan listrik oleh PT. PLN di Kabupaten Siak terus meningkat dan dilakukan dengan 3 cara yaitu produksi sendiri, beli dan diterima dari unit lain. Sumber listrik terbesar dengan jumlah yang terus meningkat diterima dari unit lain berikut data Rasio elektrifikasi Kabupaten Siak sepanjang tahun 2019 - 2023 :

Tabel 2. 91
Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	RE (%)	95,33	95,34	95,34	95,34	99,99%
2	Desa/Kelurahan teraliri PLN	131	131	131	131	131
3	Ratio Desa PLN	n/a	n/a	n/a	100	100

Sumber: *Database elektrifikasi Provinsi Riau, 2023*

2.3.3.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Urusan Jalan, Daya Air, Sub Urusan Keciptakarya, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut data proporsi panjang jalan di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 92
Proporsi Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional di Kabupaten Siak 2023

	Keterangan	Panjang Jalan
1	Jaringan Jalan Nasional	172,12
2	Jaringan Jalan Provinsi	119,34
3	Jalan Kabupaten	2.880,19
	Jumlah	3.171,65

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat. serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini. perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berikut data panjang jalan di Kabupaten Siak menurut jenis permukaan:

Tabel 2. 93
Panjang Jalan di Kabupaten Siak Menurut Kondisi Jalan (Km) Tahun 2019-2023

Jenis Permukaan	Kondisi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Baik	1112.05	1359.40	1.012,40	1163,23	1176,68

Jenis Permukaan	Kondisi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Gabungan (Aspal. Kerikil. Tanah dan Beton)	Sedang	254.96	69.60	386,55	269,35	275,07
	Rusak Ringan	358.64	316.83	380,72	343,83	445,00
	Rusak Berat	1154.55	1134.36	1.100,52	1103,78	983,44
	Jumlah	2.880.19	2.880.19	2.880.19	2.880.19	2.880.19

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- Mantap Sempurna.** adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada). atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.
- Mantap Marginal.** adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada. atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.
- Tidak Mantap.** adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Berikut disajikan data kondisi jalan kabupaten siak tahun 2023 kondisi mantap berdasarkan seluruh ruas jalan:

Tabel 2. 94
Kondisi Jalan di Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		Km	%		Km	%
1	Mantap	1451,75	50,40	Baik	1176,68	40,85
				Sedang	275,07	9,55
2	Tidak Mantap	1428,44	49,60	Rusak Ringan	445,00	15,45
				Rusak Berat	983,44	34,14

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

Pembangunan jalan Kabupaten Siak yang telah termasuk dalam kondisi baik serta peningkatan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 95
Kondisi Jalan di Kabupaten Siak dari Jenis Permukaan Tahun 2019-2023

No	JENIS PERMUKAAN	PANJANG JALAN (KM)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aspal	969.31	962.60	953.09	984,494	1.018,48
2	Beton	443.02	479.45	491.48	490,908	602,261
3	Kerikil/base	443.02	705.41	482.61	654,788	629,788
4	Tanah	1024.85	732.73	753.02	750,00	629,660
TOTAL		2.880.19	2.880.19	2.880.19	2.880.19	2.880.19

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

Perhitungan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk adalah menginformasikan bahwa tingkat kepadatan penduduk per satu kilometer jalan yang terbangun. dari data tersebut belum mencerminkan angka kepadatan penduduk per satu kilometer ruas jalan terbangun yang berjumlah 157 jiwa/ km. namun tetap diperlukannya perhatian pemerintah dalam menjaga keselamatan pengendara seperti memasang rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 2. 96
Rasio Panjang Jalan Kabupaten Siak 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0.67	0.63	0.63	0.63	0.60

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

2.3.3.3. Transportasi

Untuk meminimalisir terjadinya laka lantas, pemerintah daerah memfasilitasi dengan rambu-rambu yang menjadi petunjuk bagi pengguna jalan dalam berkendara, Adapun tujuan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan bertujuan (1) peningkatan pengamanan dan keselamatan jalan, (2) menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/ kendaraan bermotor, dan (3) menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ,

Tabel 2. 97
Jumlah Pemasangan Rambu - rambu di Kabupaten Siak dari Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan Kabupaten					
	- Pengadaan Rambu/Tahun	20	20	100	100	432
	- Pemasangan Rambu-rambu	20	20	100	100	432
	- Total Pengadaan Rambu	2.816	2.836	2.936	3.036	3.468

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tahun, 2023

Jumlah pemasangan rambu di sepanjang jalan kabupaten pada tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pemasangan rambu di jalan kabupaten dengan persentase peningkatan pemasangan rambu sebanyak 2,3 persen pertahun dan total pemasangan rambu dari total pengadaan rambu-rambu sampai tahun 2023 sebanyak 100 persen,

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Siak terutama transportasi darat dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan

kenyamanan berlalu lintas. Data capaian indikator pembangunan dan layanan publik di dinas perhubungan selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 98
Data Capaian Indikator Pembangunan Dan Layanan Publik Kabupaten siak

NO	URAIAN	CAPAIAN INDIKATOR				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di kabupaten Siak	1 : 31,90	1 : 31,12	1 : 31,97	1 : 31,93	
2.	Data jumlah kecelakaan lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan	-	-	-	333	306
3.	Jumlah arus penumpang angkutan umum melalui terminal, pelabuhan, dan bandara baik penumpang masuk (datang) maupun keluar (berangkat) di Kabupaten Siak	358.043	151.031	95.315	41.988	73.624
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum dan biaya pengujian di kabupaten siak	Lama Pengujian: 55 Menit	Lama Pengujian: 55 Menit	Lama Pengujian: 55 Menit	Lama Pengujian: 55 Menit	Lama Pengujian: 55 Menit
		Biaya Pengujian: Rp. 31.500 - Rp. 56.000	Biaya Pengujian: Rp. 31.500 - Rp. 56.000	Biaya Pengujian: Rp. 75.000 - Rp.165.000	Biaya Pengujian: Rp. 75.000 - Rp.165.000	Biaya Pengujian: Rp. 75.000 - Rp.165.000
5.	Izin trayek dan izin usaha angkutan yang telah dikeluarkan kabupaten siak	-	-	-	-	234
6.	Jumlah Angkutan Umum	-	-	50	45	35
7.	Pelanggaran over dimension over loading (ODOL) di Kabupaten Siak	30	0	0	40	48

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tahun, 2023, Polres Siak,2023

Penurunan angkutan penumpang dan kepemilikan izin trayek disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil, kemudahan akses transportasi. Adanya penyesuaian kepemilikan yang semula milik perorangan menjadi badan hukum dan pembatasan usia kendaraan angkutan umum serta pembaruan sistem pelayanan perizinan menjadi faktor penurunan jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek di Kabupaten Siak. Untuk mengatasi keterbatasan layanan angkutan yang ada di Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Siak telah menyediakan angkutan perintis namun hanya melayani rute Sungai apit - bunga raya - minas sebanyak 2 unit. Diharapkan dengan Angkutan perintis tersebut akan membantu pelayanan masyarakat di bidang transportasi yang nyaman, murah dan representative guna mendukung angkutan yang terintegrasi.

2.3.3.4. Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, pelaksanaannya dimulai pada tahun 2018, Berimbas pada penghitungan Indeks KI baru dilakukan pada tahun 2019 dengan kondisi awal penilaian keterbukaan informasi di Kabupaten Siak adalah 68 persen (cukup informatif), Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 74 persen (cukup informatif), Cakupan layanan jaringan telekomunikasi per desa Kabupaten Siak tahun 2019 - 2023, menunjukkan bahwa dari 131 Desa/Kelurahan masih terdapat 30 Desa yang belum terlayani jaringan telekomunikasi (*blank spot*) dan terdapat 101 desa yang sudah terjangkau jaringan internet,

Tabel 2. 99
Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Keterbukaan Informasi (%)	%	68	78	87	74	n/a
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	76	77	79	79	80
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	87	83	84	84	86
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	65	69	71,04	71,04	74

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak tahun 2023

Penyebarluasan informasi melalui internet merupakan salah satu langkah efektif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak, Berdasarkan data dibawah ini dapat dilihat peningkatan penggunaan jaringan internet ke rumah dari tahun 2019 sebesar 65,00 meningkat pesat menjadi 74 pada tahun 2023, Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas dalam jaringan yang menambah jumlah rumah dengan akses internet,

Tabel 2. 100
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

Lokasi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Siak	65	69	71,04	71,04	74

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

Tabel 2. 101
Akses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Lokasi	Tahun 2023		
		Belum Ter layani Telekomunikasi	Jumlah Desa	%
1	Siak	0	8	0,00
2	Sungai Apit	5	15	33,33

No	Lokasi	Tahun 2023		
		Belum Ter layani Telekomunikasi	Jumlah Desa	%
3	Minas	2	6	33,33
4	Tualang	2	9	22,22
5	Sungai Mandau	3	9	33,33
6	Dayun	1	11	9,09
7	Kerinci Kanan	3	12	25,00
8	Bunga Raya	0	10	0,00
9	Koto Gasib	3	11	27,27
10	Kandis	3	11	27,27
11	Lubuk Dalam	0	7	0,00
12	Sabak Auh	3	8	37,50
13	Mempura	1	8	12,50
14	Pusako	1	7	14,29
	Jumlah	27	132	20,45

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak, 2023

Tabel 2. 102
Indikator Capaian Pembangunan Kabupaten Siak

No	Indikator Capaian	Capaian Indikator					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi	43	43	43	43	43	
2	Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Siak	11	12	18	51	52	
3	Data Kebutuhan Jaringan Internet	Dianggarkan Dimasing-masing OPD					
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	baru kan dimunculkan di 2025
5	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Indikator Jaringan telekomunikasi terutama daerah- daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi (Blank Spot Area)	n/a	45	40 Desa / Kampung	35 Desa / Kampung	27 Desa / Kampung	
7	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah.	n/a	n/a	0	29	29	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak, 2023

Data pada tabel di atas di kawasan desa yang belum ter layani telekomunikasi tersebut terdapat beberapa titik lokasi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanan telekomunikasi dengan memanfaatkan radius jangkauan sinyal pada Base

Transceiver Station (BTS) atau sering disebut Menara Telekomunikasi yang berada di desa lain yang masih dalam satu kawasan kecamatan yang sama,

2.3.3.5. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sub sektor Sanitasi meliputi penanganan persampahan, air limbah dan drainase. Pembangunan drainase Kabupaten Siak selain merupakan bagian dari sub sektor sanitasi juga sebagai sarana dan prasarana penanggulangan banjir/ genangan kawasan perkotaan. Berikut data perumahan bersanitasi layak Kabupaten Siak :

Tabel 2. 103
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Kabupaten Siak tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	Rumah tangga	118.230	109.979	112.580	115.198	117.834
2	Jumlah RT mendapat akses air limbah	Rumah tangga	98.355	108.331	108.462	108.962	110.984
3	Persentase rumah tangga bersanitasi Layak	Persen	83,19	98,50	96,34	94,59	94,19
4	Persentase rumah tangga bersanitasi Aman	Persen	na	na	na	na	4,24%

Sumber: Dinas PUTARUKIM Kab. Siak tahun 2023

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Kabupaten Siak Tahun 2023 adalah 94,19%, yaitu perbandingan antara Jumlah Rumah Tangga mendapat akses air limbah 110.984 dibagi dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 117.834.

Persentase Rumah Tangga bersanitasi Aman kabupaten Siak baru berjumlah 4,24% pada tahun 2023, karena tahun 2019-2023 belum ada penanganan.

2.3.3.6. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Penanganan drainase bertujuan mengurangi permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Siak, diperlukan koordinasi dalam rangka pencapaian penyelesaian permasalahan banjir/ genangan pada wilayah perkotaan, pada tahun 2023 persentase drainase dalam kondisi baik mengalami kenaikan menjadi 100,00% yang mana sebelumnya pada tahun 2022 persentase drainase dalam kondisi baik adalah 82,23%.

Tabel 2. 104
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kabupaten Siak

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	81,68	83,16	81,15	82,23	100,00

Sumber: Dinas PU, TaRu, PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

2.3.3.7. Persentase Pembangunan Turab di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Dalam rangka penanggulangan banjir Pemerintah Kabupaten Siak membangun infrastruktur sarana dan prasarana penunjang pengendalian banjir sepanjang tahun 2019-2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 105
Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Jenis Bangunan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Turap Konstruksi Beton (<i>Sheet Pile</i> dan Tiang Pancang)	7.774	7.774	7.774	7.774	7.774
2	Turap Konstruksi <i>Amour Rock</i> (struktur pemecah Gelombang)	1.500	1.500	1500	1500	1500
3	Turap Konstruksi <i>Concrete Revertment Matrass</i> (CRM)	620	620	620	620	620
4	Leoning Konstruksi Matrass	566	566	566	566	566
5	Konstruksi Batu Bronjong	9.578	9.578	9578	9578	9578
6	Leoning Konstruksi Beton Bertulang	62.598	63.025	63.570	63.570	63.570

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

2.3.3.8. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Salah satu infrastruktur sumber daya air dalam mencapai ketahanan pangan untuk mencapai ketersediaan air di lahan basah/sawah ialah layanan penyediaan air irigasi. penyediaan layanan irigasi di Kabupaten Siak dibangun melalui dana APBD Kabupaten Siak, APBD Provinsi Riau dan juga dana APBN. berikut disampaikan tabel daerah irigasi/rawa Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi:

Tabel 2. 106
Daerah Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi Rawa	Jumlah DIR	Luasan (Ha)	Kondisi Baik	Presentase (%)
1	Kewenangan Pemerintah	1	5.476	5.476	100.00
	Dir Siak Kiri Paket B.C.D		5.476	5.476	100.00
2	Kewenangan Pemerintah Provinsi	1	2.870	2.870	100.00
	DIR Siak Kiri Paket A (langsut Permai. Jati Baru. dan Dayang Suri)	-	2.870	2.870	100.00
3	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	8	4.195	3.380	80.57
	DIR Bandar Sungai	-	900	900	-
	DIR Desa Selat Guntung	-	50	30	-
	DIR Laksamana	-	500	450	-
	DIR Parit I/II	-	200	180	-

No	Nama Daerah Irigasi Rawa	Jumlah DIR	Luasan (Ha)	Kondisi Baik	Presentase (%)
	DIR Pusako	-	200	100	-
	DIR Rempak. Belading	-	950	900	-
	DIR Sungai Mandau	-	975	900	-
	DIR Teluk Mesjid/ Sungai Tengah	-	420	420	-
	JUMLAH	10	12.541	11.726	93.90

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

2.3.3.9. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Dengan adanya data mengenai rasio jaringan irigasi kita dapat mengetahui gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2. 107
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Irigasi Teknis	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Primer	132.563	149.179	153.179	153.179	155.629	4
2	Skunder	303.609	329.373	336.023	336.023	337.978	6.65
3	Tersier	282.374	282.374	282.374	282.374	282.374	0.00

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jaringan irigasi di Kabupaten Siak mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik yang primer, sekunder maupun tersier. Dengan demikian penanganan banjir di Kabupaten Siak sudah semakin baik.

2.3.3.10. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Berikut penyajian data proporsi rumah tangga yang mendapat akses air minum per kecamatan tahun 2023:

Tabel 2. 108
Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	SPAM IKK	Sumur Pompa (KK)	Sumur (KK)	Mata Air (KK)	Air Hujan (KK)	Lainnya (KK)	Jumlah (KK)
1	Kecamatan Siak	33.923	5.962	0	780	0	2.124	0	8.866
2	Kecamatan Mempura	17.576	1.847	0	222	42	384	0	2.495

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	SPAM IKK	Sumur Pompa (KK)	Sumur (KK)	Mata Air (KK)	Air Hujan (KK)	Lainnya (KK)	Jumlah (KK)
3	Kecamatan Dayun	31.831	318	0	0	0	26	2.989	3.333
4	Kecamatan Lubuk Dalam	20.503	1.385	1.635	1.420	0	0	200	4.640
5	Kecamatan Kerinci Kanan	23.665	269	0	2.812	0	0	3.115	6.196
6	Kecamatan Koto Gasib	24.722	385	2.713	510	0	399	691	4.698
7	Kecamatan Bunga Raya	28.278	1.256	0	1.610	0	1.907	2.102	6.875
8	Kecamatan Pusako	8.399	965	0	520	9	906	0	2.391
9	Kecamatan Sabak Auh	13.754	975	873	955	0	1.010	0	3.813
10	Kecamatan Sungai Apit	32.437	235	0	2.650	0	4.940	0	7.825
11	Kecamatan Tualang	123.807	240	12.768	4.720	0	1.760	214	19.702
12	Kecamatan Sungai Mandau	9.603	54	314	517	0	46	169	1.100
13	Kecamatan Minas	29.386	1.951	0	1.528	0	1.542	155	5.176
14	Kecamatan Kandis	79.180	93	7.179	1.750	0	1.600	2.300	12.922
Kabupaten Siak		477.064	15.935	25.482	19.994	51	16.644	11.935	90.041

Sumber: Dinas PU, TaRu, PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Berikut presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Siak:

Tabel 2. 109
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	78.07	79.42	80.44	81,31	82,12

Sumber: Dinas PU, TaRu, PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,05%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dari Pemerintah Siak untuk mewujudkan akses air minum yang layak untuk masyarakat Kabupaten Siak.

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak perkotaan (jaringan perpipaan perkotaan) berdasarkan kesepakatan Rakor Air Minum se_Prvinsi Riau yang telah disepakati data Rumah Tangga dengan akses Air Siap Minum Perkotaan diambil dari data Sambungan Rumah Tangga SPAM IKK dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten/Kota, dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 110
Persentase Jaringan Perpipaan Perkotaan Kabupaten Siak Tahun 2024

Uraian	Satuan	2024
Jumlah Penduduk Perkotaan	KK	75.260
	Jiwa	264.669
Jumlah Jaringan Perpipaan Perkotaan	SR	16.830
Persentase layanan JP Perkotaan	%	22,36%

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak, BPS tahun 2024

2.3.3.11. Persampahan

Persentase cakupan area pelayanan persampahan di Kabupaten Siak Tahun 2019 sampai dengan 2023 relatif Tetap, yaitu 78,57%. Kedepannya kabupaten Siak masih perlu peningkatan kinerja dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Capaian pengelolaan sampah, baik penanganan maupun pengurangan sampah di Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 masih belum bisa mengikuti capaian nasional. Hal ini karena masih kurangnya sarana prasarana, anggaran pengelolaan sampah dan kepedulian masyarakat terhadap sampahnya. Disamping itu, timbulan sampah akan selalu meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Persentase cakupan area pelayanan persampahan Kabupaten Siak Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 111
Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Tahun 2019–2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Timbunan Sampah	Ton	67.950	69.740	69.740	68,136	69,722
2	Persentase Timbulan sampah yang ditangani di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	44,18	44,17	57,89	61,63	40,13
3	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	20,19	20,8	19,23	10,79	12,51
4	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	70,08	73,53	78,57	78,57	78,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024

Dari tabel diatas, Jumlah timbulan sampah Kabupaten Siak pada tahun 2023 sebesar 69.722 ton, dimana upaya pengurangan sampah sebesar 12,51%, penanganan sampah

sebesar 40,13%. Perhitungan sampah sangat dipengaruhi ketaatan OPD dalam pelaporan capaian kebijakan strategi daerah persampahan. Timbulan sampah tertinggi pada tahun 2020-2021 sedangkan terendah pada tahun 2019. Jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel diatas.

2.3.3.12. Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Siak dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Siak dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode enam tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan kawasan kumuh. Sementara itu untuk persentase rumah tangga dengan akses hunian layak berdasarkan data dari susenas yang menunjukkan peningkatan selama 6 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 78,25 persen namun menurun pada tahun berikutnya. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak tahun 2023 mencapai 75,19 persen. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2. 112
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten Siak Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	60,82	60,30	66,26	72,76	78,25	75,19

Sumber: *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Povinsi Riau 2018-2023, BPS Provinsi Riau (diolah)*

2.3.3.13. Kawasan Kumuh

Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran, penangan kawasan kumuh diketahui bahwa adanya 3 katagori luas kawasan yang harus ditangani yaitu : Kawasan Kumuh dengan luas 0-10 Ha yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, Kawasan Kumuh dengan luas 10-15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kawasan Kumuh dengan luas diatas 15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. pada tahun

2022 telah dicapai penanganan kawasan kumuh seluas 103,07 Ha, sehingga sisa luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan seluas 146,20 Ha. Berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan oleh bupati siak (periode SK Kumuh sampai dengan tahun 2024), diketahui bahwa luasan kawasan kumuh yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Siak seluas 112,02 Ha, luasan tersebutlah yang menjadi pedoman dalam melakukan intervensi penanganan kawasan kumuh. Untuk lebih detailnya, capaian penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten Siak sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 113
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Siak Tahun 2023

Uraian	Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Pemukiman Kumuh (Ha)	Capaian Luas Kawasan Kumuh Tertangani (Ha)	Capaian Penurunan Luas Kawasan Kumuh (Ha)
Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Siak	Kelurahan Perawang	41,15	0	41,15
	Kampung Tualang	10,27	0	10,27
	Pasar Minas	20,96	0	20,96
	Kandis Kota	39,64	0	39,64
Total		112,02	0	112,02

Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2024

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Angka Kriminalitas

Iklim investasi dipengaruhi oleh adanya rasa aman dan kondisi yang kondusif perpolitikan suatu daerah. Investor perlu diberikan rasa aman dalam menanamkan modal. Salah satu bentuk rasa aman dapat ditunjukkan dari angka kriminalitas serta kondisi yang kondusif perpolitikan yang dapat dilihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi. Sehingga rendahnya angka kriminalitas menjadi suatu gambaran iklim yang baik untuk berinvestasi.

Secara keseluruhan angka kriminalitas di Kabupaten Siak relatif kecil sehingga suasananya relatif aman dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Meskipun rendah, trend kecenderungan angka kriminalitas semakin meningkat sejalan dengan semakin tingginya jumlah penduduk dan terbukanya wilayah Riau. Tindak kriminal yang paling banyak terjadi adalah pencurian dan narkoba, sedangkan tindak kriminal yang lainnya dengan frekuensi yang relatif kecil.

Tabel 2. 114
Angka Kriminalitas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Kasus	2020	2021	2022	2023
1	Narkoba	50	51	50	133
2	Pembunuhan	1	1	0	0
3	Seksual	12	16	4	2
4	Penganiayaan	29	30	15	10
5	Pencurian	265	348	290	222
6	Penipuan	23	23	29	8
7	Pemalsuan Uang	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: *Polres Siak, 2023*

2.3.4.2 Jumlah Demonstrasi

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Siak relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota lain di Indonesia.

Tabel 2. 115
Jumlah Demonstrasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

No	Kasus	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Demonstrasi	1	2	7	6	5
	- Masalah Lahan	0	0	2	5	2
	- Masalah Ketenaga Kerjaan	1	2	2	0	2
	- Masalah Lainnya	0	0	3	1	1

Sumber: *Kantor Kesbangpol Kab. Siak Tahun 2023*

2.3.4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Kerukunan merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Adapun di kabupaten siak sendiri penilaian IKUB dimulai pada tahun 2022. Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, untuk penilaian pada lima Kategori dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 116
Kategorisasi Kerukunan Beragama

0,00 – 20,00	Sangat Rendah
21,00 – 40,00	Rendah
41,00 – 60,00	Sedang
61,00 – 80,00	Tinggi
80,00 – 100,00	Sangat Tinggi

Sumber : *BPS Siak 2022*

Secara rinci perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 117
Skor Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Siak Tahun 2022-2024

Tahun	Variabel			IKUB	Kategori
	Toleransi	Kerjasama	Kesetaraan		
2022	72,46	60,25	78,33	72,75	Tinggi
2023	75,46	62,25	78,33	73,05	Tinggi
2024	73,46	61,25	78,83	71,18	Tinggi

Sumber: BPS Siak 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator pelayanan publik merupakan salah satu data yang memperlihatkan capaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan di Kabupaten Siak. Berikut merupakan gambaran realisasi indikator capaian kinerja layanan kepada masyarakat di Kabupaten Siak.

2.4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Index kepuasan layanan masyarakat telah menjadi survei kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa indeks kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2019 – 2023 memperoleh nilai B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak sudah baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi, berikut indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 118
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B	B	B	B	B

Sumber: Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2024

2.4.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dilakukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya dalam mempertahankan maupun meningkatkan indikator layanan bidang urusan komunikasi dan informatika. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan di Kabupaten Siak. Adapun capaian indikator layanan bidang urusan komunikasi dan informatika yakni indeks SPBE dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 119
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Siak
Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	1,61	n/a	1,9	2,34	3,01

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak Tahun 2024

Berdasarkan pemantauan tabel diatas terjadi peningkatan capaian indikator pelayanan pada bidang urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Siak. Pemantauan dan evaluasi berpedoman pada Permenpan RI Nomor 59 Tahun 2020 terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator. Indeks SPBE di Kabupaten mengalami peningkatan sekitar 0,67 dari tahun 2022 menjadi 3,01 di Tahun 2023, hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan melalui skema Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dan terus bertransformasi guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi. Kebijakan terkait PEKPPP terkini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan hasil penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, dimana pada instrumen yang baru telah memuat ukuran kualitas pelayanan publik yang dapat memotret layanan pemerintah sesuai dengan perkembangan terkini.

Secara umum aspek yang digunakan masih sama seperti sebelumnya yang terdiri dari 6 (enam aspek), tetapi dengan penyempurnaan berbagai indikator pertanyaan. aspek dimaksud adalah: 1) Kebijakan Pelayanan; 2) Profesionalisme SDM; 3) Sarana dan Prasarana; 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); 5) Konsultasi dan Pengaduan; dan 6) Inovasi. Elaborasi aspek dan prinsip akan menghasilkan indikator pertanyaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi masyarakat, sehingga Indeks Pelayanan Publik (IPP) bersifat representatif

Adapun capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 120
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	Na	Na	3,76	4,03	2,83

Sumber : Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2024

Dalam rangka monitoring hasil pelaksanaan PEKPPP tahun 2021 dan tahun 2022 unit lokus evaluasi pada Pemerintah Kabupaten atau Kota masih sama dengan tahun 2021 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sedangkan pada Tahun 2023 unit lokus evaluasi pada Pemerintah Kabupaten Siak yakni pada Dinas Sosial, RSUD Tengku Rafian dan Kecamatan Siak berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023

2.4.4 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Tabel dibawah ini Kabupaten Siak memiliki indeks inovasi daerah sebesar 37,12 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau yaitu sebesar 53,52 dengan kategori inovatif. Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 121
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten siak Tahun 2019-2023

Kab/ Provinsi	Nilai/ Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Siak	Nilai	2.530	126	20,98	44,70	37,12
	Kategori	Sangat Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif
Riau	Nilai	22.060	3.079	38,82	50,94	53,52
	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri (No.002.6-415 Tahun 2019, Nomor 100-4672 Tahun 2020, No.002.6-5848 Tahun 2021, No.400.10.11-6301.A Tahun 2022, No.4000.10.11-6287 Tahun 2023).

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025

Ketercapaian hasil RPJPD Kabupaten Siak menunjukkan nilai TINGGI (81,87%), menggambarkan pelaksanaan setiap tahap RPJPD Kabupaten Siak yang sudah cukup baik namun belum optimal sehingga perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan RPJPD, beberapa faktor penghambat operasional yang menjadi kendala, sehingga dibutuhkan tindak lanjut pada pelaksanaan RPJPD selanjutnya. Adapun beberapa muatan RPJPD yang menjadi rekomendasi untuk upaya pembangunan jangka panjang periode selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan SPM

Kebutuhan dasar untuk urusan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar air bersih menjadi capaian yang masih perlu ditingkatkan sesuai hasil evaluasi capaian sasaran RPJMD Kabupaten Siak. Peningkatan kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar memerlukan upaya kolaborasi berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, dan masyarakat), sehingga perlu direncanakan pada dokumen rencana jangka panjang. Untuk itu, dokumen rencana jangka panjang periode selanjutnya perlu disusun dengan mengalokasikan sumber daya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi peningkatan akses sarana/prasarana pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sarana air bersih dalam kawasan permukiman. Selain itu, upaya kerja sama dan kolaborasi OPD, BLUD/BUMD, serta swasta dapat turut diakomodasi dan direncanakan sebagai skema pembiayaan pembangunan sarana/prasarana, sebagai acuan pelaksanaan RPJPD dalam RPJMD yang juga dapat diacu pada perumusan visi-misi kepala daerah.

2. Peningkatan investasi dan diversifikasi PAD, serta peningkatan daya saing dan perluasan lapangan kerja

Pendapatan Kabupaten Siak yang masih didominasi dengan sektor tambang dan migas tidak memiliki keselarasan dengan upaya pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, dokumen rencana jangka panjang selanjutnya perlu mengakomodasi arahan pergeseran sektor pendapatan daerah sebagai upaya diversifikasi. Beberapa sektor yang memiliki potensi tinggi pada akhir pelaksanaan RPJPD Kabupaten Siak tahun 2005 – 2025 adalah sektor pertanian, sektor pariwisata, serta sektor industri pengolahan. Sektor pariwisata sangat selaras dengan upaya pembangunan berkelanjutan, terutama dengan mengembangkan kawasan pariwisata yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan. Selain itu, dalam upaya peralihan dominasi sektor tambang menjadi non-tambang, Kabupaten Siak dapat melakukan hilirisasi produksi tambang dengan membangun industri pengolahan. Upaya ini akan turut menyumbang pertumbuhan PAD, dengan adanya nilai tambah pada produk tambang. Meskipun demikian, upaya ini tetap perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak melebihi daya dukung lahan. Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah dapat melibatkan stakeholders lain seperti BUMN dan swasta untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Siak, terutama dengan menyuplai kebutuhan air bersih, membangun instalasi pengolahan/industri menengah, serta mengembangkan kawasan pariwisata. Kegiatan tersebut perlu didukung dengan kualitas SDM serta dukungan dari OPD pengampu urusan tenaga kerja, sehingga Kabupaten Siak dapat meningkatkan daya saing wilayah.

Terdapat tiga upaya yang dapat disiapkan dalam rangka diversifikasi PAD dan perluasan penyerapan tenaga kerja di masa depan untuk melaksanakan komitmen Siak Hijau di masa mendatang. Pertama, memfasilitasi proyek berbasis komoditas yang memberikan perhatian terhadap aspek rantai pasok produk dengan memberdayakan petani, pekebun, dan petambak untuk menerapkan budidaya ramah lingkungan di lahan gambut, seperti budidaya nanas, sagu, ikan gabus dan Komoditi unggulan daerah lainnya. Kedua, memberikan dukungan peningkatan kapasitas untuk membangun sumber daya manusia bagi petani/pekebun dan pengelola badan usaha untuk dapat mengubah proyek menjadi inisiatif yang berkelanjutan. Ketiga, memperkuat kebutuhan akses pasar untuk produk dan komoditas lestari agar dapat memiliki dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

3. Pencegahan dan penanggulangan stunting

Kondisi stunting menjadi salah satu masalah pokok yang menyebabkan sulitnya upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Siak. Stunting turut berdampak pada tingkat kesehatan dan kemampuan intelektual generasi muda, sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan antara lain meliputi stimulasi dan peningkatan produksi serta distribusi pangan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan protein hewani, serta mempromosikan pengonsumsian kepada masyarakat. OPD terkait juga perlu memperkuat sistem distribusi pangan yang adil dan efektif sehingga pangan bergizi dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, terutama keluarga dengan anak-anak yang rentan terhadap stunting. Sasaran pokok terkait stunting dapat mengakomodasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan bergizi dan perawatan kesehatan bagi anak-anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan promosi kesehatan yang menasar kelompok masyarakat yang rentan terhadap stunting, seperti keluarga dengan anak balita dan ibu hamil. Dari sisi penanggulangan stunting, dapat dirumuskan sasaran pokok untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang rentan terhadap stunting. Layanan kesehatan yang berkualitas harus mencakup perawatan kesehatan prenatal, pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak-anak, dan penyediaan suplemen gizi seperti vitamin A dan zat besi.

4. Peningkatan konektivitas wilayah

Peningkatan konektivitas spasial merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pembangunan, yang mempengaruhi kemudahan mobilisasi penduduk atau logistik di Kabupaten Siak. Hal ini mencakup infrastruktur transportasi, seperti jalan raya, jalan tol, bandara, serta fasilitas publik lainnya seperti terminal transportasi umum. Peningkatan konektivitas wilayah utamanya dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan memudahkan pergerakan barang dan orang antara wilayah yang berbeda, dengan mempersingkat waktu dan biaya perjalanan di Kabupaten Siak. Selain itu, Kabupaten Siak juga perlu meningkatkan konektivitas spasial untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga aksesibilitas setiap wilayah dapat turut ditingkatkan. Hal ini juga akan mempermudah penduduk dalam menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta turut menurunkan Indeks Kemahalan Konstruksi karena upaya distribusi logistik menjadi lebih efektif.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Proyeksi Penduduk

2.6.1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk

Proyeksi Penduduk yang digunakan merupakan Proyeksi Penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Mengingat ketersediaan data dan akurasi hasil Proyeksi Penduduk di mana dalam penyusunan proyeksi penduduk kabupaten/kota untuk wilayah yang semakin kecil dan periode proyeksi semakin panjang, maka akurasi hasil proyeksi akan mengalami penurunan, untuk itu Proyeksi Penduduk di Kabupaten Siak yang tersedia antara kurun waktu 2020 sampai dengan 2045. Adapun sumber data utama yang digunakan adalah tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk tahun 2020.

Jumlah penduduk total di Kabupaten Siak pada tahun 2020 adalah sebesar 456.574 jiwa. Jumlah ini akan meningkat menjadi 490.376 jiwa pada tahun 2025 dan kemudian meningkat lagi menjadi 522.308 jiwa pada tahun 2030. Pada tahun 2035 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Siak diperkirakan meningkat menjadi 552.026 jiwa dan kemudian menjadi 578.918 jiwa pada tahun 2040. Jumlah penduduk di Kabupaten Siak diproyeksikan mencapai 601.871 jiwa pada tahun 2045, Rincian proyeksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 122
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Siak	33.923	34.135	36.412	38.459	40.321	41.960
2	Mempura	17.576	18.568	19.807	20.920	21.933	22.825
3	Sungai Apit	32.437	33.673	35.919	37.939	39.775	41.392
4	Sabak Auh	13.754	14.271	15.223	16.079	16.857	17.542
5	Minas	29.386	32.664	34.843	36.802	38.584	40.152
6	Kandis	79.180	78.411	83.642	88.345	92.622	96.386
7	Bunga Raya	28.278	29.595	31.570	33.345	34.959	36.380
8	Dayun	31.831	33.730	35.981	38.004	39.843	41.463
9	Tualang	123.807	124.708	132.246	140.033	146.979	152.376
10	Koto Gasib	24.722	25.339	27.030	28.549	29.931	31.148
11	Kerinci Kanan	23.665	24.649	26.293	27.772	29.116	30.300
12	Lubuk Dalam	20.503	21.518	22.954	24.245	25.418	26.451
13	S.Mandau	9.603	10.608	11.316	11.952	12.531	13.040
14	Pusako	8.399	8.505	9.073	9.583	10.047	10.455
Jumlah		477.064	490.376	522.308	552.026	578.918	601.871

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

2.6.1.2 Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Siak pada tahun 2023 adalah sebesar 245.726 jiwa dan jumlah ini akan meningkat menjadi 252.114 jiwa pada tahun 2025 dan terus akan mengalami peningkatan menjadi 267.186 jiwa pada tahun 2030. Pada tahun

2035 jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Siak di proyeksikan menjadi 280.850 jiwa dan menjadi 292.856 jiwa pada tahun 2040 kemudian meningkat lagi menjadi 302.728 jiwa pada tahun 2045.

Tabel 2. 123
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Siak

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	245.726	252.114	267.186	280.850	292.856	302.728
Perempuan	231.338	238.262	255.122	271.176	286.062	299.143
Rasio	106,22	105,81	104,73	103,57	102,38	101,20

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Adapun jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Siak pada tahun 2023 adalah sebesar 231.338 jiwa dan jumlah ini akan meningkat menjadi 238.262 jiwa pada tahun 2025 dan terus akan mengalami peningkatan menjadi 255.122 jiwa pada tahun 2030. Pada tahun 2035 jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Siak diproyeksikan menjadi 286.062 jiwa dan menjadi 329.858 jiwa pada tahun 2040 kemudian meningkat lagi menjadi 299.143 jiwa pada tahun 2045.

2.6.1.3 Proyeksi jumlah Penduduk Usia Tua

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan proyeksi pengelompokan penduduk usia belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tidak produktif (65+ tahun) di suatu wilayah tertentu. Pengelompokan usia tidak produktif terhadap usia produktif di Kabupaten Siak menunjukkan angka ketergantungan, dimana bahwa ketergantungan usia non produktif terhadap penduduk di usia produktif di Kabupaten Siak ada kenaikan dari tahun 2025-2045. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usia tidak produktif terus meningkat sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 124
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Siak

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	0-14 tahun	131.399	130.726	128.299	127.288	128.479	129.146
2	15-64 tahun	329.998	341.167	365.655	382.281	391.973	399.255
3	> 65 tahun	15.667	18.483	28.354	42.457	58.466	73.470
4	Angka Ketergantungan	44,57	43,73	42,84	44,40	47,69	50,75

Sumber: BPS 2023 (diolah)

Jumlah penduduk di Kabupaten Siak pada usia 0-14 tahun diperkirakan cenderung terus meningkat hingga tahun 2045 yang berdampak pada meningkatnya penduduk usia 65 tahun keatas dengan laju pertumbuhan cukup tinggi per tahunnya. Jumlah penduduk usia

tua yang semakin banyak dapat disebabkan akibat kontribusi kualitas kesehatan masyarakat dan juga pelayanan kesehatan yang semakin baik. Banyak jumlah penduduk usia

tua ini, tentu memerlukan fasilitas pelayanan yang lebih banyak untuk usia tersebut.

Rasio ketergantungan Kabupaten Siak yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2045 sebesar 50,75 persen yang artinya bahwa dari 100 jiwa penduduk usia produktif di Kabupaten Siak menanggung 50-51 jiwa penduduk usia tidak produktif. Hal ini berarti bahwa terjadi Bonus Demografi pada kabupaten Siak hingga tahun 2045.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

2.6.2.1 Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Siak diasumsikan akan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan rumah diasumsikan dibutuhkan satu unit rumah untuk setiap empat orang penduduk. Selain itu digunakan perbandingan rumah kavling kecil, kavling sedang, dan kavling besar adalah 3:2:1. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dihitung kebutuhan rumah di Kabupaten Siak sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 125
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Siak

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	477.064	490.376	522.308	552.026	578.918	601.871
2	Jumlah Rumah Tangga	114.955	118.163	125.857	133.018	139.498	145.029
3	Proyeksi Kebutuhan Rumah	114.955	118.163	125.857	133.018	139.498	145.029
4	Persentase kepemilikan rumah sendiri	78,37	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.2 Air Bersih

Perkiraan kebutuhan air bersih di Kabupaten Siak menggunakan asumsi bahwa setiap penduduk membutuhkan air bersih sebesar 100 liter/orang/hari. Berdasarkan asumsi tersebut dapat dihitung perkiraan kebutuhan air bersih di Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2045 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2. 126
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Siak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	477.064	490.376	522.308	552.026	578.918	601.871

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (Liter/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	47.836.700	49.037.632	52.230.837	55.202.631	7.891.752	60.187.070

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.3 Energi/Listrik

Perkiraan kebutuhan listrik di Kabupaten Siak menggunakan asumsi bahwa di setiap rumah membutuhkan listrik sebesar 900 Va/unit rumah. Berdasarkan hasil perhitungan perkiraan kebutuhan rumah, selanjutnya dapat dihitung perkiraan kebutuhan listrik di Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2045 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 127
Target Kebutuhan Listrik Kabupaten Siak per kapita (kWh) Tahun 2025 - 2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (MW)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik per kapita (watt)	247	300	425	551	675	799
Jumlah Penduduk	477.064	490.376	522.308	552.026	578.918	601.871
Jumlah Rumah	95.673	98.075	104.462	110.405	115.784	120.374
Proyeksi Kebutuhan Litrik	118	147	222	304	391	481

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.4 Persampahan

Perkiraan timbunan sampah di Kabupaten Siak menggunakan asumsi bahwa per setiap penduduk akan menghasilkan sampah sebesar 2,3 Liter/hari. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, selanjutnya akan dapat dihitung kebutuhan pengelolaan persampahan di Kabupaten Siak yaitu:

Tabel 2. 128
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Siak

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Timbunan Sampah (M3/Hari)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	477.064	490.376	522.308	552.026	578.918	601.871
Proyeksi Timbunan Sampah	1.586	1.631	1.737	1.835	1.925	2.001

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.5 Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Siak menggunakan asumsi bahwa untuk fasilitas rumah sakit disediakan per 250.000 penduduk, puskesmas untuk 120.000 penduduk, posyandu 1.250 penduduk, dan klinik 30.000 penduduk. Berdasarkan data proyeksi penduduk dan asumsi kebutuhan fasilitas Kesehatan selanjutnya dapat diperkirakan kebutuhan fasilitas Kesehatan di Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 129
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Siak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	477.064	490.376	522.308	552.026	578.918	601.871
Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	2	5	6	6	6	6
Puskesmas	16	16	17	18	19	20
Posyandu	425	392	418	442	463	481
Klinik	36	98	104	110	116	120

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.6.2.6 Pendidikan

Perkiraan kebutuhan fasilitas Pendidikan Kabupaten Siak menggunakan asumsi bahwa untuk taman kanak-kanak disediakan per 1.250 penduduk, SD per 1.600 penduduk, SMP/MTS per 4.800 penduduk, dan SMA/MA/SMK per 4.800 penduduk. Berdasarkan proyeksi penduduk dan asumsi kebutuhan fasilitas Pendidikan tersebut, selanjutnya dapat dihitung perkiraan kebutuhan fasilitas Pendidikan di Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 130
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Siak

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	477.064	490.376	522.308	552.026	578.918	601.871
Fasilitas Pendidikan						
TK	233	577	562	568	546	536
SD/MI	277	363	229	225	219	214
SMP/MTs	158	148	147	142	143	141
SMA/MA/SMK	93	108	106	109	110	111

Sumber: Hasil Analisis, 2023

2.7 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana berdasarkan RPJPN 2025-2045

2.7.1 Megatren

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformasi berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan

potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

1. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga.

2. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Di bidang geoekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang sudah menyumbang 55 persen dari nilai output dunia. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

3. Perkembangan Teknologi

Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi dirupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Teknologi yang berkembang dimasa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur, sektor pendidikan dan cara kerja pemerintah. Perkembangan teknologi dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.

4. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar

25-30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

5. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 (Brazil, Cina, Indonesia, India, Meksiko, Rusia, dan Turki) diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi negara maju yang tergabung dalam G7 (US, Italia, Inggris, Prancis, Jepang, Kanada, dan Jerman).

6. Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktifitas penduduk. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*).

8. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (Energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati (tiga krisis global-*the triple planetary crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi dunia menjadi kebijakan dan strategi global.

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

2.7.2 Modal Dasar

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya melambat. Pada tahun 2022, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata-rata tahun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

2. Modal Sosial dan Budaya

Modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadikan kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor. Modal sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia berkarakter guyub, memiliki tradisi gotong royong dan musyawarah yang selalu mengutamakan kerja sama dan saling tolong menolong, serta berjiwa berdikari kuat yang memiliki keyakinan pada kekuatan sendiri dan mampu mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Bangsa Indonesia yang religius dan berbudaya memiliki nilai agama dan budaya yang ditransformasikan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berakhlak, berbudaya maju, dan berdaya saing. Nilai agama dan budaya juga menjadi landasan moral dan etika serta sumber inspirasi dan motivasi bagi setiap insan

untuk berbuat kebajikan melalui sikap saling mengasihi, berbagi, tolong menolong, dan peduli dengan sesama umat manusia dan lingkungan.

3. Kekayaan Alam

Kekayaan alam merupakan modal dasar pembangunan nasional untuk kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kekayaan alam termasuk di dalamnya sumber daya alam yang bersifat ekstraktif meliputi hutan, minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, energi baru dan terbarukan, serta keanekaragaman hayati yang mencakup keragaman genetik, spesies dan ekosistem. Hutan tropis Indonesia yang luas memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi, dan aktivitas sosial budaya masyarakat.

Indonesia memiliki 125,57 juta hektare kawasan hutan yang terdiri dari 120,25 juta hektare kawasan hutan daratan dan 5,32 juta hektare kawasan hutan yang berupa hutan konservasi perairan. Jumlah cadangan minyak bumi terdiri dari cadangan terbukti sebanyak 2,27 miliar *barrel* dan cadangan potensial sebanyak 1,9 miliar *barrel*. Cadangan gas alam Indonesia mencatat 54,83 TSCF dengan rincian cadangan terbukti sebesar 36,34 TSCF dan cadangan potensial sebesar 18,49 FSCF. Jika melihat rasio cadangan terhadap laju produksi (R/P), saat ini cadangan minyak hanya tersedia untuk 6,7 tahun, sedangkan untuk gas bumi tersedia selama 21,2 tahun.

Di sisi lain cadangan batu bara mencapai 36,30 miliar ton dengan rasio cadangan dan produksi sebesar 65 tahun, serta berbagai jenis mineral utama yaitu nikel dengan cadangan bijih 5,24 miliar ton, tembaga dengan cadangan bijih 3,01 miliar ton, dan bauksit dengan bijih sebesar 3,22 miliar ton. Energi terbarukan memiliki potensi pemanfaatan yang besar dengan adanya kemajuan teknologi. Potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.716 GW, dengan potensi terbesar adalah energi surya sebesar 3.294 GW, dan sisanya adalah energi potensi energi biomassa, air, panas bumi, bayu laut, dan energi terbarukan lainnya.

Kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi modal dasar pembangunan berkelanjutan. Indonesia menjadi rumah bagi 12 persen jumlah spesies mamalia dunia (515 spesies) 16 persen reptil (781 spesies) dan 17 persen burung (1.592 spesies). Terkait dengan keanekaragaman flora, Indonesia memiliki sekitar 25.000 spesies tumbuhan berbunga yang setara dengan 10 persen jumlah global. Indonesia juga kaya akan keanekaragaman ekosistem. Di Indonesia terdapat sekitar 74 tipe ekosistem, mulai dari laut dalam, dataran rendah, hingga alpin di pegunungan Jayawijaya, Papua. Suberdaya perikanan sebagai salah satu sumber

daya alam laut memiliki potensi perikanan tangkap 12 juta ton di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

4. Kekuatan Maritim

Kekuatan maritim Indonesia tampak nyata dari letak geografis dan karakteristik wilayahnya. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara dua samudera utama dunia, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Modalitas kekuatan maritim Indonesia di tengah dinamika geopolitik juga ditopang oleh kerangka kerja sama baik bilateral, regional maupun global. Selain itu, kekuatan maritim Indonesia juga ditunjukkan dari aspek sosiokultural. Secara historis, bangsa Indonesia sejatinya memiliki sejarah peradaban maritim. Kekuatan maritim merupakan modalitas utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Untuk itu, pembangunan kekuatan maritim ditopang oleh peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, revitalisasi sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas kemaritiman, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut dan teknologi dalam pengembangan kekuatan maritim yang berkelanjutan.

2.7.3 Perubahan Iklim, Daya tampung dan Daya Dukung

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim mencapai Rp. 544 triliun selama periode tahun 2020-2024 yang diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

2. Daya Dukung Sumber Daya Alam

Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektare dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU). Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Tingkat ketersediaan air mulai menunjukkan kelangkaan yang dipengaruhi oleh kebutuhan air yang tinggi dan penurunan luas tutupan hutan lahan. Sampai tahun 2045, tingkat ketersediaan air wilayah Jawa,

sebagian Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian Selatan, sudah berada pada tingkat langka atau kritis.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, perubahan iklim, dan persebaran Jenis Asing Invasif (JAI). Alih fungsi lahan yang panjang diproyeksikan terus terjadi dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat spesies kunci, seperti gajah, orang Ujutan dan harimau Sumatera; badak dan owa Jawa; anoa, babi rusa, orang utan borneo; dan gajah Kalimantan. Luas habitat spesies kunci diproyeksikan menurun 6,6 juta hektare selama 2020-2045.

3. Data Tampung

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar (WWF, 2019) dan sekitar 70 persen dari 20.000 sumber air minum rumah tangga tidak layak minum (UNICEF, 2022). Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu. Konsentrasi rata-rata tahunan polusi PM2.5 terus meningkat mencapai 26,5 mikrogram/hari, atau berada di atas baku mutu udara ambien (15 mikrogram/hari).

2.7.4 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

2.7.4.1 Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah

Tata Ruang dan Pertanahan

Arah kebijakan tata ruang untuk menyelesaikan isu penataan ruang adalah: (1) menyediakan rencana tata ruang nasional dan daerah; (2) mewujudkan penataan ruang yang berkualitas; (3) mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan

Arah kebijakan pengembangana perkotaan difokuskan untuk mendorong Pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya.

Pembangunan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan peran strategis masing-masing kawasan. Pembangunan perdesaan diperkuat dari sisi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Sedangkan Pembangunan perkotaan didorong lebih

terstruktur, terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi kawasan sekitarnya, termasuk dengan perdesaan. Dengan kebijakan ini, keterkaitan antara kedua kawasan direncanakan semakin terintegrasi dan berdampak pada pemerataan pertumbuhan wilayah.

Pusat Pertumbuhan

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam pembangunan, diarahkan pada:

- (i) Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengelolaan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok;
- (ii) Percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN;
- (iii) Penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan
- (iv) Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Perdesaan dan Daerah Afirmasi

Pembangunan dan pemberdayaan perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Strategi yang dilaksanakan antara lain:

- (i) Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan ekonomi perdesaan;
- (ii) Peningkatan mobilitas, konektivitas, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan;
- (iii) Pemerataan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar desa berbasis karakteristik wilayah;
- (iv) Pengelolaan lingkungan perdesaan meliputi pencegahan krisis iklim, ketahanan bencana, serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan;
- (v) Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal;
- (vi) Pengaturan dan penataan desa dengan mempertahankan hak asal-usul serta rekognisi adat istiadat dan budaya secara terpadu;
- (vii) Penyelarasan Pembangunan antar desa dengan supra-desa;
- (viii) Optimalisasi pendanaan dan investasi yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya;

2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistic dan mobilitas penumpang.
3. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi.
4. Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT/
5. Mempercepat pemanfaatan potensi EBT.
6. Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan.
7. Transformasi digital untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
8. Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi.
9. Pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.
10. Pemenuhan layanan air siap minum dan sanitasi aman serta pengelolaan sampah yang terpadu merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka Panjang yang berkelanjutan.

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi social mencakup:

1. Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi, persampahan, serta perumahan di kawasan permukiman yang merata dalam rangka pemenuhan SPM di seluruh pelosok negeri.
2. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan serta konektivitas digital untuk seluruh kelompok masyarakat.
3. Mewujudkan pemertaan pelayanan tenaga listrik.
4. Perluasan jangkauan dan kepastian keandalan konektivitas digital.
5. Memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrument kebijakan yang penting untuk meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintah daerah. Penataan desentralisasi administrasi dapat diperkuat melalui reformasi tata Kelola hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.. Penataan keuangan daerah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien.

2.7.4.2 Arah Kebijakan Wilayah Sumatera

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi “Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke

- (ix) Pengarustamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik kebutuhan, dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan desa;
- (x) Pengarusutamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik kebutuhan, dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan;
- (xi) Pengelolaan urbanisasi perdesaan;
- (xii) Pengembangan kawawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi dan kawasan pesisir, sebagai pusat pertumbuhan local berdasarkan peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; dan
- (xiii) Pengembangan kawasan transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan.

Dari strategi diatas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam penanganan kemiskinan di masyarakat dengan beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi desa/kampung, secara detail dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 131
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Potensi Desa/Kampung

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	NAMA PRODUK	KET
1	2	3	4	5
1	SIAK	Langkai	Budidaya Ikan lele	
		Merempan hulu	Peternakan Sapi	
		Suak lanjut	Pakan ternak	
		Buantan besar	Budidaya Ikan gabus	
		Tumang	Budidaya Madu Lebah	
		Rawang air putih	Penggemukan Sapi	
2	SUNGAI APIT	Sei kayu ara	Budidaya Nenas	
		Lalang	Budidaya Madu Kelulut	
		Bunsur	Bilis asam	
		Mengkapan	Usaha Keripik ubi	
		Teluk batil	Budidaya Nenas	
		Harapan	Peternakan Kambing	
		Teluk mesjid	Budidaya Pisang	
		Parit i/ii	Peternakan Sapi	
		Kayu ara permai	Tambak Udang	
		Penyengat	Budidaya Nenas	
		Rawa mekar jaya	Budidaya Madu	
		Sungai rawa	Usaha Ikan lele bio flog	
3	MINAS	Rantau bertuah	Peternakan Sapi	
		Minas barat	Budidaya Jambu kristal	
		Mandi angin	Budidaya Cabai	
		Minas timur	Budidaya Jambu biji	

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	NAMA PRODUK	KET
		Olak	Budidaya Madu lebah	
		Muara bungkal	Peternakan Sapi	
		Lubuk umbut	Budidaya Madu lebah	
		Tasik betung	Budidaya Ikan	
10	DAYUN	Lubuk tilan	Ternak sapi dan penggemukan sapi	
		Merangkai	Peternakan Ayam kube	
		Dayun	Batik motif semangka dan produk umkm turunan semangka	
		Banjar semina	Budidaya Salak pondoh	
		Teluk merbau	Budidaya Jambu madu	
		Pangkalan makmur	Budidaya Kelengkeng	
		Buana makmur	Usaha Telur itik asin	
		Suka mulya	Peternakan Itik petelur	
		Sialang sakti	Budidaya Bawang merah	
		Sawit permai	Budidaya Semangka	
11	BUNGARAYA	Bungaraya	Peternakan Itik	
		Jati baru	Usaha Jamur tiram	
		Jaya pura	Peternakan Sapi	
		Kemuning muda	Keripik ubi	
		Buatan lestari	Puyuh dan kerupuk ubi	
		Tuah indrapura	Budidaya Bawang	
		Langsat permai	Budidaya Cabe	
		Temusai	Jeruk nipis/lemon	
		Dayang suri	Budidaya Jeruk manis	
12	MEMPURA	Benteng hulu	Budidaya Kopi	
		Merempan hilir	Budidaya Jahe	
		Kampung tengah	Usaha Tenun	
		Koto ringin	Peternakan Sapi	
		Teluk merempan	Peternakan Kambing	
13	SABAK AUH	Bandar pedada	Budidaya Sari lemon/jeruk	
		Sabak permai	Usaha Gula kelapa	
14	PUSAKO	Sungai barbari	Aren	
		Dosan	Kue pilin, kerupuk pare dan wajik nenas	
		Benayah	Peternakan Ikan	
		Sungai limau	Budidaya Jeruk	
		Perincit	Budidaya Jagung	
		Pebadaran	Peternakan Itik	
		Dusun pusako	Peternakan Sapi	

Sumber: DPMK tahun 2023

Sarana Prasarana dalam Mendukung Transformasi Ekonomi dan Sosial

Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi mencakup:

1. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konktivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestic dan terhubung secara global.

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	NAMA PRODUK	KET		
4	KANDIS	Kandis	Bawang merah			
		Belutu	Peternakan Itik			
		Sam-sam	Peternakan Telur puyuh			
		Bekalar	Peternakan Sapi			
		Jambai makmur	Kerajinan Batik			
		Libo jaya	Budidaya Ikan			
		Pencing bekulo	Usaha Salai ikan			
		Sungai gondang	Budidaya Jeruk manis			
5	LUBUK DALAM	Empang baru	Budidaya Pinang batara			
		Rawang kao	Usaha Bandrek Instan			
		Sri gading	Usaha ubi al-maida			
		Sialang baru	Budidaya Klengkeng new cristal			
		Sialang palas	Budidaya Melon/pindang bandeng			
		Lubuk dalam	Konveksi			
		Rawang kao barat	Usaha Gasing			
6	KERINCI KANAN	Kerinci kanan	Peternakan Kambing			
		Kerinci kiri	Budidaya Cabe			
		Buana bhakti	Usaha Sabun cair cuci piring			
		Bukit harapan	Budidaya Jahe merah			
		Kumbara utama	Usaha Bunga kenanga			
		Bukit agung	Keripik jahe/tingting jahe			
		Delima jaya	Keripik pisang dan sapi			
		Simpang perak jaya	Budidaya Durian			
		Buatan baru	Peternakan Sapi			
		Gabung makmur	Budidaya Jagung			
		Jati mulya	Budidaya Buah naga			
		Seminai	Peternakan Sapi			
		7	KOTO GASIB	Keranji guguh	Peternakan Sapi	
				Pangkalan pisang	Budidaya Pisang	
Empang pandan	Usaha Keripik ubi					
Buatan ii	Konveksi					
Kuala gasib	Budidaya Ayam buras					
Teluk rimba	Peternakan Itik					
Buatan i	Usaha Salai					
Rantau panjang	Budidaya Durian musang king					
Sri gemilang	Usaha Dodol					
Tasik seminai	Budidaya Ubi					
Sengkemang	Budidaya Madu lebah					
8	TUALANG			Pinang sbt barat	Peternakan Itik	
				Tualang timur	Usaha Anyaman lidi sawit	
		Tualang	Kerajinan anyaman			
		Maredan	Usaha Jahe			
		Perawang barat	Budidaya Jus jambu merah			
		Pinang sbt timur	Peternakan Sapi			
		Maredan barat	Budidaya Pisang kepok			
		Pinang sebatang	Usaha Keripik ubi			
9	SUNGAI MANDAU	Muara kelantan	Padi dan sorgum (pengganti beras)			
		Lubuk jering	Budidaya Jengkol			
		Sungai selodang	Peternakan Kambing			

depan, Pengembangan Wilayah Sumatera, pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu:

Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;

Kedua, pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan; pengembangan kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik; dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi *blue energy*;

Ketiga, penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan *geopark*, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan *multif-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistic; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.

Kelima, meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT; dan

Keenam, penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

Transformasi Sosial diarahkan melalui kebijakan:

- (i) Perluasan upaya promotive-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- (ii) Percepatan penurunan *stunting* terutama pada wilayah beban tinggi;
- (iii) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan Kesehatan;
- (iv) Peningkatan imunisasi rutin lengkap;
- (v) Peningkatan akses pelayanan Kesehatan primer dan lanjutan yang berkualitas;
- (vi) Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat;

- (vii) Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun;
- (viii) Pemerataan kualitas antarsatuan Pendidikan dan antardaerah;
- (ix) Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan;
- (x) Peningkatan literasi dan edukasi;
- (xi) Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi;
- (xii) Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik;
- (xiii) Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi;
- (xiv) Penyediaan afirmasi akses Pendidikan; dan
- (xv) Perlindungan social yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.

Transformasi ekonomi wilayah Sumatera diarahkan sebagai koridor ekonomi “Industri Berbasis SDA dan *Hub* Ekonomi Biru Barat Indonesia” diarahkan melalui kebijakan:

- (i) Pengembangan industry pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan, untuk kawasan strategis industry Medan-Dumai (klaster industry pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan gas bumi);
- (ii) Peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan melalui implementasi teknologi;
- (iii) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan;
- (iv) Peningkatan produksi padi melalui pertanian berkelanjutan
- (v) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan incubator bisnis;
- (vi) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional;
- (vii) Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industry;
- (viii) Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (devisa) dan nusantara melalui integrasi ragam destinasi wisata lintas wilayah di Wilayah Sumatera;
- (ix) Pengembangan *multi-infrastructure backbone & feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.

Transformasi Tata Kelola diarahkan melalui kebijakan:

- (i) Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;

- (ii) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- (iii) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan public masyarakat;
- (iv) Penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga;
- (v) Percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan audit SPBE;
- (vi) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
- (vii) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Landasan Transformasi

A. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia perlu ditingkatkan melalui:

- (i) Peningkatan keamanan untuk mengurangi Tingkat kriminalitas local;
- (ii) Penguatan kerja sama pertahanan keamanan regional;
- (iii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; dan
- (iv) Penguatan pengendalian inflasi daerah.

B. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan social budaya dan ekologi antara lain:

- (i) Penguatan Pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- (ii) Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada Lembaga-lembaga adat dan hak ulayat Masyarakat di Wilayah Sumatera;
- (iii) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
- (iv) Peningkatan Upaya pelestarian hutan lindung;
- (v) Penguatan Upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan darata dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya orang utan, gajah, dan harimau Sumatera;

- (vi) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesier dilindungi, dan perubahan iklim;
- (vii) Penanggulangan masalah abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah Pantai;
- (viii) Pengelolaan risiko bencana;
- (ix) Penguatan peran lumbung energi dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan;
- (x) Pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Sumatera;
- (xi) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan local;
- (xii) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, Perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang;
- (xiii) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui pengautan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan Keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan; dan
- (xiv) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi social dalam Pembangunan Wilayah Sumatera

Kerangka Implementasi Transformasi

A. Agenda Kewilayah dan Sarana Prasarana

Arah kebijakan untuk mendukung pengembangan kewilayahan, yaitu:

- (i) Pengautan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Sumatera;
- (ii) Penuntasan RDTR Kabupaten;
- (iii) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
- (iv) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.
- (v) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.

Arah kebijakan sarana dan prasarana dasar yaitu:

- (i) Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertical perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah;
- (ii) Eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku Masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman;
- (iii) Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampak sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industry-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah.

B. Kestinambungan Pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan di Wilayah Sumatera yaitu:

- (i) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- (ii) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW;
- (iii) Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan saran prioritas nasional;
- (iv) Penguatan pengendalian dan evaluasi Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
- (v) Peningkatan system elektronik terpadu dan tata Kelola data Pembangunan; dan
- (vi) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

2.8 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Siak adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten menuju Kabupaten Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu yang maju berbasis agribisnis, agroindustri, dan pariwisata melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk itu ada 8 kebijakan penataan ruang:

1. Pengembangan kawasan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan produktif.
2. Pengembangan potensi pariwisata alam, buatan dan budaya.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara hirarkis dan terdistribusi.
4. Pengembangan sistem jaringan prasarana untuk mendukung dan menghubungkan pusat permukiman dan ekonomi.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup.

6. Peningkatan pelestarian kawasan lindung berkelanjutan.
7. Pengembangan kawasan budidaya secara efisien, seimbang, dan berwawasan lingkungan.
8. Peningkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*). fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan. Rencana sistem perkotaan Kabupaten Siak dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL -PKL tersebut.

Secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN). Saat ini telah dibangun pelabuhan laut untuk pelayanan pelayaran domestik, namun terbuka juga bagi pelayaran internasional jarak dekat sampai dengan menengah seperti ke Malaysia yang relatif masih dekat, hal ini dimaksud untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau dalam rangka menyongsong era pasar bebas:

Tabel 2. 132
Rencana Sistem Pengembangan Wilayah Kabupaten Siak

No	Klasifikasi Fungsi	Kota	Fungsi Utama	Arahan Fungsi
1	PKW	Siak Sri Indrapura (Siak-Mempura)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan • Pusat perdagangan dan jasa • Pusat pendidikan • Pusat kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan jasa perkotaan skala regional • Pelayanan pemerintahan Kabupaten • Pengembangan pusat perdagangan dan jasa • Pengembangan pusat pariwisata budaya • Pengembangan pusat pendidikan dan kesehatan dengan skala regional
2	PKL	Perkotaan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Transportasi darat • Transportasi air • Pariwisata. • Pusat pengembangan agribisnis; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas terminal pusat koleksi dan distribusi barang regional • Pengembangan industri agribisnis dan agro industri skala regional • Pengembangan infrastruktur permukiman

No	Klasifikasi Fungsi	Kota	Fungsi Utama	Arahan Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pengembangan agroindustri; • Pusat kegiatan industri; dan • Simpul koleksi dan distribusi barang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkebunan • Pengembangan kawasan hutan produksi • Pengembangan budidaya walet • Pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam • Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung nasional (SM. Tasik Belat) • Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan mendukung fungsi pengembangan Tanjung Buton • Pelayanan fasilitas umum dan sosial mendukung fungsi pengembangan Tanjung Buton • Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan
3	PKL	Perkotaan Perawang Kecamatan Tualang	<ul style="list-style-type: none"> • pemerintahan kecamatan • agroindustri dan agroforestry • permukiman • perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas agroindustry dan agroforestry • Pelayanan jasa perhubungan transportasi sungai dan penyeberangan (barang & penumpang) skala nasional • Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (antar kota dalam provinsi-AKDP) • Pelayanan jasa & komersial dengan skala pelayanan beberapa kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial yang mampu melayani beberapa kecamatan • Pengembangan perumahan terstruktur • Pelayanan pemerintahan skala kecamatan
4	PPK	Perkotaan Minas Kecamatan Minas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi • Perlindungan dan pelestarian Kawasan

No	Klasifikasi Fungsi	Kota	Fungsi Utama	Arahan Fungsi
			<ul style="list-style-type: none"> • Perindustrian • Jasa transportasi darat. 	<p>Lindung Nasional (THR Sultan Syarif Kasim)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Koleksi dan Distribusi di bagian Barat (Outlet Barat) skala regional • Pelayanan jasa dan komersial mencakup lebih dari beberapa kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan dalam kota dan perdesaan) • Pelayanan pemerintahan skala kecamatan
5		Perkotaan Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Pertambangan • Perindustrian • Jasa transportasi darat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkebunan • Pusat Koleksi dan Distribusi di bagian Tengah/Selatan (Outlet Tengah/Selatan) skala Regional • Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan dalam kota dan perdesaan) • Pelayanan pemerintahan skala kecamatan
6		Perkotaan Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Tansportasi darat • Transportasi air • Pertambangan • Pertanian • Pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan industri berbasis kehutanan • Pelayanan jasa perhubungan transportasi udara (bandara tersier) • Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan dalam kota dan perdesaan)

No	Klasifikasi Fungsi	Kota	Fungsi Utama	Arahan Fungsi
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan jasa pelabuhan khusus • Pelayanan pemerintahan skala kecamatan
7		Perkotaan Dayun Kecamatan Dayun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Tansportasi darat • Pertambangan • Pertanian • Pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkebunan • Pengembangan kawasan hutan produksi • Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung (Taman Nasional Zamrud/SM Danau Pulau Besar/Danau Bawah) • Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan kota dan perdesaan) • Pelayanan pemerintahan skala kecamatan
8		Perkotaan Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan	<ul style="list-style-type: none"> • pemerintahan kecamatan • perkebunan • pertambangan • perindustrian • jasa transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkebunan • Pusat Koleksi dan Distribusi di bagian Tengah/Selatan (Outlet Tengah/Selatan) skala Regional • Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan • Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan dalam kota dan perdesaan) • Pelayanan pemerintahan skala kecamatan
9		Perkotaan Kandis Kecamatan Kandis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Tansportasi darat • Pertambangan • Pertanian • Pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkebunan • Pengembangan eksplorasi gas bumi • Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan

No	Klasifikasi Fungsi	Kota	Fungsi Utama	Arahan Fungsi
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan • Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan
10		Perkotaan Bandar Bungai Kecamatan Sabak Auh	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Transportasi darat • Transportasi air • Pertambangan • Pertanian • Pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkebunan • Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan • Pelayanan perhubungan transportasi penyeberangan • Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan
11		Perkotaan Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Transportasi darat • Transportasi air • Pertambangan • Pertanian • Pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan pertanian lahan basah • Perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (catchment area) • Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan • Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan
12		Perkotaan Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Transportasi darat • Transportasi air • Pertambangan • Pertanian • Pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung nasional dan kawasan strategis kabupaten dari perspektif lingkungan hidup (Cagar Biosfer Giam Siak Kecil) • Perlindungan kawasan lindung gambut • Pengembangan kawasan hutan produksi • Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan • Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan

No	Klasifikasi Fungsi	Kota	Fungsi Utama	Arahan Fungsi
13		Perkotaan Dusun Pusako Kecamatan Pusako	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan kecamatan • Perkebunan • Tansportasi darat • Transportasi air • Pertambangan • Pertanian • Pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perkebunan • Pengembangan kawasan hutan produksi • Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan • Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan • Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan
14	PPL	Sialang Sakti	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit • Tanaman hortikultura • Industri rumah tangga • Industri meubel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perkebunan Sawit • Pengembangan Tanaman Hortikultura • Pengembangan Industri Rrumah tangga • Pengembangan industry meuble
15		Tuah Indrapura	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman pangan padi • Tanaman hortikultura • Industry rumah tangga • Perikanan dan peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tanaman pangan padi • Pengembangan tanaman hortikultura • Pengembangan industri rumah tangga • Pengembangan perikanan dan peternakan
16		Benayah	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan sawit
17		Sei Lodang	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman pangan padi • Perikanan air tawar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tanaman pangan padi • Pengembangan perikanan air tawar
18		Tanjung Kuras	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman hortikultura • Industri rumah tangga • Perikanan laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan tanaman hortikultura • Pengembangan industri rumah tangga • Pengembangan usaha perikanan laut
19		Rempak	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit • Tanaman pangan padi • Industri rumah tangga • Perikanan laut dan darat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan sawit • Pengembangan tanaman pangan padi • Pengembangan industry rumah tangga • Pengembangan usaha perikanan laut dan darat
20		Rantau Bertuah	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan sawit
21		Belutu	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perkebunan Sawit

No	Klasifikasi Fungsi	Kota	Fungsi Utama	Arahan Fungsi
22		Pinan Sebatang Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit • Perikanan dan peternakan • Penangkaran walet 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan sawit • Pengembangan usahas perikanan dan peternakan
23		Buantan II	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit dan karet • perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengemabgan perkebunan sawit dan karet • Pengembangan perdagangan
24		Buana Bakti	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit • Peternakan lele • Peternakan lobster air tawar 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perkebunan sawit • Pengembangan usaha peternakan dan perikanan
25		Sialang Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan sawit 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Perkebunan Sawit

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pengembangan sistem perkoataan di Kabupaten Siak juga akan didukung dengan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana yang meliputi:

1. Sistem jaringan transprotasi yang terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan
 - b. sistem jaringan kereta api
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
 - d. sistem jaringan transprotasi laut
 - e. sistem jaringan transprotasi udara baru yang didukung dengan jaringan jalan tol dan kereta api.
2. Sistem jaringan energi yang terdiri atas:
 - a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
 - b. Jaringan infrastruktur ketengalistrikan
3. System jaringan telekomunikasi yang terdiri atas:
 - a. System jaringan tetap
 - b. System jaringan bergerak
4. System jaringan sumber daya air yang terdiri atas:
 - a. System jaringan irigasi
 - b. System pengendalian banjir
 - c. Bangunan sumber daya air
5. System jariaden prasanra lainnya yang terdiri atas:
 - a. System penyediaan air minum;
 - b. System pengelolaan air limbah
 - c. System pengelolaan limbah bahan berbahaya dna beracun

- d. System jaringan persampahan
- e. System jaringan evakuasi bencana
- f. System drainase

Kawasan strategis wilayah kabupaten meliputi: (1) kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; (2) kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan (3) kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: (a) kawasan strategis sekitar Industri Tanjung Buton berada di Kecamatan Sungai Apit; (b) kawasan strategis sentra pangan berada di Kecamatan Bunga Raya; (c) kawasan strategis jasa transportasi Koridor Tengah dan Kota Transit Kandis meliputi: (1) Kecamatan Koto Gasib; (2) Kecamatan Lubuk Dalam; (3) Kecamatan Kerinci Kanan; dan (4) Kecamatan Kandis.

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sedangkan Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: (a) Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil berada di Kecamatan Sungai Mandau; (b) Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Belat berada di Kecamatan Sungai Apit; (c) Kawasan Taman Nasional Zamrud berada di Kecamatan Dayun; dan (d) Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim berada di Kecamatan Minas.

Program utama perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

- a. pengembangan Kawasan Strategis Industri Tanjung Buton, meliputi:
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan industri;
 - Pembangunan klaster-klaster industri dan agroindustri;
 - Mengidentifikasi produk-produk unggulan kawasan;
 - Pengembangan industri hulu dan hilir (industri baru dan relokasi);
 - Peningkatan jaringan informasi pemasaran produksi;
 - Peningkatan riset dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung produk unggulan;
 - Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan;
 - Pemantapan kelembagaan pengelolaan kawasan industri; dan
 - Penyiapan sumberdaya tenaga kerja sektor industri.
- b. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Sentra Pangan, meliputi:
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pertanian padi;
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian komoditas tanaman pangan;

- Peningkatan riset dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung optimalisasi produktifitas lahan sawah;
 - Pemantapan kelembagaan daerah dan masyarakat dalam perwujudan ketahanan pangan;
 - Peningkatan jejaring informasi untuk mendukung produk dan pemasaran produk hasil pertanian;
 - Sosialisasi teknologi tepat guna pengolahan padi berbasis masyarakat;
 - Peningkatan kemampuan permodalan bagi pengusaha kecil dan menengah;
 - Meningkatkan keahlian bagi petani; dan
 - Pengendalian terhadap alih fungsi lahan sawah.
- c. Pengembangan Kawasan Strategis Jasa Transportasi Nasional Koridor Tengah dan Kota Transit, meliputi:
- penyusunan Rencana Masterplan Kawasan Strategis Jasa Transportasi Nasional Koridor Tengah;
 - pengembangan pintu masuk selatan kabupaten;
 - peningkatan potensi perdagangan dan jasa pada kawasan;
 - persiapan pembangunan Bandar Udara;
 - pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor poros tengah;
 - pengembangan pintu masuk barat kabupaten;
 - pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor jalan arteri;
 - penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkebunan dan Kota Transit di Kecamatan Kandis dan Kecamatan Minas;
 - pengembangan pintu masuk utara Kabupaten;
 - pembangunan pusat perdagangan Kandis; dan
 - pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor jalan arteri.

Program utama perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura, meliputi:

- penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusaka Prioritas Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura;
- pengembangan kawasan strategis Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura;
- pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata;
- penyusunan program pengembangan Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura;

- pelestarian fungsi warisan sejarah Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura;
- peningkatan kemampuan dan keahlian bagi stakeholder kepariwisataan dan cagar budaya;
- peningkatan promosi, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata bertema budaya; dan
- pengembangan paket-paket wisata.

Program utama perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diprioritaskan, terdiri dari:

- a. Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil berada di Kecamatan Sungai Mandau, meliputi:
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dan zona penyangganya;
 - Rekonstruksi tata batas kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;
 - Pemantapan fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebagai percontohan implementasi integrasi konservasi dan pembangunan berkelanjutan;
 - Pengembangan ekoturisme di area inti dan zona penyangga Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu;
 - Pengembangan infrastruktur yang mendukung capaian pembangunan berkelanjutan di area transisi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu;
 - Penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu;
 - Pemulihan ekosistem dan restorasi kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil – Bukit Batu yang telah mengalami kerusakan;
 - Pengendalian alih fungsi lahan Kawasan Cagar Biosfer akibat perambahan kawasan hutan; dan
 - Pengembangan Model Kampung Konservasi.
- b. Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Belat berada di Kecamatan Sungai Apit, meliputi:
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tasik Belat;
 - Rekonstruksi tata batas Kawasan Strategis Suaka Margasatwa Tasik Belat sebagai kawasan konservasi;
 - Pemantapan fungsi kawasan di sekitar Suaka Margasatwa Tasik Belat sebagai penyangga kawasan konservasi;
 - Penguatan kelembagaan Resort sebagai pengelolaan kawasan di tingkat tapak;
 - Pemulihan ekosistem kawasan Suaka Margasatwa Tasik Belat yang mengalami kerusakan; dan

- Pengembangan Model Kampung Konservasi.
- c. Kawasan Taman Nasional Zamrud berada di Kecamatan Dayun, meliputi:
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Taman Nasional Zamrud;
 - Rekonstruksi tata batas Kawasan Strategis Taman Nasional Zamrud; dan
 - Pemantapan fungsi Kawasan Taman Nasional Zamrud sebagai Kawasan Konservasi;
 - Pemantapan fungsi kawasan sekitar Taman Nasional Zamrud sebagai penyangga kawasan konservasi;
 - Pengembangan kolaborasi pengelolaan Taman Nasional Zamrud bersama Balai Taman Nasional - Pemerintah Daerah – Masyarakat;
 - Penguatan kelembagaan Balai Taman Nasional Zamrud sebagai pengelola kawasan;
 - Pemulihan ekosistem Taman Nasional Zamrud yang telah mengalami kerusakan;
 - Pengendalian alih fungsi lahan Taman Nasional Zamrud akibat perambahan;
 - Pengembangan Model Kampung Konservasi; dan
 - Pengembangan ekoturisme di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan di zona penyangganya.
- d. Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim berada di Kecamatan Minas, meliputi:
- penyusunan Rencana Tata Ruang Strategis Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim;
 - rekonstruksi tata batas Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim;
 - pemantapan Fungsi Kawasan Taman Hutan Raya sebagai kawasan konservasi;
 - pemantapan fungsi kawasan di sekitar Taman Hutan Raya sebagai penyangga kawasan;
 - pengendalian alih fungsi lahan akibat perambahan kawasan Tahura;
 - penguatan kelembagaan KPH sebagai pengelolaan kawasan;
 - pemulihan ekosistem Tahura yang telah mengalami kerusakan;
 - pengembangan ekoturisme di Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim dan di zona penyangganya; dan
 - pengembangan Model Kampung Konservasi.

2.8.1 Pusat pertumbuhan wilayah di kabupaten siak

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Siak yakni mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berkeadilan dan berkelanjutan menuju pusat perekonomian yang berdaulat di provinsi riau. Arah penggunaan ruang di wilayah kabupaten siak didasari perinsip pemanfaatan sumberdaya alam berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya ruang diwilayah kabupaten siak diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2. 133
Kawasan Budidaya di Wilayah Kabupaten Siak

No	Kawasan Peruntukan	Lokasi	Luas (Ha)	Keterangan
1	Kawasan Hutan Produksi	Seluruh kecamatan	352.110	Kawasan Hutan Produksi terbatas : 6.673 Kawasan Hutan Produksi tetap : 333.991 Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonfersi : 11.446
2	Kawasan Pertanian	Seluruh kecamatan	271.976	Kawasan Tanaman Pangan 14.906, Kawasan Perkebunan 257.070
3	Kawasan perikanan	Kec. Sungai apit	3.992	
4	Kawasan Pertambangan dan energi	Kec. Kandis Kec. Minas Kec. Sabak auh Kec. tualang	23.065	Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi
5	Kawasan Peruntukan Industri	Kec. Sungai Apit	3.822	Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB)
6	Kawasan Pemukiman	Seluruh kecamatan	50.056	Kawasan Permukiman Perkotaan +38.006 Kawasan permukiman perdesaan +12.049
7	Kawasan Pertahanan dan Keamanan			a. Komando Distrik Militer di Kecamatan Siak b. Komando Angkatan Laut berada di Kecamatan Tualang c. Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kecamatan Dayun d. Kepolisian Air dan Udara (KORPOLAIRUD) berada di Kecamatan Pusako e. Komando Rayon Militer (KORAMIL) berada di setiap kecamatan f. Kepolisian Sektor berada di semua kecamatan

Sumber: RTRW Kab. Siak Tahun 2020-2040

2.8.2 Kebijakan Perkotaan

Rencana pengembangan sistem pusat perkotaan direncanakan secara bertahap hingga akhir kurun waktu perencanaan RTRW Kabupaten Siak (2020-2040) disinergikan dengan rencana program pengembangan sektoral baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten.

Dalam lingkup wilayah yang lebih luas, sistem pusat perkotaan diarahkan untuk berperan sebagai pintu-pintu keluar (outlet) dalam proses distribusi dan pemasaran hasil-hasil produksi (komoditas) wilayah Kabupaten Siak dengan mendayagunakan potensi dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing pusat-pusat perkotaan yang ada di wilayah Kabupaten Siak.

Dengan mempertimbangkan dinamika tingkat perkembangan yang terjadi saat ini, kecenderungan perkembangan masa mendatang, potensi yang dimiliki, serta peluang yang dapat dimanfaatkan baik berupa dukungan arahan kebijakan pembangunan ataupun dampak positif pembangunan di wilayah sekitar yang dapat menjadi peluang pengembangan wilayah Kabupaten Siak, maka di wilayah Kabupaten Siak terdapat 3 (tiga) pusat perkotaan yang memiliki ekspektasi yang sangat besar untuk mengemban fungsi dan peran sebagai pusat koleksi dan distribusi sekaligus menjadi pintu-pintu keluar (outlet) dalam sistem tata niaga. Ketiga pusat perkotaan tersebut, yaitu :

1. Tanjung Buton. Rencana penetapan Tanjung Buton sebagai pintu keluar (outlet) dalam sistem distribusi pola aliran barang dengan lingkup nasional dan internasional sejalan dengan rencana pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dan pelabuhan Tanjung Buton. Dalam konteks kerjasama ekonomi regional, kawasan pertumbuhan sub regional Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), maka peluang Tanjung Buton cukup besar untuk menjadi alternatif persinggahan kapalkapal niaga atau menangkap peluang relokasi industri di kawasan ini. Tanjung Buton direncanakan menjadi PKL dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan industri dan simpul koleksi dan distribusi barang;
2. Perkotaan Perawang. Posisi strategis yang dimiliki, yaitu berada pada jalur utama (poros tengah) yang menjadi jalur penghubung wilayah-wilayah di bagian selatan dengan wilayah di bagian utara melalui Jembatan Perawang dan sebagai simpul pelayaran di sepanjang Sungai Siak. Memiliki peran sebagai pusat pelayanan di bagian tengah dan barat.
3. Perkotaan Sungai Apit. Perkembangan Tanjung Buton yang berada di Kecamatan Sungai Apit sebagai pelabuhan pengumpul dan direncanakan sebagai kawasan industri berskala regional tentunya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan Perkotaan Sungai Apit sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan jasa untuk wilayah timur-utara Kabupaten Siak. Keberadaan Perkotaan Sungai Apit nantinya diarahkan sebagai Perkotaan yang memberikan pelayanan administrasi pemerintahan dan distribusi perdagangan dan jasa untuk mendukung Tanjung Buton Sebagai Kawasan Industri.

Didasarkan arahan penetapan peran dan fungsi pusat-pusat kota, hingga akhir tahun perencanaan RTRW Kabupaten Siak, pusat-pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Siak, yaitu :

1. Terdapat 1 (satu) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Kota Siak Sri Indrapura yang meliputi Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura sebagaimana telah ditetapkan didalam RTRWN;
2. Terdapat 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Perkotaan Perawang, Perkotaan Perkotaan Sungai Apit, dan Perkotaan Tanjung Buton sebagaimana telah ditetapkan didalam RTRW Provinsi Riau;
3. Terdapat 10 (sepuluh) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki tingkat pelayanan skala kecamatan, yaitu PPK Minas di Kecamatan Minas; PPK Kandis di Kecamatan Kandis; PPK Lubuk Dalam di Kecamatan Lubuk Dalam; PPK Kerinci Kanan di Kecamatan Kerinci Kanan; PPK Pangkalan Pisang di Kecamatan Koto Gasib; PPK Dayun di Kecamatan Dayun; PPK Bungaraya di Kecamatan Bunga Raya; PPK Bandar Sungai di Kecamatan Sabak Auh; PPK Dusun Pusako di Kecamatan Pusako; dan PPK Muara Kelantan di Kecamatan Sungai Mandau.

BAB III

Tepian Bandar Sungai Jantan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain masih terdapat juga berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan, antara lain :

- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat (walaupun PDRB Kab Siak tertinggi ketiga se-Riau, namun tingkat pengangguran lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau, dan tingkat kemiskinan stagnan 6-5% (selama 2010-2023), bahkan th 2023 meningkat dibanding th 2022)
- Masih rendahnya derajat kesehatan (UHH lebih rendah dari rata-rata provinsi Riau),
- Masih rendahnya derajat pendidikan (HLS di bawah rata-rata provinsi Riau)
- Masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja (pendidikan rata-rata tamatan SD dan SMP)

Berikut ini diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Siak dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

1. Masih tingginya angka kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka Panjang. Persentase penduduk miskin atau yang disebut juga dengan istilah tingkat kemiskinan merupakan besarnya persentase yang membandingkan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

Pada Tabel di bawah dapat dilihat bahwa untuk angka kemiskinan Kabupaten Siak pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi.

Tabel 3. 1
Angka Kemiskinan Kabupaten Siak

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Siak	5,09	5,18	5,07	5,23
2	Provinsi Riau	6,82	7,12	6,78	6,68

Sumber : BPS Tahun 2023

2. Angka pengangguran masih tinggi

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia, dalam menghadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran.

Tabel 3. 2
Tingkat Pengangguran Kabupaten Siak

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Siak	5,80	4,34	6,11	5,82
2	Provinsi Riau	6,32	4,42	4,37	4,23

Sumber : BPS Tahun 2023

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pada table tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk angka pengangguran Kabupaten Siak pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab Siak per Desember 2023 mencapai 5,82 % (13.250 Jiwa) dimana nilai ini berkurang 0,29 % dibanding Desember tahun 2022 yang sebesar 6,11 %, Masih tingginya tingkat pengangguran Kabupaten Siak dikarenakan :

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Siak tahun 2023 adalah 9,88 tahun (setingkat kelas X)

- Bagi yang sudah lulus kuliah, persyaratan ijazah tidak sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (Perusahaan)
- Kurangnya keahlian/ sertifikat tambahan yang menunjang bagi pencari kerja
- BLK Siak hanya mampu melaksanakan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebesar kurang dari 1,2 % setiap tahunnya dari total pengangguran yang ada.

Salah satu usaha untuk mengurangi pengangguran adalah dengan meningkatkan investasi agar terbukanya lapangan kerja. Penanaman modal di Kabupaten Siak terus meningkat. Pada tahun 2022, penanaman modal di Kabupaten Siak mencapai 8,799 Triliun rupiah lebih, meningkat 113 % persen lebih dari tahun 2021 yaitu sebesar 4,130 Triliun lebih. Namun Peningkatan investasi tersebut tidak diikuti oleh pengurangan pengangguran. Angka pengangguran terbuka kabupaten Siak tahun 2022 menyentuh angka 6,1 % meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,34. Angka pengangguran terbuka Kabupaten Siak lebih besar dari angka pengangguran Provinsi Riau yaitu sebesar 4,37% dan juga nasional sebesar 5,86%.

3. Pertumbuhan ekonomi belum maksimal dan fluktuatif

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada setiap tahunnya. Analisis pertumbuhan PDRB ADHK (riil) dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Dari table di atas dapat dilihat bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak pada tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi.

Tabel 3. 3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Siak	-0,10	2,31	3,78	4,35
2	Provinsi Riau	-1,13	3.36	4,55	4,21

Sumber : BPS Tahun 2023

4. Kualitas SDM belum optimal

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang dapat menjadi ukuran pembangunan yang dapat memotret pembangunan dari sisi ekonomi, aspek sosial dan kesejahteraan manusia. IPM mencerminkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah

yang terdiri dari tiga dimensi (berdasarkan perhitungan IPM metode baru), yang terdiri atas (1) dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang ditandai dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); (2) dimensi standar hidup layak, yang ditandai dengan indikator Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (96 komoditas PPP); dan (3) dimensi pengetahuan, yang ditandai dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Dari tabel dapat dilihat bahwa untuk perkembangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Siak pada tahun 2020 hingga 2023 semakin meningkat dan pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan.

Tabel 3. 4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Siak

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Siak	73,68	73,98	74,50	74,98
2	Provinsi Riau	72,71	72,94	73,52	74,04

Sumber : BPS Tahun 2023

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Siak pada tahun 2022 telah mencapai 74,5. Angka ini menempatkan kabupaten Siak di urutan nomor 3 (tiga) di seluruh daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau di bawah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Angka ini juga lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar 73,52. Salah satu komponen yang mempengaruhi IPM adalah sektor pendidikan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan di kabupaten Siak adalah angka melanjutkan sekolah. Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Siak adalah sebesar 86,5%, artinya ada sekitar 13,5% pelajar SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK/MA.

5. Masih belum optimalnya Transformasi tata kelola

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan pemerintahan. terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Kabupaten Siak dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut. terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 3. 5
Indeks Reformasi Birokrasi

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Siak	na	54,98	56,77	63,11
2	Provinsi Riau	67.11	67.45	67.63	68.01

Sumber : Hasil Evaluasi kemenpan-RB, 2020-2023

6. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta ketahanan bencana masih rendah

Penanganan pengelolaan kualitas lingkungan hidup masih belum optimal khususnya terkait kualitas air, kualitas udara dan besarnya tutupan hutan yang menjadi utama terhadap lingkungan hidup selain itu dalam upaya pengelolaan persampahan saat ini masih belum optimal masih terkendala sarana prasarana untuk mendukung pengurangan produksi sampah di Kabupaten Siak yang mana saat ini pengurangan sampah masih menggunakan metode pembakaran. Sarana yang dimaksudkan adalah sarana persampahan dari hulu ke hilir. Sarana persampahan berupa Tempat pemrosesan akhir (TPA), Stasiun Pengangkutan Sampah (SPA), Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Recycle, Reauses (TPS 3R), Tempat pembuangan sampah Sementara ((TPS) serta mobil angkutan persampahan. Selain pengelolaan lingkungan hidup juga upaya terkait penanggulangan bencana alam masih belum optimal apalagi Kabupaten Siak memiliki potensi yang cukup besar terhadap bencana alam diantaranya adalah banjir di daerah sepanjang Sungai Siak yang sebagai besar merupakan banjir musiman terutama pada bulan-bulan basah. Sungai Siak masih terjadi abrasi tebing sungai, seperti di Kecamatan Sungai Mandau dan Sungai Apit. Disamping itu **pada musim kemarau apalagi kemarau panjang**, sebahagian wilayah kabupaten Siak terancam dengan risiko rawan bencana kekeringan. Risiko rawan bencana kekeringan terbesar terdapat di Kecamatan Sungai Apit dengan luasan meliputi 23% luas arealnya. Bencana kekeringan tersebut terutama pada kawasan yang berada di lahan gambut, dapat diikuti oleh bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan paling sering berada pada 9 kecamatan dan 67 kampung/kelurahan, dengan risiko terbesar berada di Kecamatan Sungai Apit dan Koto Gasib.

7. Masih tingginya angka Stunting

Sementara itu untuk kelompok masyarakat dibawah 5 tahun (Balita), Prevalensi Balita Gizi Kurang terus meningkat. Pada tahun 2017, prevalensi gizi kurang mencapai 1,17% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 5,93 % . Persoalan stunting juga harus menjadi perhatian dimasa mendatang. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi balita stunting kabupaten Siak menyentuh angka 10,4 % pada tahun 2023. Angka

ini turun 11,6 % dibanding tahun 2022 yaitu sebesar 22 %. Meskipun demikian perlunya upaya yang lebih serius lagi untuk menekan angka stunting di masa mendatang dalam upaya mewujudkan Indonesia sehat dan bebas stunting.

8. Kualitas Infrastruktur Dasar

Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk itu bukan hanya saja kuantitasnya tapi juga kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian.

Beberapa komponen infrastruktur di Kabupaten Siak perlu mendapat perhatian. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) 50%, dan kondisi rusak berat sebesar 38% dari total panjang jalan kabupaten 2.880 km. Sementara itu dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sampai saat ini rumah tangga yang berakses SPAM baru mencapai 14,39%. Padahal sebahagian besar wilayah kabupaten Siak merupakan daerah gambut yang sulit untuk mendapatkan sumber air tanah yang layak konsumsi. Di bidang telekomunikasi, masih ada 26 desa (20%) yang belum memiliki jaringan telekomunikasi.

Masih kurangnya Sarana transportasi dikabupaten Siak antara lain :

- Belum optimalnya Transportasi Publik yang terjangkau dan dapat diandalkan
- Belum optimalnya Transportasi penghubung antar wilayah
- Tertundanya Pengembangan Pelabuhan KITB dan Bandara yang sudah dilakukan kajian sebelumnya.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat penting, berdaya ungkit, memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan Kabupaten Siak. Kebijakan pembangunan jangka Panjang yang di muat dalam dokumen RPJPD ini sangat dipengaruhi oleh hasil rumusan isu-isu strategis Internasional, Nasional dan Regional.

3.2.1 Isu Megatren dan Internasional

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Megatren global memiliki

dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (middle class), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (space economy).

1) Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.

2) Dinamika geopolitik dan geoekonomi global

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negaranegara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050

diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015

3) Perkembangan Tehnologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik). Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

4) Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (dimana lebih separuhnya berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities.

5) Perubahan konstelasi global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa

negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi

6) Pergeseran tata kelola keuangan global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal

7) Pertumbuhan kelas menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

8) Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9) Perubahan iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

10) Pemanfaatan luar angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (space economy), kelestarian antariksa (space sustainability), dan keamanan antariksa (space security).

Isu Strategis perubahan iklim meliputi:

- 1) Perubahan iklim yaitu kenaikan suhu global dikhawatirkan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat celsius tahun 2100
- 2) Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda beda.
- 3) Daya Dukung : daya dukung Lingkungan mengalami penurunan.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan meliputi:

- 1) Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat
- 2) Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi

- 3) Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
- 4) Deindustrial dini dan produktivitas sector pertanian yang masih rendah
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
- 6) Potensi ekonomi Laut belum dimanfaatkan secara optimal
- 7) Kontribusi Koperasi dan UMKM masih rendah pada penciptaan nilai tambah ekonomi
- 8) Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih rendah
- 9) Insfrastruktur dan literasi digital masih rendah
- 10) Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan
- 11) Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi penggunaan energi juga masih rendah.
- 12) Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan ekonomi hijau
- 13) Integrasi ekonomi domestik belum optimal, sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih terbatas
- 14) Peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah
- 15) Kualitas Pendidikan masih rendah
- 16) Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemahaman pemanfaatan jaminan social juga masih rendah
- 17) Kualitas regulasi yang rendah berdampak pada tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi baik pusat maupun daerah
- 18) Kelembagaan instansi public masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif
- 19) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif
- 20) Manajemen talenta belum diimplementasikan secara merata ke seluruh KL/D
- 21) ASN rentan terhadap intervensi politik
- 22) Kualitas pelayanan public belum merata
- 23) Transformasi digital masih menghadapi tantangan yang sangat mendasar, seperti disparitas infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar daerah, terutama kesenjangan antar kota – desa yang cukup tinggi
- 24) Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat
- 25) Integritas pada partai politik masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar
- 26) Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal

- 27) Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
- 28) Demokrasi masih terbatas pada hal-hal procedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan
- 29) Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta isu geopolitik Kawasan terutama di perbatasan
- 30) Pancasila belum sepenuhnya di implementasikan ke dalam norma dan praktek kehidupan, karakter dan jati diri bangsa dalam menghadapi budaya global
- 31) Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
- 32) Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih tinggi
- 33) Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah, namun masih jauh di bawah kebutuhannya
- 34) Dalam konektivitas domestic dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal
- 35) Belum efektifnya upaya menajada konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, KL dan daerah, serta konsistensi pencapaian jangka Panjang
- 36) Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sector public pusat dan daerah serta non public masih terbatas

3.2.3 Isu Strategis Provinsi Riau

1. Belum optimalnya penataan kota, yang meliputi tersedianya hunian layak dan terjangkau, akses penanganan sampah di lingkungan permukiman, tersedianya ruang terbuka hijau.
2. Masih tingginya indeks risiko bencana belum tersedia fasilitas kota tangguh bencana, belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
3. Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum layak dan sanitasi yang memadai, termasuk infrastruktur air dan kelembagaannya
4. Masih rendahnya ketahanan terhadap perubahan iklim
5. Belum meratanya layanan terhadap perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, air bersih, sanitasi layak, listrik, dan korban bencana alam.
6. Belum meratanya akses terhadap layanan kesehatan pada ibu, bayi dan balita
7. Masih tingginya prevalensi penyakit tropis, penyakit tidak menular

8. Tidak tersedianya data kesehatan mental, penyalahgunaan NAPZA, dan perlindungan lainnya
9. Belum meratanya akses dan fasilitas Pendidikan
10. Belum tersedianya lapangan kerja yang memadai

3.2.4 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil kajian KLHS RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 terdapat empat isu paling strategis, yaitu:

1. Masih rendahnya lapangan pekerjaan yang layak, dan pengembangan UMKM;
2. Pertumbuhan ekonomi daerah rendah dengan distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata serta proporsi pesereta jaminan sosial ketenagakerjaan rendah;
3. Masih rendahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam; dan
4. Pemulihan lahan kritis belum optimal dan masih rendahnya pelestarian, restorasi serta pemanfaatan ekosistem hutan dan lahan basah.

3.2.5 Isu Strategis Kabupaten Siak

Isu strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, dimana isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Kabupaten Siak. Isu strategis ini didapat dari permasalahan daerah dan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya seperti yang telah dipaparkan di atas. Berikut disampaikan beberapa isu strategis yang berhasil dihimpun.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak yang berdaya saing dan relevan dengan perkembangan jaman, maka diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat guna mewujudkannya, diantaranya adalah: (1) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal, (2) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan gerakan hidup sehat, (3) Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penerapan *zero new stunting*, (4) Peningkatan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak pembangunan pemuda dan ketahanan keluarga, (5) Peningkatan kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, (6) Peningkatan efektivitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Pertumbuhan ekonomi

Untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi. Demikian halnya dengan Kabupaten Siak, diperlukan upaya transformasi ekonomi untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan. Transformasi ekonomi diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak tetap berkelanjutan dan cita-cita untuk mencapai pendapatan perkapita tinggi bisa terwujud. Transformasi ekonomi merupakan proses menyeluruh dan terus menerus untuk menggerakkan sumber daya manusia dan sektor-sektor lain yang memiliki produktivitas rendah ke arah yang lebih tinggi. Upaya meningkatkan produktivitas ini dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Dalam proses transformasi ekonomi ini berbagai kebijakan perlu ditempuh untuk memperkuat struktur perekonomian dan mempercepat peningkatan produktivitas. Transformasi ekonomi merupakan upaya untuk keluar dari jebakan Indonesia sebagai negara dengan penghasilan ekonomi menengah. Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi dari berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah menjadi berbasis industri bernilai tambah tinggi dengan didukung oleh teknologi serta inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama (1) Pertanian dan Peningkatan ketahanan pangan daerah, (2) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM (3) Pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah (4) penerapan transformasi hijau dan biru, (5) penerapan teknologi informasi, (6) investasi yang besar dalam riset dan inovasi serta didukung oleh pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi memerlukan kolaborasi berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya.

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka upaya mendukung antisipasi pertumbuhan transportasi udara lewat pelayanan Bandara SSK II di Pekanbaru

yang akan mencapai 9,4 juta penumpang pada tahun 2025 hal ini sesuai dengan Feasibility Study (FS) pemindahan kelayakan pembangunan bandar udara SSK II tahun 2006 kabupaten siak masuk sebagai wilayah yang layak pengembangan bandara baru pengganti bandara SSK II, (2) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (3) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

3. Lingkungan hidup dan penanganan bencana

Lingkungan hidup dan penanganan bencana menjadi salah satu isu strategis dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini makin menjadi perhatian berbagai pihak. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Siak. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Isu ini mencakup (a) Mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, (b) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (c) Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan (d) Penataan ruang yang mendukung penanggulangan kawasan rawan bencana.

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Meskipun nilai reformasi birokrasi terus meningkat, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak perlu terus mendorong reformasi birokrasi hingga level pemerintah terdepan agar pemerintahan dapat tetap dinamis, adaptif, dan efisien seiring perubahan zaman. Terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui (1) transformasi digital serta memastikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas menjadi visi bersama seluruh elemen pemerintahan, (2) Penguatan penegakan regulasi daerah, (3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, (4) Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, (5) Peningkatan dan pemertaan kualitas pelayanan public, (6) Peningkatan profesionalisme ASN, dan (7) Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam pembangunan daerah.

3.2.6 Pengintegrasian Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 dalam Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045

Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 tersebut selanjutnya dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Siak. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ini merupakan penguatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini diperlukan agar Program Pembangunan sebagai turunan dari Arah Kebijakan RPJPD nantinya tetap berada dalam koridor prinsip pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan hasil rumusan isu strategis serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu dilakukan intervensi maka dilakukan rumusan terhadap rekomendasi yang secara rinci disajikan pada Tabel dibawah ini.

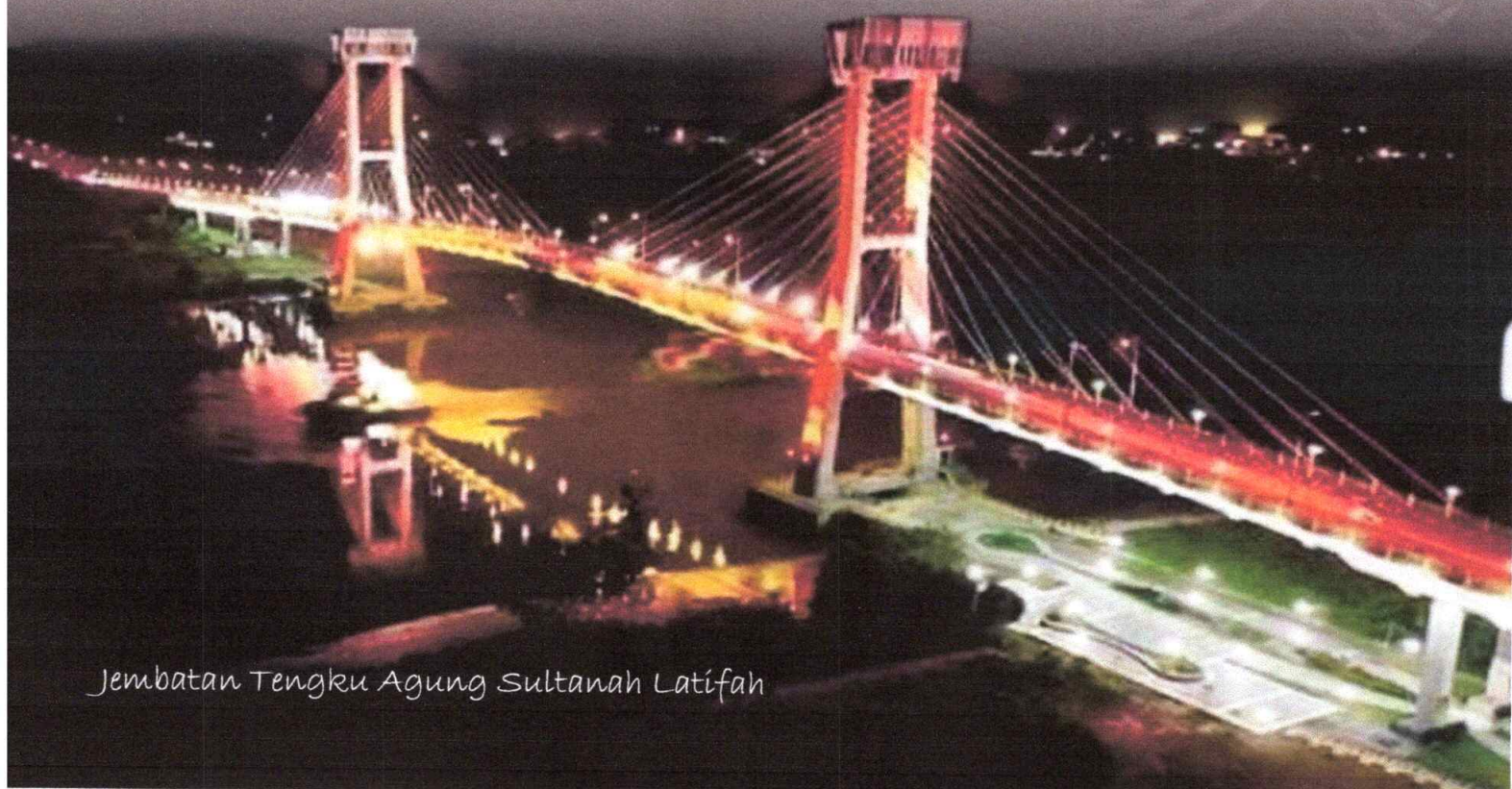
Tabel 3. 6
Pengintegrasian Rekomendasi KLHS ke Dalam Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045

No	TPB yang di intervensi	Isu Strategis	Arah Kebijakan
1	TPB 1 Tanpa Kemiskinan	1. Pertumbuhan ekonomi daerah rendah dengan distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata	Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
		2. Pertumbuhan ekonomi daerah rendah dengan distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata serta proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan rendah.	Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
		3. Masih rendahnya lapangan pekerjaan yang layak, dan pengembangan UMKM.	Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
		4. Masih rendahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam.	a) Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada b) Perencanaan strategi mitigasi dan adaptasi perlindungan kebencanaan
2	TPB 2 Tanpa Kelaparan	1. Masih rendahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan serta pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan
		2. Pertumbuhan ekonomi daerah rendah dengan distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata	Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
		3. Pertumbuhan ekonomi daerah rendah dengan distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata	a) intervensi pencegahan dan penanganan stunting serta peningkatan peran posyandu dalam peningkatan Kesehatan ibu dan anak

No	TPB yang di intervensi	Isu Strategis	Arah Kebijakan
			b) Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
3	TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Pemulihan lahan kritis belum optimal dan masih rendahnya pelestarian, restorasi serta pemanfaatan ekosistem hutan dan lahan basah.	Meningkatkan kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4	TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.	Pertumbuhan ekonomi daerah rendah dengan distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata serta proporsi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan rendah. Masih rendahnya lapangan pekerjaan yang layak, dan pengembangan UMKM.	a) Meningkatkan kompetensi wirausaha muda
			b) Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
			c) Peningkatan kuantitas dan kualitas dari ragam destinasi pariwisata.
			d) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi
5	TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Masih rendahnya lapangan pekerjaan yang layak, dan pengembangan UMKM.	a) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi
			b) Pengembangan industri manufaktur dan hilirisasi industri
6	TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan	Pertumbuhan ekonomi daerah rendah dengan distribusi ketimpangan pendapatan antar penduduk kurang merata	Peningkatan kualitas kebijakan fiskal yang mendukung redistribusi yang lebih merata bagi masyarakat miskin dan rentan
7	TPB 11 Kota dan Komunitas Berkelanjutan	Masih rendahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam.	a) Perencanaan strategi mitigasi dan adaptasi perlindungan kebencanaan
			b) Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
			c) Pemantapan Pekansikawan sebagai wilayah metropolitan berbasis kota hijau
8	TPB 13 Penanganan dan Perubahan Iklim	Masih rendahnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam.	a) Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
			b) Pengembangan inovasi teknologi penanggulangan bencana
9	TPB 15 Ekosistem Daratan	Pemulihan lahan kritis belum optimal dan masih rendahnya pelestarian, restorasi serta pemanfaatan ekosistem hutan dan lahan basah.	a) Tidak memerlukan upaya tambahan dan tetap melanjutkan arah kebijakan yang sudah ada
			b) Peningkatan penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan hutan secara illegal

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD 2025-2045 Kab. Siak

BAB IV



Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 merupakan satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Karena itu diperlukan keselarasan antara visi dan misi RPJPD Kabupaten Siak dengan visi dan misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Riau.

Pernyataan visi dan misi Kabupaten Siak dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan tahapan-tahapan perencanaan selanjutnya dengan realisasi-realisisi arah kebijakan. Peran dari visi dan misi akan meningkatkan daya dorong pencapaian tujuan pembangunan daerah jika mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah, hingga swasta sebagai penggerak pembangunan Kabupaten Siak.

4.1 Visi

4.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Sebagaimana disajikan dalam dokumen RPJPN bahwa rumusan Visi Indonesia Emas 2045: **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**, menjadi titik tolak bagi seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia dalam penyusunan misi pembangunan jangka panjangnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pada sub bab selanjutnya akan dilakukan telaah terhadap visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini.

Gambar 4. 1
Visi Indonesia Emas Tahun 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Gambar 4. 2
Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, lima sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

4.1.2 Visi Siak 2045

Dengan mempertimbangkan kondisi Kabupaten Siak saat ini, isu strategis serta perkiraan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, kesepakatan seluruh pemangku kepentingan dan memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, serta sinkronisasi dengan visi nasional, maka Visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 adalah:

SIAK SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN

Pengertian dari masing-masing kata kunci yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pusat Kebudayaan Melayu

Pada tahun 2045, di Kabupaten sistem nilai yang diterapkan secara menyeluruh dalam segala segi kehidupan adalah budaya melayu. Penerapan budaya melayu itu mencakup kehidupan sosial, adat dan budaya.

Sebagai daerah bekas kesultanan Siak Sri Indrapura, Budaya melayu sudah sejak awal merupakan Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Siak. Budaya melayu yang merupakan hasil interaksi budaya yang datang secara bergelombang sejak kedatangan masyarakat gelombang pertama yang datang ke wilayah ini. Ajaran agama Islam merupakan Sistem Nilai yang memberikan pengaruh yang terbesar terhadap terbentuknya budaya melayu.

Sebagai daerah yang sedang berkembang dan didukung oleh budaya orang melayu yang bersifat terbuka terhadap suku bangsa yang ada di seluruh nusantara, maka Kabupaten Siak di samping budaya Melayu yang dominan, diperkaya juga dengan budaya-budaya lain yang dibawa oleh para pendatang di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, budaya Melayu berfungsi sebagai payung negeri yang dapat menaungi budaya lain yang ada di kabupaten Siak.

2) Maju

Pada tahun 2045, Kabupaten Siak menjadi kabupaten yang maju, terutama dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi, sehingga seluruh pelayanan lebih cepat, murah dan efisien. Tingkat kemandirian keuangan daerah relatif sudah tinggi, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. PDRB di luar migas meningkat, sehingga ketergantungan ekonomi daerah terhadap migas bisa diminimalisir.

3) Berkelanjutan

Sebagai Kabupaten yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka arah pembangunan akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan di aplikasikan melalui pembangunan Siak Kabupaten Hijau yang bertujuan:

- a. Perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, kebudayaan beserta kearifan lokal;
- b. Pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
- c. Pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam daerah yang dilakukan baik melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

4.2 Sasaran Visi

Pencapaian Kabupaten Siak sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Yang Maju Dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Sasaran Visi

Visi	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target			
					Tahap I (2029)	Tahap II (2034)	Tahap III (2039)	Tahap IV (2045)
Siak Sebagai Pusat Kebudayaan Melayu Yang Maju Dan Berkelanjutan	Peningkatan Pendapatan per kapita	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	230,42	236,25 - 271,45	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 800
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	n/a	18,88	30,50	40,55	50,75	68,49
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	39,96	38,19 - 44,78	38,19 - 40,00	40,00 - 42,25	42,25 - 43,50	43,50 - 45,00
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,23	4,98	3,98 - 4,20	2,98 - 3,20	1,98 - 2,20	0,8 - 1,00
		Rasio gini (Indeks)	0,325	0,300 - 0,325	0,300 - 0,325	0,275 - 0,300	0,275 - 0,300	0,250 - 0,275
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	10,68	10,7	10,01 - 10,99	10,01 - 10,99	10,01 - 10,99	10,01 - 10,99
		Pertumbuhan Ekonomi	4,35	3,5 - 4,00	4 - 4,5	4,5 - 5	5 - 5,55	5,55 - 6
	Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah Untuk Mencapai Visi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,89	3,01	3,01 - 3,27	3,34 - 3,62	3,69 - 4,00	4,09 - 4,52
		Indeks Pembangunan Kebudayaan Melayu (IPKM)	n/a	55 - 58	55 - 58	59 - 63	64 - 68	69 - 73
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,75 (angka 2022)	73,00 - 74,00	74,01 - 75,00	75,01 - 76,00	76,01 - 80,99	> 81,0
	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	75,97	76,01 - 77,00	77,00 - 80,00	80,01 - 82,00	82,01 - 83,00	83,01 - 85,00
	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		35,06	60,25	70,50	80,65	96,61
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,07	70,07	70,79	72,64	74,44	76,51

Sumber : surat edaran gubernur riau No. 000.7.2.1/Bappedalitbang/3379 tahun 2024

4.3 Misi

Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Kabupaten Siak hingga tahun 2045 melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Siak. Adapun berkenaan dengan arti dan maksud visi Kabupaten Siak 2045 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan Tata Kelola Ke pemerintahan efektif dan akuntabel. Transformasi Tata Kelola untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas serta kemiskinan dan ketimpangan yang rendah. Misi ini diarahkan kepada peningkatan tata kelola ke pemerintahan (*good governance*) yang efektif dan akuntabel serta efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Tata kelola ke pemerintahan pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

2. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas;

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan *competitiveness human capital* dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai adanya kemajuan teknologi yang disruptive. Untuk dapat survive, unggul dan sukses di masa depan, sumber daya manusia di Kabupaten Siak harus sehat, berpengetahuan dan berketerampilan serta berkarakter positif yang kuat

3. Mewujudkan Transformasi ekonomi untuk meningkatkan Produktivitas daerah

Misi ini bertujuan : (1) Meningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi. (2) Membangun ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerja sama antar daerah (3) Meningkatkan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (4) Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan (5) Mewujudkan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Misi ini adalah upaya memperkuat ekonomi Kabupaten Siak dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar,

dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi regional dan nasional. Ekonomi berbasis pertanian terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

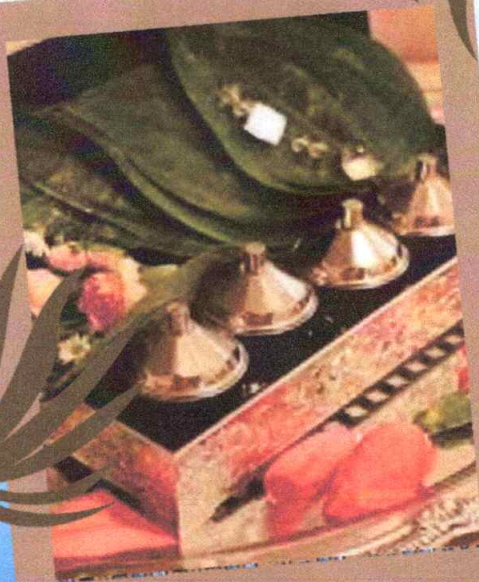
4. Membangun Sarana, Prasarana dan infrastruktur yang Berkualitas, merata dan berkeadilan.

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar berkualitas menjadi kebutuhan setiap masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Siak. Infrastruktur yang merata dan berkeadilan, mantap dan baik dengan menjadikan ibu kota Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, konektivitas antar kecamatan dan jalan kota dalam kondisi mantap, akses air minum dan sanitasi layak, ketersediaan infrastruktur SDA dalam kondisi baik, pola ruang dan struktur ruang, hunian layak huni

5. Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau

Misi ini sebagai upaya untuk membangun individu dan masyarakat yang berkarakter yang mampu menyeimbangkan hubungan yang imbang antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam, *resilient* terhadap bencana perubahan iklim, berorientasi pada ekonomi hijau, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan energi dan air, penurunan Emisi GRK harmonisasi konflik kehutanan, dan memelihara kelestarian Kawasan Hutan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan serta terimplementasi kedalam kebijakan-kebijakan dan menjadikan Kabupaten Siak tangguh dalam menghadapi bencana yang disebabkan perubahan iklim.

BAB V



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Siak 2025-2045

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah membagi tahapan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke dalam empat tahapan lima tahunan. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahapan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya.

Pada lima tahun pertama, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Siak ditekankan pada penguatan pondasi transformasi. Pada tahap kedua, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Siak ditekankan pada akselerasi transformasi. Pada tahap ketiga, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Siak ditekankan pada memulai langkah untuk ekspansi regional. Pada lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan ditekankan pada terwujudnya visi jangka panjang yaitu " **PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN**"

Tabel 5. 1
Upaya Transformatif Super Prioritas (Ghame Changer)

Misi	Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer)	
	RPJPN 2025-2045	RPJPD Kabupaten Siak 2025-2045
(1)	(2)	(3)
Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif	Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi	Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga
	Penguatan integritas partai politik.	Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat
	Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advocaat generaal.	

Misi	Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer)	
	RPJPN 2025-2045	RPJPD Kabupaten Siak 2025-2045
(1)	(2)	(3)
	Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industri nasional	
	Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis resiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal	
	Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran	
Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas	Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun
	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadipendidikan	
	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.	
	Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis (TBC) dan kusta)	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif dan terintergrasi	Penuntasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Adaptif Terintegrasi

Misi	Kerangka Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changer)	
	RPJPN 2025-2045	RPJPD Kabupaten Siak 2025-2045
(1)	(2)	(3)
	<i>Penguatan karakter dan jati diri bangsa</i>	
Mewujudkan Transformasi ekonomi untuk meningkatkan Produktivitas daerah	<i>Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.</i>	
	Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor	Pengembangan Industri pengolahan dan peningkatan Investasi
	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transformasi hijau	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman
	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water)	Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan
	<i>Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.</i>	
	<i>Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)</i>	
Membangun Sarana dan Prasarana dan infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan berkeadilan.	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	Integrasi Infrastruktur Konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi
Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Lingkungan hidup berkualitas dan reformasi pengelolaan sampah

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Siak dibagi ke dalam empat periode RPJMD yaitu periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III (2035-2039), periode IV (2040-2045).

1. RPJMD Tahap I (2025-2029) Membangun Fondasi Transformasi Pembangunan;

Pembangunan tahap pertama merupakan pondasi awal pembangunan dalam perubahan penyelenggaraan sistem kinerja pemerintah. Arah kebijakan ini diharapkan mampu membangun pondasi yang kuat dengan sistem pemerintahan yang profesional sehingga akan membantu proses pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahap ini:

Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dengan focus (1) Kelembagaan tepat fungsi, (2) Peningkatan Kualitas ASN pelayanan publik berbasis TI

Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas, dengan focus (1) Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan secara merata, (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara merata sesuai dengan kewenangan.

Mewujudkan Transformasi ekonomi untuk meningkatkan Produktivitas daerah, dengan focus (1) Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian, hilirisasi SDA, peningkatan kualitas UMKM BUMD dan pariwisata, (2) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan incubator bisnis, (3) Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan, (4) Penataan dan restrukturisasi BUMD, (4) Mengembangkan ekosistem pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Mewujudkan Sarana dan Prasarana dan infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan berkeadilan, dengan focus Perencanaan dan pemenuhan pelayanan dasar air bersih, transportasi, energi, prasarana pertanian, pengendalian air dan pengelolaan sungai terpadu, Pengamanan kawasan rencana pembangunan bandara.

Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan focus (1) Peningkatan Pemajuan objek budaya Melayu; (2) penerapan Siak Hijau dan prinsip pembangunan berkelanjutan

2. RPJMD Tahap II (2030-2034) Mewujudkan Akselerasi Transformasi Pembangunan;

Pada tahap kedua, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Siak ditekankan pada akselerasi transformasi. Arah kebijakan pada tahap ini adalah:

Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dengan focus pada (1) Kelembagaan kolaboratif; (2) ASN sejahtera dan profesional; (3) masyarakat sipil partisipatif

Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas, dengan focus (1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di semua tingkatan, (2) Meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua tingkatan, dengan fokus pada pembangunan sekolah-sekolah yang berkualitas dan melibatkan komunitas dalam proses Pendidikan

Mewujudkan Transformasi ekonomi untuk meningkatkan Produktivitas daerah, dengan focus (1) Peningkatan produktifitas secara massif, perluasan sumber pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan daerah (2) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, (3) Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan, dan (4) Peningkatan produktivitas BUMD, (5) Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa.

Mewujudkan Sarana dan Prasarana dan inrastruktur yang Berkwalitas, Merata dan berkeadilan, dengan focus Percepatan dan pemerataan pembangunan prasarana dasar berkualitas, Pengamanan kawasan rencana pembangunan bandara.

Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan focus pemantapan upaya pemajuan objek budaya Melayu; memantapkan penerapan Siak Hijau dan pembangunan berkelanjutan

3. RPJMD Tahap III (2035-2039) Mewujudkan Ekspansi Regional;

Pada tahap ketiga, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Siak ditekankan pada memulai langkah untuk ekspansi regional. Arah kebijakan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dengan focus (1) Kelembagaan adaptif; (2) ASN kompetitif; (3) masyarakat sipil mandiri

Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas, dengan focus (1) Penguatan dan peningkatan sumberdaya manusia di bidang kesehatan, dan (2) Penguatan dan peningkatan sumberdaya manusia di bidang pendidikan

Mewujudkan Transformasi ekonomi untuk meningkatkan Produktivitas daerah, dengan focus (1) Penguatan Siak sebagai pembangkit ekonomi domestik dan regional yang terintegrasi secara global, (2) Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya, (3) Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif, (4) Pemantapan produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, (5) Memantapkan pembangunan pedesaan Kabupaten Siak yang adaptif dan berkelanjutan, (6) Terciptanya keseimbangan pembangunan Kota dan Desa yang memperhatikan aspek keberlanjutan.

Mewujudkan Sarana dan Prasarana dan infrastruktur yang Berkwalitas, Merata dan berkeadilan, dengan focus Pemantapan kualitas prasarana dasar dan keberlanjutan pelayanannya, Pengamanan kawasan rencana pembangunan bandara.

Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan focus (1) Penguatan Siak sebagai pusat pemajuan objek budaya Melayu; (2) penguatan Siak Hijau dan pembangunan berkelanjutan

4. RPJMD Tahap IV (2040-2045) Terwujudnya Kabupaten Siak Pusat Kebudayaan Melayu;

Pada lima tahun terakhir, arah kebijakan pembangunan ditekankan pada terwujudnya visi jangka panjang yaitu “ **SIAK SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN** ” tahun 2045. Upaya perwujudan pembangunan ini, meliputi:

Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dengan focus Regulasi yang adaptif dan taat asas; tata kelola pemerintahan profesional dan berintegritas

Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas dengan Terwujudnya SDM Kabupaten Siak yang cerdas dan sehat. **Mewujudkan Transformasi ekonomi** untuk meningkatkan Produktivitas daerah dengan terwujudnya Kabupaten Siak berpendapatan sangat tinggi

Mewujudkan Sarana dan Prasarana dan infrastruktur yang Berkwalitas, Merata dan berkeadilan, dengan focus Prasarana dasar yang handal dan berkelanjutan

Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan focus Pemajuan Budaya Melayu pada taraf yang tinggi dalam lingkungan yang berkelanjutan

Tabel 5. 2
ARAH KEBIJAKAN RPJPD KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2045

VISI	MISI RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL	TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK PUSAT BUDAYA MELAYU
SIAK SEBAGAI PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan tepat fungsi ▪ Peningkatan Kualitas ASN pelayanan publik berbasis TI 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan kolaboratif; ▪ ASN sejahtera dan profesional; masyarakat sipil partisipatif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelembagaan adaptif; ▪ ASN kompetitif; ▪ masyarakat sipil mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi yang adaptif dan taat asas; ▪ tata kelola pemerintahan profesional dan berintegritas
	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan secara merata ▪ Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara merata sesuai dengan kewenangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di semua tingkatan ▪ Meningkatkan akses dan mutu pendidikan di semua tingkatan, dengan fokus pada pembangunan sekolah-sekolah yang berkualitas dan melibatkan komunitas dalam proses Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan dan peningkatan sumberdaya manusia di bidang kesehatan ▪ Penguatan dan peningkatan sumberdaya manusia di bidang pendidikan 	Terwujudnya SDM Kabupaten Siak yang cerdas dan sehat
	Mewujudkan Transformasi ekonomi untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian, hilirisasi SDA, 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktifitas secara massif, perluasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Siak sebagai pembangkit ekonomi domestik dan 	Kabupaten Siak berpendapatan sangat tinggi

VISI	MISI RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL	TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK PUSAT BUDAYA MELAYU
	meningkatkan Produktivitas daerah	<p>peningkatan kualitas UMKM BUMD dan pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan incubator bisnis. • Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. • Penataan dan restrukturisasi BUMD • Mengembangkan ekosistem pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai 	<p>sumber pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. • Pengembangan pusat-pusat inkubasi, pusat kreatif, infrastruktur dasar dan digital, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan. • Peningkatan produktivitas BUMD 	<p>regional yang terintegrasi secara global</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya. • Pemantapan pusat-pusat inkubasi dan pusat kreatif. • Pemantapan produktivitas dan pengembangan bisnis BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah • Memantapkan pembangunan pedesaan Kabupaten 	

VISI	MISI RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL	TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK PUSAT BUDAYA MELAYU
		dengan kebutuhan zaman.	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa 	<p>Siak yang adaptif dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Terciptanya keseimbangan pembangunan Kota dan Desa yang memperhatikan aspek keberlanjutan 	
	Membangun Sarana dan Prasarana dan inrastruktur yang Berkwalitas, Merata dan berkeadilan.	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan dan pemenuhan pelayanan dasar air bersih, transportasi, energi, prasarana pertanian, pengendalian air, dan pengelolaan sungai terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan dan pemerataan pembangunan prasarana dasar berkualitas Pengamanan kawasan rencana pembangunan bandara 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kualitas prasarana dasar dan keberlanjutan pelayanannya Pengamanan kawasan rencana pembangunan bandara 	<ul style="list-style-type: none"> Prasarana dasar yang handal dan berkelanjutan

VISI	MISI RPJPD 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		MEMBANGUN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN AKSELERASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN	MEWUJUDKAN EKSPANSI REGIONAL	TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK PUSAT BUDAYA MELAYU
		<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan kawasan rencana pembangunan bandara 			
	Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pemajuan objek budaya Melayu; penerapan Siak Hijau dan prinsip pembangunan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Memantapkan upaya pemajuan objek budaya Melayu; memantapkan penerapan Siak Hijau dan pembangunan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Siak sebagai pusat pemajuan objek budaya Melayu; penguatan Siak Hijau dan pembangunan berkelanjutan 	Pemajuan Budaya Melayu pada taraf yang tinggi dalam lingkungan yang berkelanjutan

5.2 Sasaran Pokok

Sasaran pokok rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam capaian pembangunan 20 tahunan untuk mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah dirinci berdasarkan prioritas masing-masing sasaran pada setiap tahapan pembangunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian suatu indikator kinerja sasaran pokok.

Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan pada masing – masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok menjelaskan keterhubungan dengan visi/misi yang menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Selanjutnya sasaran pokok juga dirumuskan dalam 17 Arah Pembangunan, arah kebijakan transformasi pembangunan daerah dan 40 indikator utama pembangunan. Arah Pembangunan Kabupaten Siak didefinisikan dengan Arah Pembangunan Siak 1 (APS1) hingga Arah Pembangunan Siak 17 (APS17) sebagai berikut:

- 1) APS1. Kesehatan untuk Semua;
- 2) APS2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
- 3) APS3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
- 4) APS4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi;
- 5) APS5. Transformasi Digital;
- 6) APS6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
- 7) APS7. Penerapan Ekonomi Hijau;
- 8) APS8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
- 9) APS9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
- 10) APS10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
- 11) APS11. Stabilitas Ekonomi Makro;
- 12) APS12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan;
- 13) APS13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
- 14) APS14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;

- 15) APS15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
- 16) APS16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
- 17) APS17. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

Adapun sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital

Merupakan sasaran pokok yang di latarbelakangi oleh belum optimalnya Kinerja Pelayanan Publik dan tata kelola Pemerintahan yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Siak (APS9) Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Sasaran pokok ini untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Siak yang progresif dan responsif menjawab tantangan perubahan dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, diperlukan transformasi tata kelola menuju perencanaan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas. Adapun keberhasilan dari sasaran pokok ini akan tercermin dalam tingkat integritas aparat pemerintahan yang tinggi, yang ditandai dengan penurunan tingkat korupsi. Selain itu, tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif dapat dilihat dari kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang diiringi dengan inovasi sistem berbasis elektronik. Perancangan regulasi yang harmonis juga menjadi tolak ukur dalam sasaran pokok ini agar tercipta regulasi yang berkualitas, dan akuntabel dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan regulasi dan sistem pelayanan publik yang berkualitas, harmonis, adaptif dan berintegritas tersebut dilakukan melalui arah kebijakan transformasi tata kelola, Sasaran Pokok ini untuk mewujudkan Misi Satu RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

2. Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Merupakan sasaran pokok yang dirumuskan berdasarkan permasalahan daerah seperti Akses pendidikan yang terbatas, masih rendahnya mutu pendidikan serta masih rendahnya mutu dan akses layanan fasilitas kesehatan yang akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Siak (APS1) Kesehatan untuk semua dan Arah Pembangunan Siak (APS2) Pendidikan Berkualitas yang merata serta Arah Pembangunan Siak (APS3) Perlindungan Sosial yang Adaptif. Sasaran pokok ini dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat

sehingga tercapai manusia Kabupaten Siak yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

Kesehatan Untuk Semua

Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan untuk menjamin tersedianya akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkeadilan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang adekuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Arah kebijakan untuk mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang inklusif di Kabupaten Siak adalah: (1) pemerataan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan promotif, preventif, kuratif (termasuk deteksi dini, vaksinasi terutama imunisasi rutin lengkap, penemuan kasus dan pengobatan secara masif), rehabilitatif, dan paliatif, dengan inovasi pelayanan kesehatan sesuai kondisi wilayah, termasuk wilayah dengan kesulitan geografis, (2) pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, (3) penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode pra konsepsi hingga 1.000 hari pertama kehidupan, (4) penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif, dan lanjut usia; kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta eliminasi penyakit menular terutama tuberkulosis, TB, HIV, DBD, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit bersumber binatang dan zoonosis serta penuntasan penyakit tropis terabaikan, (5) pengembangan kebijakan perencanaan keluarga untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah, (6) perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan termasuk kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan, pembiayaan dan tata kelola yang berkolaborasi antarsektor, profesi dan pemangku kepentingan, serta mewujudkan partisipasi masyarakat termasuk

swasta dalam pembangunan kesehatan, (7) pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, (8) pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan, (9) penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya finansial baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa dan masyarakat termasuk sektor swasta, (10) penguatan pendataan dan perluasan cakupan pemberian jaminan kesehatan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta masyarakat marginal, serta (11) penguatan partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam solidaritas dalam pembiayaan upaya kesehatan

Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Prinsip pembangunan pendidikan adalah inklusif dan adaptif. Prinsip inklusif berarti akses yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Siak dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Kabupaten Siak tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, fisik, mental, maupun usia (*lifelong learning*). Prinsip adaptif menekankan pada penyesuaian metode pengajaran, kurikulum, dan fasilitas pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi unik setiap individu dengan optimal. Selain itu, pembangunan pendidikan yang adaptif juga mengarahkan pada kualitas pendidikan multidisiplin dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kesuksesan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui peningkatan hasil pembelajaran peserta didik, meliputi kemampuan literasi membaca dan numerasi. Proporsi penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan seiring penambahan jumlah pekerja di bidang keahlian menengah tinggi.

Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Siak dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, akses layanan pendidikan serta mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi. Arah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas secara inklusif untuk dua puluh tahun ke depan adalah: (1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah dan khusus melalui: (a) perluasan bantuan pembiayaan pendidikan, (b) penyediaan sarana prasarana sesuai standar dan aman bencana; (2) penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada: (a)

penguatan kurikulum pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis *softskill* dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*) dan potensi lokal daerah (termasuk potensi bencana), serta (b) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; (3) penguatan revitalisasi dan relevansi pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berbasis potensi dan keunggulan daerah, teknologi serta berorientasi pada kompetensi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*).

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial tersebut bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengamanan dari risiko yang mungkin dihasilkan saat terjadi ancaman, serta jaminan bagi setiap individu untuk hidup sejahtera dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Perlindungan sosial diarahkan bersifat inklusif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lanjut usia, dan penduduk rentan lainnya memiliki kesetaraan akses terhadap layanan dan manfaat perlindungan sosial sehingga dapat mengusahakan kesejahteraan dan penghidupan secara mandiri dan berdaya. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi gambaran dari ketangguhan masyarakat serta keberhasilan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial yang dilakukan, selain peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang berguna untuk memastikan keamanan finansial dan sosial kepada pekerja. Selain itu, peningkatan persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal dapat menggambarkan inklusivitas serta partisipasi penuh dan setara pada angkatan kerja.

Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Siak dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: (1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, (2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, (3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan

kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, (4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, (5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, (6) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, Sasaran Pokok ini untuk mewujudkan Misi Dua RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

3. **Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan**

Merupakan sasaran pokok untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, dan juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia agar lebih produktif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Sasaran pokok ini akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Siak (APS4) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi dan Arah Pembangunan Siak (APS5) Transformasi Digital dan Arah Pembangunan Siak (APS6) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global. Upaya yang dilakukan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan difokuskan pada lima arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

Iptek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui (1) optimalisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian; (2) penyiapan sumber daya manusia profesional di bidang Iptek; (3) penguatan jejaring dengan berbagai

stakeholder; (4) pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung lptek dan inovasi.

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui: (1) peningkatan peluang kerja khususnya yang termasuk dalam *green jobs*, (2) investasi hijau (*green investment*); (3) pengembangan produk-produk ramah lingkungan (*circular economy*); (4) penerapan energi bersih (*green energy*); serta (5) penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan.

Transformasi digital adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas *bandwidth* besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (1) regulasi dan institusi; (2) pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan; (3) infrastruktur digital dan teknologi, (4) keterpaduan data (*data enablement*); (5) modal investasi teknologi (*financing technologies*); serta (6) riset dan inovasi.

Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan perekonomian Kabupaten Siak yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global melalui peningkatan nilai tambah komoditas yang berdaya saing global dan peningkatan sarana prasarana serta konektivitas ekonomi domestik dan global, Sasaran Pokok ini untuk mewujudkan Misi Tiga RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

4. Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana terutama untuk transportasi, ketahanan energi, air dan pangan

Merupakan sasaran pokok untuk peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana terutama untuk transportasi, ketahanan energi, air dan pangan difokuskan pada pemerataan dan pemenuhan prasarana dasar. Sasaran pokok ini akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Siak (APS4) lptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, Arah Pembangunan Siak (APS8) Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi, Arah Pembangunan Siak (APS15) Lingkungan Hidup Berkualitas dan Arah

Pembangunan Siak (APS16) Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim serta Arah Pembangunan Siak (APS17) Berketahanan Energi, Air dan kemandirian Pangan. Dengan arah kebijakan sebagai berikut: (1) meningkatkan konektivitas fisik dan virtual, (2) mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, (3) memenuhi prasarana dasar, (4) mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan, (5) antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut, (6) perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas

Pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di desa dan kota. Pengembangan wilayah Kota Siak Sri Indrapura sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi regional dan nasional, serta memicu perkembangan pembangunan perdesaan. Upaya yang dilakukan untuk memicu terwujudnya pengembangan pembangunan perdesaan antara lain: (1) penumbuhan wirausaha baru di perdesaan; (2) hilirisasi produk-produk unggulan di wilayah perdesaan; (3) pemberdayaan ekonomi lokal; (4) penguatan akses pasar; (5) intensifikasi dan diversifikasi ekonomi lokal; (6) pengembangan infrastruktur; (7) pengembangan sektor jasa, Sasaran Pokok ini untuk mewujudkan Misi Empat RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

5. **Meningkatnya Kualitas Pengamalan Budaya Melayu dan Kelestarian Lingkungan**

Merupakan sasaran pokok untuk Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Sasaran pokok ini akan diarahkan kepada Arah Pembangunan Siak (APS7) Penerapan Ekonomi Hijau, Arah Pembangunan Siak (APS10) Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh dan Demokrasi substansial, Arah Pembangunan Siak (APS11) Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Arah Pembangunan Siak (APS13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Arah Pembangunan Siak (APS14) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, Arah Pembangunan Siak (APS15) Lingkungan Hidup Berkualitas dan Arah Pembangunan Siak (APS16) Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok

Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan difokuskan pada arah pembangunan beserta arah kebijakannya sebagai berikut:

Perwujudan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat tercapai melalui: (1) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; (2) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (3) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (5) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan

Peningkatan ketangguhan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlindungi sesuai siklus kehidupan, pembagian peran yang setara, serta didukung lingkungan yang aman dan sehat. Keluarga sebagai unit terkecil pada struktur masyarakat berperan penting dalam mewujudkan individu Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (1) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (2) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (3) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (4) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia.

Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*) dengan arah kebijakan: (1) penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif; (2) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan

penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (3) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan: (1) perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju gaya hidup berkelanjutan; (2) peningkatan kualitas air dan udara melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau (3) peningkatan pengelolaan limbah B3 berkelanjutan; (4) peningkatan pengelolaan ekosistem daratan, laut dan pesisir yang terintegrasi; (5) pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan; dan (6) perumusan regulasi daerah sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, juga dibutuhkan implementasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan arah kebijakan pengelolaan air limbah dan sampah melalui penerapan teknologi tepat guna, terpadu, dan terjangkau, serta pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air.

Ketahanan energi diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pasokan energi yang stabil, aman, dan berkelanjutan melalui diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta pengembangan energi baru terbarukan. Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air adalah konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Hal ini didukung oleh peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air serta sistem informasi sumber daya air. Dari sisi pemanfaatan, pembangunan infrastruktur ketahanan air perlu didorong untuk mewujudkan akses air minum aman serta penyediaan air minum perpipaan bagi rumah tangga di wilayah perkotaan.

Resiliensi terhadap bencana diperlukan untuk mengurangi kerugian langsung maupun tidak langsung akibat bencana. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana antara lain: (1) identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan; (2) penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah; (3) penyediaan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; (4) pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; peningkatan kapasitas

pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (5) pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim. **Penerapan pembangunan yang rendah karbon** untuk mewujudkan *Net Zero Emission* dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup: (1) peningkatan rehabilitasi hutan, lahan serta mangrove, penghambatan laju deforestasi, serta pencegahan penurunan cadangan karbon, (2) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT, (3) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (4) pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular; (5) pengembangan industri hijau; dan (6) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon, Sasaran Pokok ini untuk mewujudkan Misi Lima RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045.

Pencapaian pembangunan daerah diukur dengan indikator-indikator sasaran dan sasaran pokok yang ada di RPJPD Kabupaten Siak. Dengan adanya target pencapaian pada tiap indikator maka kegagalan dan keberhasilan pembangunan dapat terlihat. Sehingga keterkaitan visi, misi, sasaran, sasaran pokok dan indikator sasaran beserta target capaian pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5. 3
SASARAN POKOK RPJPD 2025-2045 KABUPATEN SIAK

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target				
							Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun masyarakat yang Sehat dan Cerdas	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	APS1. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,72	74,18	77,05	79,92	82,79	86,66
				2	Kesehatan Ibu dan Anak						
				a)	Jumlah Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	204	110	72	47	27	12
				b)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10,4	9,9	8,90	5,5	3,5	2,5
				3	Penanganan Tuberkulosis:						
			a)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	30%	50%	50%	70%	80%	90%	
			b)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	89%	90%	90%	90%	90%	100%	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			APS2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:						
				a)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	SD/ Sederajat										
	▪ Literasi Membaca	82,08	82,14	86,43	91,79	97,14	100				

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target				
							Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				SMP/ Sederajat	▪ Numerasi	55,91	69,64	76,79	85,71	94,64	98,94
					▪ Literasi Membaca	85,31	87,08	89,33	92,13	94,94	100,00
					▪ Numerasi	38,42	78,65	83,15	88,76	94,38	100,00
					b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,88	9,9	10,7	11,7	12,7	13,9
					c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,86	12,88-13,28	13,28-13,78	13,78-14,28	14,28-14,88	14,88-15,07
					6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Na	7,46	8,76	10,72	13,10	16,68
				APS3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	7 Tingkat Kemiskinan (%)	5,23	5,02 - 5,07	3,98 -4,20	2,98 - 3,20	1,98 - 2,20	0,8 -1,00
					8 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	78,53	80	85	90	92	95
					9 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,35	3	5	10	15	20
				2 Mewujudkan Transformasi ekonomi untuk meningkatkan Produktivitas daerah	Meningkatnya perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan	APS4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	10 Rasio Industri Pengolahan (%)	39,96	38,19 - 44,78	38,19 -40,00	40,00-42,25
11 Pengembangan Pariwisata											
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,05	0,05 - 0,05	0,05-0,05				0,05-0,10	0,10-0,15	0,15-0,20		
			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	4.006	5.350	8.025	12.038	18.056	27.084		

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target			
							Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				c) Jumlah Kunjungan Wisatawan (Ribuan Orang)*	997	1.070	1.605	2.407	3.611	5.416
				12 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		0,05 - 0,05	0,05-0,05	0,05-0,10	0,10-0,15	0,15-0,20
				13 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD						
				a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	95,91	96	97,08	98,33	98,8	99,22
				b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	58,19	58,5	59,81	61,26	62,39	63,49
				c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,15	5,25	7,6	11,5	15,4	20,45
				d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,29	0,35	0,55	0,72	0,88	1,08
				e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	14.22 (2022)	14,50	14,75	15,00	15,50	16,50
				14 Penciptaan lapangan kerja yang baik						
				a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,82	3,50 – 4,00	3,00 - 3,50	2,50 – 3,00	2,00 – 2,50	1,80 - 2,83
				b) Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	40,89	41,29	43,35	46,5	50,25	54,83
				c) Persentase Pemuda Wirausaha (%)	0,98	1,96	3,92	5,92	7,92	9,92
				15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	43,19	43,65	45	46,8	47,4	50,25
				16 Tingkat Penguasaan IPTEK						
				a) Indeks kapabilitas inovasi	0,27	0,35	0,35-0,58	0,66-1,10	1,26-2,10	2,38-4,52
				b) Indeks Inovasi Daerah	37,12	40,08	41,65-46,74	48,57-56,63	58,84-68,61	71,30-86,38

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target			
							Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			APS5. Transformasi Digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	-	-	-	-	-	-
			APS6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	17 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,95	24,86 – 25,07	25-25,5	25-26	25-26,5	25-27
				18 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	48,78	49.03 - 50.00	51,4	53,82	56,14	58,52
			APS7. Penerapan Ekonomi Hijau	19 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
				Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	-	17,74	20,54	20,66	22,63	23,01
			APS8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	20 Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan						
				a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	75,19%	78,15%	83,60%	89,61%	94,79%	100,00%
				b) Persentase Desa Mandiri (%)	72,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				c) Indeks Konektivitas	58,17	61,73	69,38	78,95	88,52	100
3	Mewujudkan Transformasi tata Kelola untuk membangun Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik	APS9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	21 Indeks Reformasi Hukum	n/a	60	70	80	85	100
				22 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,01	3,22	3,68	4,00	4,92	5,00
				23 Indeks Pelayanan Publik	2,82	3,51	3,80	4,30	4,50	4,51

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target					
							Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif	yang berbasis digital			24	Indeks Integritas Daerah	74,65	75-77	75-77	75-77	78-79	80-100	
				25	Tingkat SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 5	
				26	Indeks Pembangunan Hukum	a) Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (d disesuaikan dengan karakteristik daerah)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						b) Persentase capaian pelaksanaan Aksi HAM (d disesuaikan dengan karakteristik daerah)	96,2%	97%	97%	98%	99%	100%
				27	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	84,56	85,05	87,56	89,73	90,61	93,23	
				28	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,1	0,1	0,15 - 0,16	0,16 - 0,17	0,17 - 0,18	0,19 - 0,20	
						29	Tingkat Inflasi (%)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
				30	Jumlah Kerjasama Provinsi/ Kabupaten/Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/Sister City)	6	7	3	3	3	3	
						31	Indeks Daya Saing Daerah	2,89	3,01	3,01-3,27	3,34-3,62	3,69-4,00

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target					
							Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
4	Memantapkan pengamalan budaya melayu dan mewujudkan Siak hijau	Meningkatnya Kualitas Pengamalan Budaya Melayu dan Kelestarian Lingkungan	APS13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	32	Indek Pembangunan Kebudayaan Melayu (IPKM)	n/a	55-58	55 -58	59-63	64-68	69-73	
				33	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73.05	73,00-74.00	74,01-75,00	75,01 – 76,00	76,01-80,99	> 81,0	
			APS14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	34	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	67,01	69,12 - 70,92	70,92 - 72,72	72,72 - 74,57	74,57 - 76,42	76,42 - 78,27	
				35	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,542	0,510 - 0,535	0,495 – 0,509	0,450 – 0,494	0,405- 0,454	0,300 – 0,150	
			APS15. Lingkungan Hidup Berkualitas	36	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		0,394	0,400	0,425	0,450	0,474	
				37	Kualitas Lingkungan Hidup							
					a)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	70,07	70,07	70,79	72,64	74,44	76,51
					b)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	4,24%	6,14%	14,09%	24,02%	33,95%	45,87%
					c)	Pengelolaan Sampah						
				▪	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	52,65	55	60	70	80	90	

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal (2023)	Baseline 2025	Target				
							Tahap I 2029	Tahap II 2034	Tahap III 2039	Tahap IV 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
				<ul style="list-style-type: none"> Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) 	4,261%	27	35	55	75	100	
			APS16. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	38 Indeks Risiko Bencana (IRB)	120,9	118	112,2	104,95	97,7	89	
				39	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
					a. Tahunan	n/a	3	36,44	54,07	71,7	92,85
5	Membangun Sarana dan Prasarana dan infrastruktur yang Berkualitas, Merata dan berkeadilan.	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana terutama untuk transportasi ketahanan energi, air dan pangan	APS17. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	40	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
					a) Ketahanan Energi						
					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	625,51	702,83	1000	1300	1700	702,83
					b) Indeks Ketahanan Pangan	74,74	77,24	82,24	88,49	94,74	100
					c) Ketahanan Air						
					<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas Air Baku (m3) Perkapita 	6,54	6,40	6,09	5,75	5,48	5,22
					<ul style="list-style-type: none"> Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 	22,36%	23,58%	26,28%	45,53%	70,11%	100,00%

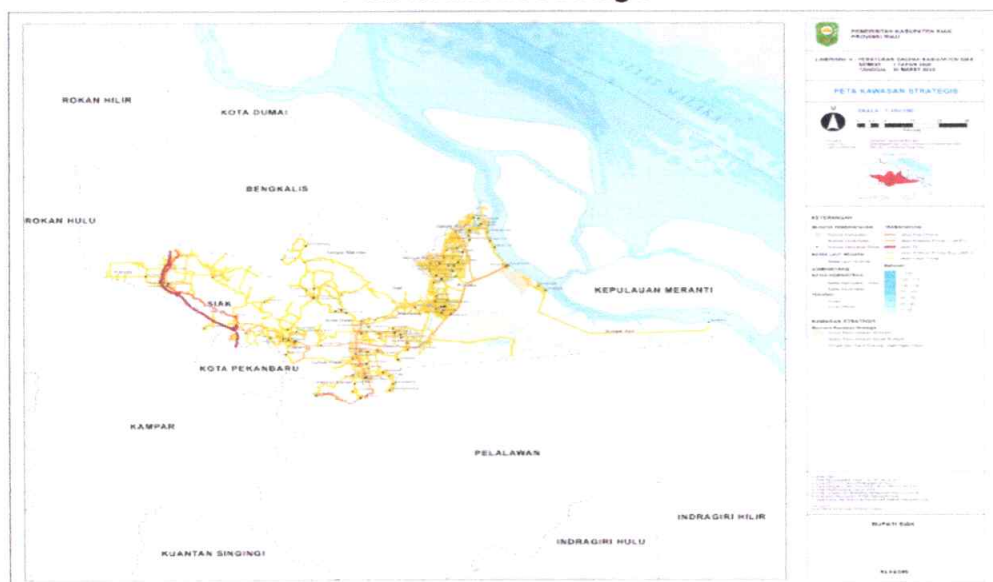
Sumber : Data Olahan Tahun 2023

5.3 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Siak terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan

1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan strategis sekitar Industri Tanjung Buton berada di Kecamatan Sungai Apit;
 - b. kawasan strategis sentra pangan berada di Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan Sungai Apit;
 - c. kawasan strategis jasa transportasi Koridor Tengah dan Kota Transit Kandis meliputi:
 - Kecamatan Koto Gasib;
 - Kecamatan Lubuk Dalam;
 - Kecamatan Kerinci Kanan; dan
 - Kecamatan Kandis
2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil berada di Kecamatan Sungai Mandau.
 - b. Kawasan Suaka Margasatwa Tasik Belat berada di Kecamatan Sungai Apit.
 - b. Kawasan Taman Nasional Zamrud berada di Kecamatan Dayun; dan
 - c. Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim berada di Kecamatan Minas.

Gambar 5. 1
Peta Kawasan Strategis



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2040

BAB VI



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan ini membentuk landasan strategis bagi Pembangunan di daerah tersebut selama dua puluh tahun ke depan, serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Siak dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, RPJPD Tahun 2025-2045 juga berfungsi sebagai arahan bagi semua pihak yang terlibat di Kabupaten Siak untuk berkontribusi dalam Pembangunan daerah tersebut, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 berisikan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah yang dijabarkan dalam empat tahapan Pembangunan. Penyusunan RPJPD melalui proses Panjang dengan melibatkan berbagai pihak antara lain diskusi Bersama Masyarakat, tokoh Masyarakat, *focus grup discussion* dengan pakar, praktisi dan akademisi, konsultasi publik, musrenbang, pembahasan Bersama DPRD. Selain itu, RPJPD Kabupaten Siak juga dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 yaitu **“PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”**, maka perlu di dukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) stabilitas daerah yang konsisten; (3) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (4) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; (5) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Siak; dan (6) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.1 Kaidah Pelaksanaan.

Untuk mewujudkan **“PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”** pada tahun 2045, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan tertinggi di daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh tahun), sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan dokumen perencanaan

tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

2. Penjabaran dari dokumen RPJPD ke dalam dokumen perencanaan lainnya harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas, untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pelaku non pemerintah.
3. Supaya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dapat konsisten menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja RPJMD maka diperlukan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
4. Dalam proses penjabaran RPJPD ke dalam dokumen perencanaan turunannya, menggunakan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dengan menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Melalui KKL tersebut maka sasaran pokok berupa *impact* yang terdapat pada RPJPD dapat diterjemahkan dengan baik sampai dengan level output.
5. Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pokok, maka dilakukan pengendalian secara kontinu dan partisipatif dari para pemangku kepentingan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko, mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
6. Sejalan dengan perkembangan tantangan yang sangat dinamis dan perubahan tatanan sosial yang sangat cepat, memungkinkan adanya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD ini menjadi kurang adaptif atau tidak dapat diwujudkan. Dalam kondisi demikian maka dokumen RPJPD ini dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2 Manajemen Risiko

Periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025. Sebelum memasuki akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025, maka sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah harus menyusun rancangan awal RPJPD Tahun 2025-2045 paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD Tahun 2005-2025 berakhir.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2025-2045 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode dan menjaga sinkronisasi kerangka logis dengan RPJPN Tahun 2025-2045, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dalam

perencanaan pembangunan jangka Panjang. Hal ini memerlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi serta memberikan landasan kepastian hukum dalam mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko.

Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko, setelah itu dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *Impact* atau *probability* untuk mencegah agar risiko tidak terjadi atau dihindari. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Adapun identifikasi resiko terhadap target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Target Indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2045 terlalu tinggi sebesar 0,08 – 1,00 persen, untuk mencapai target tersebut berdasarkan perhitungan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2045 sebesar 3,97 – 4,25 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2045 melihat rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2005 – 2023 sebesar -1,26 persen.
2. Target Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2045 terlalu tinggi sebesar 1,80 – 2,83 persen, untuk mencapai target tersebut berdasarkan perhitungan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2045 sebesar 3,00 – 4,00 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2045 melihat rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode tahun 2005 – 2023 sebesar -2,27 persen.

6.3 Pembiayaan Pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi “**PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN**”, diperlukan pembiayaan pembangunan yang memadai. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi lebih tinggi melalui inovasi optimalisasi dan ekspansi sumber-sumber pendapatan. Optimalisasi dan ekspansi sumber-sumber pendapatan dilakukan melalui mekanisme yang baru, didukung oleh kelembagaan dan regulasi yang lebih adaptif, dengan menggunakan sistem digital. Selain itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, dunia usaha dan sektor perbankan, untuk terlibat aktif dalam